

ANALISIS DATA PENDIDIKAN UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL

(ANALISIS KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAN 2015)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015**



**ANALISIS DATA PENDIDIKAN
UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL
(ANALISIS KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2014 DAN 2015)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2015**

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kemdikbud, Analisis Data Pendidikan untuk
Lembaga Internasional (Analisis Keuangan
Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015)/Disusun oleh:
Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan – Jakarta: Pusat
Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015
xiii, 95 hal, bbl, illus, 23 cm

ISBN 979 401 650 0

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. DATA | 5. BIAYA LANGSUNG |
| 2. KEUANGAN | 6. BIAYA TIDAK LANGSUNG |
| 3. SKPD KOTA | 7. 2014-2015 |
| 4. SKPD KABUPATEN | |
| I. Judul | |

Tim Penyusun Buku

Pengarah:
Bastari
Siti Sofiah

Penulis:
Ida Kintamani

Penyunting:
Sudarwati

Desain Cover:
Abdul Hakim

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku "Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015)" pada tahun 2015 difokuskan pada analisis keuangan. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk melakukan analisis data keuangan yang merupakan salah satu bagian yang setiap tahun diminta oleh lembaga internasional melalui kuesioner elektronik yang disebut *World Education Indicators* (WEI) 2015.

Metode yang digunakan ada dua jenis, yaitu studi dokumentasi dan survai. Studi dokumentasi dilaksanakan karena data telah tersedia di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), yaitu data statistik persekolahan SD, SMP, SMA, SMK, statistik PT, dan statistik PNF khusus pendidikan kesetaraan. Survai dilakukan untuk memperoleh data keuangan di lapangan, khususnya data keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Survai dilaksanakan di 67 kabupaten/kota sebagai sampel. Pengumpulan data keuangan menggunakan instrumen yang telah disusun dan telah melalui perbaikan dari hasil uji coba yang dilakukan sebelumnya. Instrumen tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu biaya tidak langsung dan biaya langsung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam bentuk tabel. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil dan bahasan menunjukkan lima hal, yaitu 1) deskripsi data, 2) analisis data keuangan SKPD kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014 dan 2015, 3) perkembangan data keuangan SKPD kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2015, 4) analisis data keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota sampel tahun 2014 dan 2015, dan 5) perkembangan data keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota sampel tahun 2014-2015.

Deskripsi data menjelaskan tentang data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan kabupaten/kota sampel tahun 2014 dan tahun 2015. Data keuangan yang dikumpulkan adalah belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji/tunjangan, tambahan penghasilan, dan retribusi serta belanja langsung yang terdiri dari 16 program.

Analisis data keuangan SKPD kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam belanja tidak langsung, porsi terbesar adalah gaji dan tunjangan sebesar 63,91% dan terkecil adalah retribusi sebesar mendekati 0,00%. Bila dilihat setiap kabupaten/kota maka proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung adalah Kabupaten Buleleng sebesar 16,61% dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar 99,94% dan tambahan penghasilan sebesar 5,06% karena tak ada retribusi. Untuk belanja langsung, porsi terbesar adalah modal sebesar 53,99% dan terkecil adalah pegawai sebesar 7,47%. Untuk Provinsi Bali, alokasi terbesar belanja langsung adalah program 7 wajib belajar sebesar 58,78% dan terkecil adalah program 4 kapasitas sumber daya sebesar 0,03%. Bila belanja tidak langsung dan langsung dijumlahkan maka belanja tidak langsung sebesar

83,81% lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 16,19%. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp5.937.556,00, sedangkan persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 35,57%.

Analisis data keuangan SKPD kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam belanja tidak langsung, porsi terbesar adalah gaji dan tunjangan sebesar 62,30% dan terkecil adalah retribusi sebesar mendekati 0,00%. Bila dilihat setiap kabupaten/kota maka proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung adalah Kabupaten Buleleng sebesar 18,64% dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar 95,42% dan tambahan penghasilan sebesar 4,58% karena tak ada retribusi. Untuk belanja langsung, porsi terbesar adalah barang dan jasa sebesar 52,02% dan terkecil adalah pegawai sebesar 8,50%. Untuk Provinsi Bali, alokasi terbesar belanja langsung adalah program 7 wajib belajar sebesar 60,58% dan terkecil adalah program 14 Kebudayaan sebesar mendekati 0,00% karena hanya ada di Kabupaten Jembrana. Bila belanja tidak langsung dan langsung dijumlahkan maka belanja tidak langsung sebesar 82,36% lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 17,64%. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp6.176.626,00, sedangkan persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 33,87%.

Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota Provinsi Bali selama 2 tahun meningkat sebesar 2,33% per tahun, namun belanja gaji dan tunjangan menurun 0,25%, tambahan penghasilan meningkat 6,90%, dan retribusi menurun 30,15%. Belanja langsung juga meningkat sebesar 13,48% per tahun, belanja pegawai meningkat sebesar 29,21% per tahun, belanja barang dan jasa meningkat sebesar 53,17% per tahun, dan belanja modal menurun sebesar 17,02% per tahun. Baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung masih meningkat sebesar 4,14%. Perkembangan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar 4,03% per tahun. Sebaliknya, persentase belanja pendidikan terhadap APBD justru menurun sebesar 2,90% per tahun.

Analisis data keuangan SKPD kabupaten/kota sampel tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam belanja tidak langsung, porsi terbesar adalah gaji dan tunjangan sebesar 56,14% dan terkecil adalah retribusi sebesar mendekati 0,00%. Untuk belanja langsung, porsi terbesar adalah modal sebesar 55,19% dan terkecil adalah pegawai sebesar 11,72%. Secara rata-rata, alokasi terbesar belanja langsung adalah program 7 program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebesar 48,51% dan terkecil adalah program 15 PT sebesar mendekati 0,00%. Bila belanja tidak langsung dan langsung dijumlahkan maka belanja tidak langsung sebesar 83,90% lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 16,10%. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp4.063.356,00, sedangkan persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 34,31%.

Analisis data keuangan SKPD kabupaten/kota sampel tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam belanja tidak langsung, porsi terbesar adalah gaji dan tunjangan sebesar 59,22% dan terkecil adalah retribusi sebesar mendekati 0,00%. Untuk belanja langsung, porsi terbesar adalah modal sebesar 51,67% dan

terkecil adalah pegawai sebesar 12,69%. Secara rata-rata, alokasi terbesar belanja langsung adalah program 7 program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebesar 44,20% dan terkecil adalah program 15 PT sebesar 0,03%. Bila belanja tidak langsung dan langsung dijumlahkan maka belanja tidak langsung sebesar 83,92% lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 16,08%. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp4.326.467,00, sedangkan persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 32,51%.

Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota sampel selama 2 tahun meningkat sebesar 7,03% per tahun, gaji dan tunjangan meningkat 2,96%, tambahan penghasilan meningkat 13,56%, dan retribusi menurun 6,41%. Belanja langsung meningkat sebesar 3,21% per tahun, belanja pegawai meningkat sebesar 5,57% per tahun, belanja barang dan jasa meningkat sebesar 14,10% per tahun, dan belanja modal menurun sebesar 3,67% per tahun. Bila belanja tidak langsung digabungkan dengan belanja langsung maka masih meningkat sebesar 6,40%. Perkembangan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar 7,51% per tahun. Sebaliknya, persentase belanja pendidikan terhadap APBD justru menurun sebesar 4,38% per tahun. Hal ini menunjukkan belanja pendidikan menurun.

KATA PENGANTAR

Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015) pada tahun 2015 ini menitikberatkan pada kajian tentang data keuangan pendidikan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Sampel tahun anggaran 2014 dan 2015.

Data keuangan kabupaten/kota sampel merupakan hasil pengumpulan data pada tahun anggaran 2015. Untuk menghasilkan data tersebut maka disusun instrumen keuangan yang berisi tentang dua jenis, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai dengan data keuangan kabupaten/kota maka data yang dianalisis adalah program-program dari Pendidikan Dasar dan Menengah.

Data dan indikator keuangan tersebut disajikan dalam bentuk belanja tidak langsung menurut jenis belanja, belanja langsung menurut program dan jenis belanja, belanja langsung menurut jenis pendidikan, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disertai dengan perkembangannya tahun 2014 dan 2015.

Hasil analisis keuangan ini berisi 1) deskripsi data, 2) analisis data keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014 dan 2015, 3) analisis perkembangan keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014-2015, 4) analisis data keuangan SKPD 67 kabupaten/kota Tahun 2014 dan 2015, dan 5) analisis perkembangan keuangan SKPD 67 kabupaten/kota Tahun 2014-2015.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, November 2015

Kepala,

Dr. Bastari
NIP 19660730 1996011001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat	5
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	 7
A. Analisis	7
B. Data, Informasi, dan Indikator	7
C. Satuan Kerja Perangkat Daerah	9
D. Klasifikasi Belanja Daerah	10
 BAB III: METODOLOGI	 11
A. Metode	11
B. Indikator Keuangan Pendidikan	12
 BAB IV: HASIL DAN BAHASAN	 14
A. Deskripsi Data	14
B. Analisis Data Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali	16
C. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali	42
D. Analisis Data Keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota	48
E. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota	77
F. Bahasan Hasil Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota	87
 BAB V: PENUTUP	 90
A. Simpulan	90
B. Rekomendasi	94
 DAFTAR PUSTAKA	 95

DAFTAR TABEL

		Halaman
BAB IV		
Tabel 4.1A :	Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	16
Tabel 4.1B :	Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	17
Tabel 4.2A :	Persentase Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	19
Tabel 4.2B :	Persentase Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	20
Tabel 4.3A :	Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	22
Tabel 4.3B :	Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	25
Tabel 4.4A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	28
Tabel 4.4B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	29
Tabel 4.5A :	Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	30
Tabel 4.5B :	Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	30
Tabel 4.6A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	31
Tabel 4.6B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	32
Tabel 4.7A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	33
Tabel 4.7B :	Persentase Belanja Menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	34
Tabel 4.8A :	Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	36
Tabel 4.8B :	Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	37
Tabel 4.9A :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	38
Tabel 4.9B :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	39
Tabel 4.10A :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	40

Tabel 4.10B :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	41
Tabel 4.11 :	Perkembangan Persentase Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja, Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014--2015	42
Tabel 4.12 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja, Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2014—2015	43
Tabel 4.13 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2014--2015	45
Tabel 4.14 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung dan Tak Langsung, Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2014--2015	46
Tabel 4.15 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015	47
Tabel 4.16 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2014--2015	48
Tabel 4.17A:	Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	49
Tabel 4.17B:	Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	51
Tabel 4.18A:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	53
Tabel 4.18B:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	54
Tabel 4.19A:	Jumlah Belanja Langsung menurut Program Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	55
Tabel 4.19B:	Jumlah Belanja Langsung menurut Program Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	57
Tabel 4.20A:	Persentase Belanja Langsung menurut Program Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	59
Tabel 4.20B:	Persentase Belanja Langsung menurut Program Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	60
Tabel 4.21A:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	61
Tabel 4.21B:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	64
Tabel 4.22A:	Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	66

Tabel 4.22B:	Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	68
Tabel 4.23A:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	70
Tabel 4.23B:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	72
Tabel 4.24A:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	74
Tabel 4.24B:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	76
Tabel 4.25 :	Perkembangan Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014—2015	78
Tabel 4.26 :	Perkembangan Belanja langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014-2015	80
Tabel 4.27 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015	81
Tabel 4.28 :	Perkembangan Persentase Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014—2015	83
Tabel 4.29 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015	85
Tabel 4.30 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014--2015	86
Tabel 4.31 :	Rangkuman Belanja Pendidikan, Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2014--2015	88
Tabel 4.32 :	Rangkuman Perkembangan Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015	89

DAFTAR GRAFIK

Halaman

BAB IV

Grafik 4.1A :	Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014	19
Grafik 4.2A :	Porsi Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014	19
Grafik 4.3B :	Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2015	20
Grafik 4.4B :	Porsi Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2015	21
Grafik 4.5A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	28
Grafik 4.5B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	29
Grafik 4.6A :	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014	34
Grafik 4.6B :	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2015	35
Grafik 4.7A :	Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014	36
Grafik 4.7B :	Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2015	37
Grafik 4.8A :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2014	38
Grafik 4.8B :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2015	39
Grafik 4.9A :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014	41
Grafik 4.9B :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015	41
Grafik 4.10 :	Perkembangan Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2014--2015	43
Grafik 4.11 :	Perkembangan Belanja Langsung Tiap Kabupaten/ Kota Provinsi Bali, Tahun 2014--2015	44
Grafik 4.12 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan, Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014--2015	45
Grafik 4.13 :	Perkembangan Belanja Tidak langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014--2015	46

Grafik 4.14 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014-2015	47
Grafik 4.15 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014--2015	48
Grafik 4.16A:	Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota Tahun 2014	50
Grafik 4.16B:	Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten dan Rata-rata Kota Tahun 2015	50
Grafik 4.17A:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota Tahun 2014	52
Grafik 4.17B:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota Tahun 2015	54
Grafik 4.18A:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota Tahun 2014	63
Grafik 4.18B:	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota Tahun 2015	63
Grafik 4.19A:	Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	67
Grafik 4.19B:	Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	69
Grafik 4.20A:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	71
Grafik 4.20B:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	73
Grafik 4.21A:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014	75
Grafik 4.21B:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015	77
Grafik 4.22 :	Perkembangan Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/ Kota Tahun 2014--2015	79
Grafik 4.23 :	Perkembangan Belanja Langsung Tiap Kabupaten/ Kota Tahun 2014--2015	79
Grafik 4.24 :	Perkembangan Belanja Tidak langsung dan Langsung Tahun 2014--2015	84

Grafik 4.25 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015	84
Grafik 4.26 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2014--2015	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk dengan urutan kelima terbesar di dunia. Sebagai negara besar, Indonesia menjadi perhatian kalangan internasional baik dari segi kependudukan maupun dari segi ekonomi. Selain itu, perhatian kalangan internasional juga ditujukan pada bidang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Bukti dari perhatian kalangan internasional ini dapat dilihat dari besarnya bantuan maupun pinjaman yang diberikan kepada Indonesia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Perhatian kalangan internasional terhadap pendidikan terlihat pada banyaknya permintaan akan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia dan diikuti dengan makin banyaknya bantuan yang diberikan oleh kalangan internasional. Permintaan data tersebut makin meningkat baik dari segi frekuensi maupun keanekaragaman data, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang kualitatif, dan baik yang bersifat rutin tahunan maupun pada saat tertentu. Kebutuhan akan data tersebut antara lain digunakan untuk mengetahui apakah bantuan yang telah diberikan oleh lembaga internasional dapat meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan oleh kalangan internasional, ternyata cukup banyak jenis data yang tidak pernah atau belum dikumpulkan dengan mekanisme pendataan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 (Permendikbud 11/2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana pendidikan tinggi sudah tidak termasuk dalam Permendikbud 11/2015. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Bagian Ketiga Pasal 797 mengenai Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), pada pasal 813 terdapat bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Pasal 814 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan

- e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan pada 815 maka bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.
- b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan.

Bagi jenis data yang belum ada dalam pendataan yang telah dilaksanakan di Kemdikbud, data tersebut pada umumnya diisi dengan ... (titik tiga) yang artinya data tidak tersedia. Jenis data yang sering tidak dapat diisi tersebut antara lain adalah jumlah siswa, siswa baru, lulusan, guru dan tenaga kependidikan yang dirinci menurut jenis kelamin dan usia tunggal serta data keuangan terutama yang berasal dari luar Kemdikbud seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta atau perusahaan, masyarakat, lembaga internasional dan lain-lainnya. Data keuangan terasa makin sulit diperoleh setelah adanya otonomi pendidikan karena dana pendidikan berasal dari berbagai pihak dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan lembaga internasional.

Pengelolaan dana pendidikan dari berbagai kalangan ini menyebabkan sulit diperoleh data keuangan pendidikan tersebut. Akibatnya, menimbulkan berbagai masalah, di antaranya adalah yang menyangkut adanya salah penilaian terhadap kinerja pendidikan di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh lembaga pendidikan internasional. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah akan terkucilnya pendidikan di Indonesia dari negara-negara lainnya di dunia, bila Indonesia tidak dapat menyajikan data pendidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga internasional.

Dalam era globalisasi ini diperlukan keterbukaan akan arus informasi yang memerlukan dukungan data. Data tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan sumber utama berasal dari lingkungan Kemdikbud, dari lingkungan luar Kemdikbud seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, terdapat 20 Kementerian lain sebagai penyelenggara pendidikan dan lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah yang menyelenggarakan pendidikan. BPS setiap tiga tahun sekali melakukan survai tentang biaya pendidikan yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Data ini sangat membantu untuk mengisi data keuangan yang berasal dari rumah tangga.

Oleh karena itu, ketiga kementerian dan BPS tersebut sangat diperlukan dalam menghasilkan data pendidikan termasuk keuangan pendidikan. Agar diperoleh data yang konsisten, valid, dan reliabel maka diperlukan pengolahan data yang terintegrasi, mengingat dana yang dialokasikan untuk 20 Kementerian lain penyelenggara pendidikan sangat besar sehingga sangat penting untuk dilakukan pengelolaan yang terintegrasi. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan internasional maka diperlukan data keuangan yang tidak hanya berasal pemerintah pusat melainkan juga dari daerah seperti dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta, lembaga internasional, dan rumah tangga atau orang tua siswa.

Luas wilayah Indonesia yang tersebar pada ribuan pulau dan 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota memerlukan strategi yang tepat baik dalam menerapkan metode maupun waktu agar tidak terjadi kerancuan data dalam pengumpulan dan pengolahan data pendidikan. Hal itu sangat diperlukan sehingga dapat diperoleh kepastian informasi untuk pengambilan kebijakan pimpinan kementerian, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Di samping itu, banyak lembaga dan badan internasional yang juga memerlukan data dan informasi pendidikan Indonesia untuk digunakan sebagai bahan studi perbandingan. Beberapa lembaga internasional yang memerlukan data dan informasi pendidikan Indonesia yang diperlukan di antara negara-negara yang tergabung dalam suatu badan internasional, yaitu

- 1) *International Consultative Forum on Education for All* (EFA) dari *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).
- 2) *World Education Indicators* (WEI) dari UNESCO dan *Organization for Economics Co-operation Development* (OECD).
- 3) *Millenium Development Goals* (MDGs) dari *United Nations Development Programs* (UNDP).
- 4) *Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO).
- 5) *Korea Education and Research Information Service* (KERIS)

Kelima organisasi internasional yang dijelaskan di atas merupakan contoh suatu badan internasional yang memerlukan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia. Selain itu, PDSPK diminta melakukan verifikasi dan validasi data Indonesia yang akan diterbitkan oleh OECD dalam rangka penyusunan buku antara lain *Education at a Glance* (Pendidikan Selayang Pandang) yang sifatnya internasional dan dipublikasikan tiap tahun. (UNESCO/OECD, 2013).

Untuk mendukung penyusunan buku internasional tersebut maka setiap tahun PDSPK diminta untuk mengisi instrumen WEI, tahun ini disebut kuesioner elektronik WEI 2015. Selain Statistik Persekolahan, Statistik Perguruan Tinggi (mulai data tahun 2014/2015 sudah tidak disusun oleh PDSPK karena adanya perubahan struktur organisasi Kemdikbud), dan Statistik Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh PDSPK, Kemdikbud maka perlu didukung oleh publikasi lainnya yang berkaitan dengan data yang diminta oleh WEI. Oleh karena itu,

perangkat pendukung tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk merancang sistem pengolahan data pendidikan yang dapat menghasilkan informasi pendidikan. Informasi tersebut, selain digunakan untuk lembaga dan badan internasional dapat pula digunakan untuk berbagai keputusan strategik di bidang pendidikan yang dapat menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Informasi tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pengisian data dari kuesioner elektronik WEI khususnya tentang keuangan maka mulai tahun 2011 PDSPK menyusun mekanisme baru dengan meminta data keuangan di lapangan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tiap provinsi dan SKPD sampel beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2011 dikumpulkan data SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota selama 2 tahun, yaitu tahun 2009 dan tahun 2010. Pada tahun 2012 dikumpulkan data SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota selama 2 tahun, yaitu tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2013 dikumpulkan data SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota tahun 2013. Namun, karena keterbatasan dana yang tersedia pada tahun 2014 maka pengumpulan data hanya dilakukan pada SKPD provinsi. Walaupun demikian, untuk analisis dilakukan pada data keuangan dari SKPD provinsi tahun 2009 sampai 2014 ditambah dengan data dari SKPD kabupaten/kota sampel dari tahun anggaran 2009 sampai 2013.

Pada tahun 2015, untuk mendukung pengisian data dari kuesioner elektronik WEI tahun 2015 maka dikumpulkan data SKPD Kabupaten/Kota sampel sebanyak 67 kabupaten/kota termasuk data 9 kabupaten/kota Provinsi Bali dengan menjangkau data tahun 2014 dan 2015.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana analisis data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Bali?
3. Bagaimana analisis perkembangan data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Bali?
4. Bagaimana analisis data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan 67 Kabupaten/Kota sampel?
5. Bagaimana analisis perkembangan data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan 67 Kabupaten/Kota sampel?

C. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan dilakukannya kegiatan penyusunan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (*WEI, OECD, UNESCO*) 2015, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mendokumentasikan data keuangan pendidikan yang berasal dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai sampel tahun 2014 dan 2015.

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan khususnya ada lima seperti disajikan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel.
2. Melakukan analisis data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014 dan 2015
3. Melakukan analisis perkembangan data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014--2015
4. Melakukan analisis data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan 67 Kabupaten/Kota sampel tahun 2014 dan 2015
5. Melakukan analisis perkembangan data keuangan pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan 67 Kabupaten/Kota tahun 2014--2015

D. Ruang Lingkup

Untuk dapat melaksanakan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (*WEI, OECD, dan UNESCO*) 2015 maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada data keuangan dan analisis keuangan tiap kabupaten/kota sampel hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada tahun 2015.

Pembatasan pada data keuangan dan analisis keuangan ini disebabkan karena sebagian besar data keuangan diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dilakukan pada tahun 2015. Di samping itu, terdapat indikator-indikator penting yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan data keuangan.

Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat menguntungkan karena dengan melakukan analisis keuangan maka dapat diketahui apakah data keuangan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pendidikan tentang keuangan yang harus mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

E. Manfaat

Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan untuk Kemdikbud, *stakeholder*, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data keuangan pendidikan khususnya yang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota sampel.

Untuk Kemdikbud dengan tersedianya data keuangan dari SKPD Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program-program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang pendidikan khususnya keuangan di tingkat nasional.

Stakeholder dapat memanfaatkan data keuangan pendidikan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan di kabupaten/kota yang menjadi sampel.

Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data keuangan pendidikan untuk kebutuhan penelitian atau pengembangan pendidikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Analisis

Sesuai dengan tugas bidang pendayagunaan dan pelayanan data berdasarkan Permendikbud 11/2015, salah satunya adalah melaksanakan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Pendayagunaan data merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi terhadap hasil produksi data berdasarkan pada perkembangan pembangunan pendidikan, kebutuhan pimpinan, atau permintaan data. Pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan.

Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Oleh karena itu, analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan. (Kintamani, 2007).

Analisis merupakan komponen pendataan pendidikan agar dihasilkan data yang berkualitas dan mengetahui apakah terdapat masalah dalam pendidikan. Oleh karena itu, analisis data keuangan yang disajikan pada lembaga internasional ini sangat diperlukan agar diketahui tentang masalah keuangan pendidikan dan berapa dana yang dialokasikan oleh daerah untuk pendidikan.

B. Data, Informasi, dan Indikator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (Daring), data adalah keterangan yang belum nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan). Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. (wikipedia.org/wiki/data).

Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf atau simbol yang menggambarkan nilai suatu variabel

tertentu sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Angka, huruf atau simbol tersebut sering disebut sebagai data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep atau gejala tertentu. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut. Data tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan menjadi informasi. (Kintamani, 2007).

Sebaliknya, informasi menurut KBBI Daring adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Secara teknis, informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah memiliki arti. Informasi lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan data. Informasi tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi. Dengan demikian, data dan informasi saling berkaitan karena dengan adanya data maka seseorang bisa menjadi informasi bagi orang lain. Data dan informasi tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Data dan informasi merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet (semisal dari Microsoft Excel) seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. (wikipedia.org/wiki/informasi).

Seperti halnya, data dan informasi maka data dan indikator juga merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat. Bila menurut KBBI Daring, data adalah keterangan yang belum nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan) maka indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan: seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan bahan yang sudah ada; kenaikan harga dapat menjadi adanya inflasi. (kkbi.web.id/indikator)

Dengan demikian, bila data lebih berkaitan dengan pengumpulannya maka indikator lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk indikator.

Secara teknis, indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil atau dampak dari suatu instrumen kebijakan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Secara sederhana, indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Bila dikaitkan dengan pendidikan maka indikator pendidikan dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan di bidang pendidikan. Selanjutnya, bila digunakan indikator keuangan maka dapat diukur sejauh mana keuangan tersebut dapat meningkatkan pendidikan. Dengan demikian, data dan indikator pendidikan tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Indikator pendidikan tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data pendidikan. Sebaliknya, data pendidikan tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan data pendidikan menjadi indikator pendidikan. Besaran indikator pendidikan ini merupakan sesuatu yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar dari strategi kebijakan pendidikan, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan, memperluas keterjangkauan layanan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kesetaraan layanan, dan menjamin kepastian layanan.

Dengan demikian, data, informasi, dan indikator keuangan yang disajikan telah sesuai dengan istilah KKBI Daring, sesuai istilah teknis, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga internasional.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri 13, Tahun 2006 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah).

Kewenangan daerah yang besar dalam mengelola keuangan daerah tentu memiliki dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak begitu kuat (tidak signifikan) terhadap PDRB. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>).

Data dan informasi dari SKPD Kabupaten/Kota diambil dari 67 kabupaten/kota sampel mengenai data keuangan yang berasal dari APBD kabupaten/kota untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Data yang diambil dari kabupaten/kota merupakan data yang berisi anggaran untuk Dinas Pendidikan kabupaten/kota sampel dari DPA SKPD yang berisi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dirinci menurut gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan belanja penghasilan lainnya. Belanja langsung dirinci menurut jenis program pendidikan yang dirinci menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

D. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Permendagri 13/2006), pada Lampiran 4 terdapat dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa serta belanja tak terduga. Selain itu, terdapat tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk tambahan penghasilan PNS seperti berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. (Kementerian Dalam Negeri, 2011).

Belanja langsung merupakan belanja daerah yang terkait langsung dengan program atau kegiatan. Termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan Permendagri 13/2006 maka dalam analisis keuangan ini juga digunakan belanja tidak langsung dan langsung yang dirinci dengan lebih rinci dari yang disebutkan dalam Permendagri tersebut. Belanja tidak langsung terkait dengan gaji dan tunjangan sedangkan langsung terkait dengan program-program pendidikan. Dengan demikian, belanja yang dianalisis telah sesuai dengan Permendagri.

BAB III METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2015 ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu 1) studi dokumentasi atau kepustakaan dan 2) survai.

Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi dan buku-buku kepustakaan lainnya atau bahan yang tersedia di lingkungan Kemdikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, kurikulum pendidikan, peta program pendidikan, pengkalan data pendidikan, pedoman maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data pendidikan. Selain itu, melakukan studi dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian lainnya seperti Kemenag yang menyangkut pendidikan seperti statistik madrasah, Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan fungsi.

Survai dilaksanakan ke lapangan adalah studi yang mengambil data dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan survai adalah hasil studi ini dapat dilakukan generalisasi dari sampel terhadap populasi. Populasi yang dimaksud adalah 500 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan survai dilakukan dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner khusus keuangan menggunakan format yang telah disiapkan oleh PDSPK, Kemdikbud yang telah melalui uji coba dan perbaikan kepada 3 orang petugas di setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menjadi responden survai.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dilaksanakan untuk menjangkau data sekunder yang meliputi data keuangan yang terdiri dari dua hal, yaitu belanja langsung dan tidak langsung dan dirinci menurut jenjang pendidikan serta jenis biaya. Wawancara dilakukan kepada Ketua Kelompok Pendataan Pendidikan atau Kepala Subbag Program dengan didampingi oleh 2 orang sebagai responden yang pada pelaksanaannya adalah mereka mengisi kuesioner keuangan.

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang penyusunan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Pendidikan Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2015. Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan data keuangan pendidikan dari SKPD dan perkembangan data keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel.

Penyajian data menggunakan tabel dan grafik sehingga memudahkan dalam memahami kajian yang telah disusun.

B. Indikator Keuangan Pendidikan

Sesuai dengan data keuangan yang dikumpulkan di SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel beberapa indikator keuangan yang disajikan berikut ini dihasilkan dari pengolahan data yang dilakukan.

Berdasarkan data keuangan yang dikumpulkan diperoleh indikator keuangan tiap kabupaten/kota Provinsi Bali dan 67 kabupaten/kota sampel yang mencakup 25 provinsi di Indonesia. Analisis keuangan dirinci menjadi empat, yaitu analisis keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2014 dan 2015, analisis perkembangan kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2014--2015, analisis keuangan 67 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2014 dan 2015, dan analisis perkembangan 67 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2014--2015.

Analisis keuangan tiap kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2014 dan 2015 terdiri dari tujuh indikator, yaitu

- a. Persentase belanja tidak langsung menurut jenis belanja tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- b. Porsi belanja tidak langsung menurut jenis belanja tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- c. Persentase belanja langsung menurut program dan jenis belanja tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- d. Persentase belanja langsung menurut program tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- e. Persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung tiap kabupaten/kota Provinsi Bali
- f. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- g. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.

Analisis perkembangan keuangan tiap kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2014--2015 terdiri dari enam indikator, yaitu

- a. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- b. Angka pertumbuhan belanja langsung tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- c. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- d. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung dan langsung tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- e. Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.
- f. Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD tiap kabupaten/kota Provinsi Bali.

Analisis keuangan 67 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2014 dan 2015 terdiri dari enam indikator, yaitu

- a. Persentase belanja tidak langsung menurut jenis belanja kabupaten/kota sampel.
 - b. Persentase belanja langsung menurut program dan jenis belanja kabupaten/kota sampel.
 - c. Persentase belanja langsung menurut program tiap kabupaten/kota sampel.
 - d. Persentase belanja tidak langsung dan langsung tiap kabupaten/kota sampel.
 - e. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tiap kabupaten/kota sampel.
 - f. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD tiap kabupaten/kota sampel.
- Analisis perkembangan keuangan kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2014--2015 terdiri dari enam indikator, yaitu
- a. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung tiap kabupaten/kota sampel.
 - b. Angka pertumbuhan belanja langsung tiap kabupaten/kota sampel.
 - c. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan tiap kabupaten/kota sampel.
 - d. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung dan langsung tiap kabupaten/kota sampel.
 - e. Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tiap kabupaten/kota sampel.
 - f. Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD tiap kabupaten/kota sampel.

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

A. Deskripsi Data

Untuk memenuhi kebutuhan pengisian instrumen WEI khusus keuangan maka pada tahun 2015 dikumpulkan data keuangan di tingkat kabupaten/kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Instrumen yang digunakan untuk menjaring data keuangan tersebut disesuaikan dengan program-program yang ada pada SKPD Kabupaten/Kota. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2015).

Data keuangan yang dikumpulkan dari SKPD Dinas Pendidikan kabupaten/kota selama dua tahun, yaitu 2014 dan 2015. Data keuangan pada dasarnya terdiri dari dua jenis belanja, yaitu tidak langsung dan langsung. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Belanja tidak langsung dirinci menjadi tiga besaran, yaitu:

1. Gaji dan tunjangan,
2. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, dan
3. Insentif pemungutan retribusi.

Gaji dan tunjangan sebagian besar kabupaten/kota sampel memiliki 11 jenis, yaitu 1) gaji pokok PNS/uang representasi, 2) tunjangan keluarga, 3) tunjangan jabatan, 4) tunjangan fungsional, 5) tunjangan fungsional umum, 6) tunjangan beras, 7) tunjangan khusus, 8) pembulatan gaji, 9) luran asuransi kesehatan, 10) uang duka wafat/tewas, dan 11) gaji guru.

Tambahan penghasilan PNS, tidak semua kabupaten/kota sampel memiliki semua jenis, namun pada dasarnya terdapat 10 jenis, yaitu 1) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, 2) tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, 3) tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, 4) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, 5) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, 6) tambahan penghasilan pegawai, 7) tambahan penghasilan PNS, 8) tambahan penghasilan PN SD (guru PNS daerah), 9) tambahan penghasilan bersyarat, dan 10) uang kesejahteraan pegawai.

Insentif pemungutan retribusi tidak semua kabupaten/kota sampel memiliki program ini.

Belanja langsung dirinci menurut program yang terdiri dari 16 jenis, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pendidikan anak usia dini

7. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
8. Program pendidikan menengah
9. Program pendidikan nonformal
10. Program pendidikan luar biasa/PK dan PLK
11. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
12. Program manajemen pelayanan pendidikan
13. Program kepemudaan dan olahraga
14. Program kebudayaan
15. Program perguruan tinggi
16. Lainnya (yang tidak ada dalam 15 program di atas).

Pada tahun 2015 hanya dikumpulkan data untuk SKPD Dinas Pendidikan kabupaten/kota secara sampel sehingga terdapat 67 kabupaten/kota dengan data yang tersedia. Namun, karena adanya data yang tak masuk maka analisis dilakukan pada 67 kabupaten/kota dengan data yang kurang lengkap.

Data keuangan SKPD kabupaten/kota sampel tahun 2014 dan 2015 yang tidak tersedia belanja tidak langsung adalah Kabupaten Bogor. Selain itu, tahun 2014 data belanja langsung tidak terdapat 4 kabupaten/kota, yaitu Kotawaringin Timur, Tapanuli Tengah, Subang, dan Kota Surabaya. Data tahun 2015, hanya 2 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang dan Kota Surabaya.

Data tahun 2014, belanja tidak langsung untuk belanja pegawai tidak terdapat di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Subang, Tapanuli Tengah, Kota Depok, dan Surabaya. Data tahun 2015 tidak terdapat di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Tapanuli Tengah, Kota Depok, dan Surabaya. Data tahun 2014, belanja tidak langsung untuk belanja barang dan jasa tidak terdapat di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Subang, Tapanuli Tengah, Kota Depok, dan Surabaya. Data tahun 2015 tidak terdapat di dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang dan Kota Surabaya. Data tahun 2014, belanja tidak langsung untuk belanja modal tidak terdapat di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Subang, Tapanuli Tengah, Kota Depok, dan Surabaya. Data tahun 2015 tidak terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Tapanuli Tengah, dan Kota Surabaya.

Ketika dilakukan pengolahan data tetap menggunakan tiga jenis belanja langsung dan 16 program belanja tidak langsung, namun terdapat beberapa program yang tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan belanja untuk program tersebut.

Data pendukung lainnya seperti siswa hanya diperoleh data pendidikan dasar dan menengah, sedangkan data APBD (berdasarkan fungsi) untuk beberapa kabupaten tidak tersedia lengkap tahun 2014 dan 2015. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014). Oleh karena itu, data APBD tahun 2014 yang tidak tersedia digunakan tahun 2015, demikian juga sebaliknya, sedangkan Kota Tangerang Selatan menggunakan APBD tahun 2013. Data APBD tahun 2014 tak tersedia di 7 kabupaten, yaitu Bangli, Bantul, Buleleng, Demak, Jembrana, Lombok Tengah, dan Tabanan. Sebaliknya, data APBD tahun 2015 tak tersedia di 13 kabupaten/kota, yaitu Bangka, Gorontalo Utara, Jenepono, Mamuju,

Pekalongan, Pesawaran, Sampang, Sinjai, Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Depok, Sibolga, dan Yogyakarta.

B. Analisis Data Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Analisis keuangan SKPD Kabupaten/Kota ini menggunakan 10 jenis data dan indikator.

1. Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja

Belanja tidak langsung di semua kabupaten/kota sampel memiliki jenis belanja yang sama sebanyak tiga jenis, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan retribusi dan disajikan selama dua tahun anggaran.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1A, pada tahun 2014 gaji dan tunjangan untuk tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp2.427.609,4 juta dengan rincian terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp598.904,5 juta dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar Rp151.827,7 juta. Tambahan penghasilan PNS untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp1.371.096,9 juta, terbesar pada Kota Denpasar sebesar Rp249.202,3 juta dan terkecil pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp31.907,0 juta. Retribusi hanya dialokasikan pada Kabupaten Badung, Karangasem, dan Tabanan, masing-masing sebesar Rp2.100 ribu, Rp650 ribu, dan Rp650 ribu, sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja lainnya. Dengan demikian, belanja tidak langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp3.798.709,7 juta dengan rincian semua kabupaten di Provinsi Bali sebesar Rp3.296.867,7 dan kota sebesar Rp501.841,9 juta.

Tabel 4.1A
Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Gaji dan Tunjangan									
		Gaji Pokok	Tunj Keluarga	Tunj Jabatan	Tunj Fungsional	Tunj Fung Umum	Tunj Beras	Tunj PPH Khusus	Pembul Gaji	Iuran Askes	Gaji Guru
1	Kab. Badung	202,000,224,331	19,343,745,149	479,233,625	20,906,402,335	1,480,277,263	11,222,280,425	5,952,524,729	3,889,878	6,816,684,847	0
2	Kab. Bangli	112,522,134,062	11,890,331,000	391,300,000	11,504,844,000	1,197,287,000	7,140,000,000	3,575,000,000	6,760,938	3,600,000,000	0
3	Kab. Buleleng	316,268,400,282	30,334,345,897	675,965,680	33,839,178,555	1,237,029,040	17,601,063,480	6,924,749,833	4,507,445	7,143,423,609	184,875,869,000
4	Kab. Gianyar	26,285,311,724	2,216,066,800	298,986,200	2,335,397,800	210,464,200	1,216,053,800	723,786,800	394,100	854,523,500	197,404,572,466
5	Kab. Jembrana	119,744,798,241	10,906,442,400	597,765,000	10,817,794,000	810,026,800	5,494,841,900	3,175,814,500	26,680,000	3,684,827,364	0
6	Kab. Karangasem	215,552,122,900	20,864,668,515	2,042,808,892	26,666,425,906	1,786,489,836	14,589,264,087	7,107,450,442	7,330,265	5,034,095,753	0
7	Kab. Klungkung	127,600,294,087	11,397,392,727	330,655,000	13,155,402,143	538,426,241	7,300,417,275	3,161,228,486	1,844,246	3,181,557,296	0
8	Kab. Tabanan	238,547,915,035	20,682,991,000	537,618,000	23,670,519,000	1,064,596,000	10,660,819,000	6,482,606,000	3,250,000	7,259,565,000	0
9	Kota Denpasar	197,989,677,135	16,867,389,100	417,965,000	17,727,311,400	822,832,632	7,166,711,700	5,313,232,400	2,809,300	6,331,677,100	0
	Jumlah kab + kota	1,556,510,877,797	144,503,372,588	5,772,297,397	160,623,275,139	9,147,429,012	82,391,451,667	42,416,393,190	57,466,172	43,906,354,469	382,280,441,466
	Jumlah 8 kabupaten	1,358,521,200,662	127,635,983,488	5,354,332,397	142,895,963,739	8,324,596,380	75,224,739,967	37,103,160,790	54,656,872	37,574,677,369	382,280,441,466
	Jumlah kota	197,989,677,135	16,867,389,100	417,965,000	17,727,311,400	822,832,632	7,166,711,700	5,313,232,400	2,809,300	6,331,677,100	0

Belanja tidak langsung untuk tambahan penghasilan PNS yang terisi seluruhnya hanyalah tambahan berdasarkan beban kerja, sedangkan berdasarkan tempat bertugas dan prestasi kerja hanya diisi oleh Kota Denpasar, berdasarkan kondisi kerja diisi oleh Kabupaten Tabanan, TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) objektif hanya diisi tiga kabupaten, yaitu Badung, Bangli,

dan Klungkung, sedangkan TPP PNS hanya diisi Kabupaten Karangasem. Sebaliknya, PNS Guru tidak diisi oleh dua kabupaten, yaitu Karangasem dan Tabanan, sedangkan PNSD tidak diisi oleh tiga kabupaten, yaitu Buleleng, Karangasem, dan Tabanan.

Tabel 4.1A (lanjutan)
Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Tambahan Penghasilan PNS								Retribusi	Jumlah
		Beban Kerja	Tmt Bertugas	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	TPP Objektif	TPPNS	PNS Guru	PNSD		
1	Kab. Badung	60,831,364,500	0	0	0	3,264,668,880	0	4,509,250,000	146,124,924,914	214,730,208,294	482,937,570,876
2	Kab. Bangli	11,088,420,000	0	0	0	6,597,360,000	0	476,125,000	70,094,513,000	88,256,418,000	240,084,075,000
3	Kab. Buleleng	31,167,271,768	0	0	0	0	0	739,750,000	0	31,907,021,768	630,811,554,589
4	Kab. Gianyar	3,617,600,000	0	0	0	0	0	2,489,750,000	183,038,446,920	189,145,796,920	420,691,354,310
5	Kab. Jembrana	14,125,470,000	0	0	0	0	0	1,329,750,000	82,302,348,640	97,757,568,640	253,016,558,845
6	Kab. Karangasem	40,841,080,558	0	0	0	0	126,346,490,930	0	0	167,187,571,488	460,838,878,084
7	Kab. Klungkung	16,518,324,000	0	0	0	10,866,240,000	0	2,216,403,000	99,856,849,404	129,457,816,404	296,125,033,905
8	Kab. Tabanan	14,317,950,000	0	0	189,134,236,675	0	0	0	0	203,452,186,675	512,362,715,710
9	Kota Denpasar	86,521,055,500	15,101,925,000	14,400,000	0	0	0	2,337,250,000	145,227,705,480	249,202,335,980	501,841,941,747
	Jumlah kab + kota	279,028,536,326	15,101,925,000	14,400,000	189,134,236,675	20,728,268,880	126,346,490,930	14,098,278,000	726,644,788,358	1,371,096,924,169	3,798,709,683,066
	Jumlah 8 kabupaten	192,507,480,826	0	0	189,134,236,675	20,728,268,880	126,346,490,930	11,761,028,000	581,417,082,878	1,121,894,588,189	3,296,867,741,319
	Jumlah kota	86,521,055,500	15,101,925,000	14,400,000	0	0	0	2,337,250,000	145,227,705,480	249,202,335,980	501,841,941,747

Berdasarkan data pada Tabel 4.1B, pada tahun 2015 gaji dan tunjangan untuk tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp2.421.657,7 juta dengan rincian terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp691,328,2 juta dan terkecil pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp92.296,0 juta. Tambahan penghasilan PNS untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp1.465.731,4 juta, terbesar pada Kota Denpasar sebesar Rp249.663,7 juta dan terkecil pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp33.187,1 juta. Retribusi hanya dialokasikan pada Kabupaten Badung dan Karangasem masing-masing sebesar Rp2.100 ribu dan Rp275 ribu, sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja lainnya. Dengan demikian, belanja tidak langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp3.887.391,5 juta dengan rincian semua kabupaten di Provinsi Bali sebesar Rp3.379.078,7 dan kota sebesar Rp508.312,8 juta.

Tabel 4.1B
Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Gaji dan Tunjangan											Subjumlah
		Gaji Pokok	Tunj. Keluarga	Tunj. Jabatan	Tunj. Fungsional	Tunj. Fung. Umum	Tunj. Beras	Tunj. PPH Khusus	Pembul. Gaji	Iuran Askes	Ang. Duka/Watir	Ang. Kematian	
1	Kab. Badung	219,657,776,445	20,384,458,771	447,386,875	19,872,208,166	2,099,582,826	10,124,932,078	6,106,943,213	5,833,253	6,994,793,783	651,000,000	759,500,000	301,427,085,210
2	Kab. Bangli	129,600,971,840	13,614,358,300	439,985,000	13,018,005,000	1,081,062,216	9,012,079,200	4,076,585,708	9,645,207	3,984,310,616	0	755,940,000	175,582,943,087
3	Kab. Buleleng	324,594,552,000	30,926,159,000	698,965,000	32,771,240,000	1,081,987,000	17,616,620,000	7,970,163,000	4,547,000	10,665,580,000	1,752,811,000	0	691,328,206,000
4	Kab. Gianyar	25,709,456,630	2,273,993,979	325,968,500	2,115,077,250	163,830,875	1,278,882,176	783,809,242	356,899	722,087,748	0	82,000,395,800	115,373,859,100
5	Kab. Jembrana	120,135,493,925	11,121,507,500	493,885,000	10,299,708,100	839,020,000	5,376,098,300	3,643,353,805	1,703,567	4,083,395,400	0	0	155,994,165,597
6	Kab. Karangasem	229,547,279,997	21,543,267,964	574,744,022	24,353,172,403	1,601,832,879	13,971,647,532	6,053,491,582	0	7,561,577,368	0	0	305,207,013,748
7	Kab. Klungkung	68,138,348,700	7,187,854,422	760,245,000	6,357,978,000	1,025,750,000	5,072,742,438	1,678,918,892	1,989,000	2,072,181,442	0	0	92,296,007,894
8	Kab. Tabanan	254,584,121,411	21,545,644,000	588,671,000	22,281,065,000	1,487,959,000	10,180,883,000	7,223,506,000	3,144,000	7,636,133,000	0	258,250,000	325,789,375,411
9	Kota Denpasar	199,408,784,600	17,158,558,300	467,311,000	16,942,039,400	1,041,885,000	10,245,888,000	5,701,910,500	3,173,300	6,512,623,000	518,610,300	648,261,900	258,649,045,300
	Jumlah kab + kota	1,567,376,785,548	145,755,802,237	4,797,161,397	148,010,493,319	10,422,909,796	82,881,771,724	43,238,681,942	30,392,226	50,232,682,357	2,922,421,300	2,421,951,900	2,421,657,701,347
	Jumlah 8 kab	1,367,968,000,948	128,597,243,937	4,329,850,397	131,068,453,919	9,381,024,796	72,635,883,724	37,536,771,442	27,218,926	43,720,059,357	2,403,811,000	1,773,690,000	2,163,008,656,047
	Jumlah kota	199,408,784,600	17,158,558,300	467,311,000	16,942,039,400	1,041,885,000	10,245,888,000	5,701,910,500	3,173,300	6,512,623,000	518,610,300	648,261,900	258,649,045,300

Tabel 4.1B (lanjutan)
Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tambahan Penghasilan PNS									Retribusi	Jumlah		
		Beban Kerja	Tempat Bertugas	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	TPP Objektif	TP sertipro PNS	PNS Guru	PNSD	UKesepPeg			Subjumlah	
1	Kab. Badung	78,739,193,200	0	0	0	5,300,481,120	0	1,210,000,000	149,491,399,000	0	234,741,073,320	2,100,000	536,170,258,530	
2	Kab. Bangli	33,731,607,000	0	0	0	0	0	1,362,570,000	83,755,488,000	0	118,849,665,000	0	294,442,608,087	
3	Kab. Buleleng	31,180,080,000	0	0	0	0	0	2,007,000,000	0	0	33,187,080,000	0	724,515,286,000	
4	Kab. Gianyar	3,657,600,000	0	0	0	0	0	1,464,000,000	179,160,148,000	0	184,281,748,000	0	299,655,607,100	
5	Kab. Jembrana	15,647,150,000	0	0	0	10,564,000,000	0	2,100,450,000	119,344,451,140	0	147,656,051,140	0	303,650,216,737	
6	Kab. Karangasem	38,127,720,000	0	0	0	0	157,337,223,000	0	0	0	195,464,943,000	275,000	500,672,231,748	
7	Kab. Klungkung	17,843,209,000	0	0	0	5,298,700,000	36,860,335,000	1,506,000,000	0	0	61,508,244,000	0	153,804,251,894	
8	Kab. Tabanan	20,718,200,000	0	0	0	219,660,653,810	0	0	0	0	240,378,853,810	0	566,168,229,221	
9	Kota Denpasar	30,765,125,000	14,605,590,000	16,200,000	0	0	0	1,615,450,000	202,611,560,490	49,800,000	249,663,725,490	0	508,312,770,790	
	Jumlah kab + kota	270,409,884,200	14,605,590,000	16,200,000	0	219,660,653,810	21,163,181,120	194,197,558,000	11,265,470,000	734,363,046,630	49,800,000	1,465,731,383,760	2,375,000	3,887,391,460,107
	Jumlah 8 kab	239,644,759,200	0	0	0	219,660,653,810	21,163,181,120	194,197,558,000	9,650,020,000	531,751,486,140	0	1,216,067,658,270	2,375,000	3,379,078,689,317
	Jumlah kota	30,765,125,000	14,605,590,000	16,200,000	0	0	0	1,615,450,000	202,611,560,490	49,800,000	249,663,725,490	0	508,312,770,790	

Catatan: TPP Objektif: tunjangan perbaikan penghasilan, TP sertipro PNS: tambahan penghasilan sertifikasi profesi PNS, PNSD guru PNS daerah, UKesepPeg: uang kesegjahteraan pegawai

Catatan: TPP Objektif: tunjangan perbaikan penghasilan, TP sertipro PNS: tambahan penghasilan sertifikasi profesi PNS, PNSD guru PNS daerah, UKesepPeg: uang kesejahteraan pegawai

Belanja tidak langsung untuk tambahan penghasilan PNS yang terisi seluruhnya hanyalah tambahan berdasarkan beban kerja, sedangkan berdasarkan tempat bertugas dan prestasi kerja hanya diisi oleh Kota Denpasar, berdasarkan kondisi kerja diisi oleh Kabupaten Tabanan, TPP objektif hanya diisi tiga kabupaten, yaitu Badung, Bangli, dan Klungkung TPPNS diisi Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Sebaliknya, PNS Guru tidak diisi oleh dua kabupaten, yaitu Karangasem dan Tabanan, sedangkan PNSD tidak diisi oleh empat kabupaten, yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan, sedangkan uang kesejahteraan pegawai hanya diisi oleh Kota Denpasar.

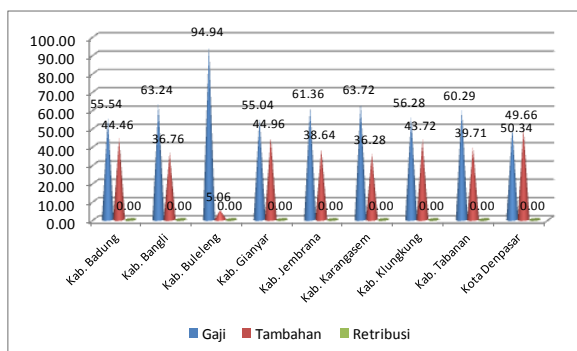
2. Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja

Alokasi yang lebih jelas tentang belanja tidak langsung pada tahun 2014 disajikan pada Tabel 4.2A. Pada tabel tersebut diketahui bahwa alokasi untuk retribusi hampir tidak ada artinya karena persentasenya sangat kecil (0,00%). Gaji dan tunjangan Provinsi Bali sebesar 63,91%, terbesar pada Kabupaten Buleleng mencapai 94,94% dan terkecil di Kota Denpasar sebesar 50,34%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka pada kabupaten sebesar 65,97% dan kota sebesar 50,34%. Dengan demikian, tambahan penghasilan sebesar 36,09% dengan terkecil pada Kabupaten Buleleng sebesar 5,06% dan terbesar pada Kota Denpasar sebesar 49,66%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka tambahan penghasilan pada kabupaten sebesar 34,03% lebih kecil daripada kota sebesar 49,66%. Oleh karena itu, perlu ada analisis tambahan tentang pegawai yang berada di masing-masing kabupaten/kota sehingga diketahui berapa rata-rata penerimaan pegawai dari belanja tidak langsung.

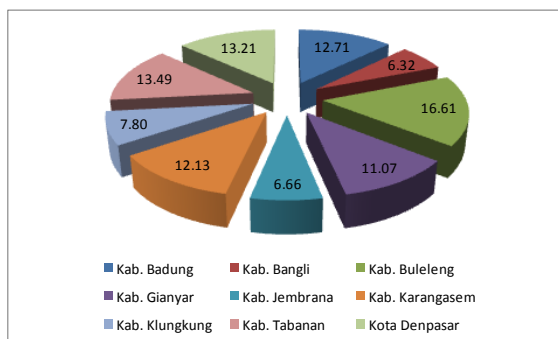
Tabel 4.2A
Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap
Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Gaji/Tunjangan	%	Tambahan	%	Retribusi	%	Jumlah	Porsi
1	Kab. Badung	268,205,262,582	55.54	214,730,208,294	44.46	2,100,000	0.00	482,937,570,876	12.71
2	Kab. Bangli	151,827,657,000	63.24	88,256,418,000	36.76	0	0.00	240,084,075,000	6.32
3	Kab. Buleleng	598,904,532,821	94.94	31,907,021,768	5.06	0	0.00	630,811,554,589	16.61
4	Kab. Gianyar	231,545,557,390	55.04	189,145,796,920	44.96	0	0.00	420,691,354,310	11.07
5	Kab. Jembrana	155,258,990,205	61.36	97,757,568,640	38.64	0	0.00	253,016,558,845	6.66
6	Kab. Karangasem	293,650,656,596	63.72	167,187,571,488	36.28	650,000	0.00	460,838,878,084	12.13
7	Kab. Klungkung	166,667,217,501	56.28	129,457,816,404	43.72	0	0.00	296,125,033,905	7.80
8	Kab. Tabanan	308,909,879,035	60.29	203,452,186,675	39.71	650,000	0.00	512,362,715,710	13.49
9	Kota Denpasar	252,639,605,767	50.34	249,202,335,980	49.66	0	0.00	501,841,941,747	13.21
	Jumlah kabupaten + kota	2,427,609,358,897	63.91	1,371,096,924,169	36.09	3,400,000	0.00	3,798,709,683,066	100.00
	Jumlah 8 kabupaten	2,174,969,753,130	65.97	1,121,894,588,189	34.03	3,400,000	0.00	3,296,867,741,319	
	Jumlah kota	252,639,605,767	50.34	249,202,335,980	49.66	0	0.00	501,841,941,747	

Grafik 4.1A
Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014



Grafik 4.2A
Porsi Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014



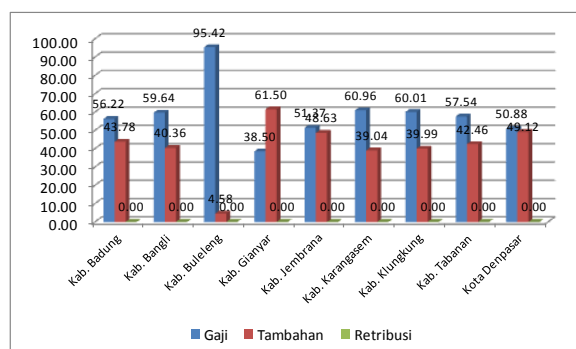
Selanjutnya, bila kabupaten/kota di Provinsi Bali dibandingkan maka belanja tidak langsung terbesar terjadi pada Kabupaten Buleleng sebesar 16,61%, diikuti

Kabupaten Tabanan sebesar 13,49% dan terkecil adalah kabupaten Bangli sebesar 6,32%. Kabupaten Buleleng memiliki belanja tidak langsung terbesar karena telah memasukkan gaji guru yang cukup besar (Rp184.875,9 juta), sedangkan Kabupaten Gianyar walaupun memasukkan gaji guru yang cukup besar (Rp197.404,6 juta) ternyata termasuk urutan keenam dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 4.2B
Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Gaji		Tambahan		Retribusi		Jumlah seluruhnya	Porsi
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Kab. Badung	301,427,085,210	56.22	234,741,073,320	43.78	2,100,000	0.00	536,170,258,530	13.79
2	Kab. Bangli	175,592,943,087	59.64	118,849,665,000	40.36	0	0.00	294,442,608,087	7.57
3	Kab. Buleleng	691,328,206,000	95.42	33,187,080,000	4.58	0	0.00	724,515,286,000	18.64
4	Kab. Gianyar	115,373,859,100	38.50	184,281,748,000	61.50	0	0.00	299,655,607,100	7.71
5	Kab. Jembrana	155,994,165,597	51.37	147,656,051,140	48.63	0	0.00	303,650,216,737	7.81
6	Kab. Karangasem	305,207,013,748	60.96	195,464,943,000	39.04	275,000	0.00	500,672,231,748	12.88
7	Kab. Klungkung	92,296,007,894	60.01	61,508,244,000	39.99	0	0.00	153,804,251,894	3.96
8	Kab. Tabanan	325,789,375,411	57.54	240,378,853,810	42.46	0	0.00	566,168,229,221	14.56
9	Kota Denpasar	258,649,045,300	50.88	249,663,725,490	49.12	0	0.00	508,312,770,790	13.08
	Jumlah kabupaten + kota	2,421,657,701,347	62.30	1,465,731,383,760	37.70	2,375,000	0.00	3,887,391,460,107	100.00
	Jumlah 8 kabupaten	2,163,008,656,047	64.01	1,216,067,658,270	35.99	2,375,000	0.00	3,379,078,689,317	
	Jumlah kota	258,649,045,300	50.88	249,663,725,490	49.12	0	0.00	508,312,770,790	

Grafik 4.3B
Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015

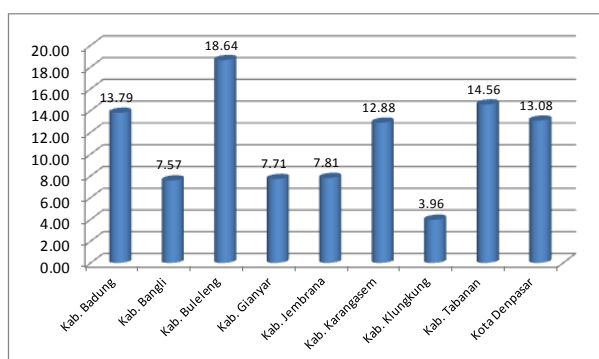


Alokasi yang lebih jelas tentang belanja tidak langsung pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 4.2B. Pada tabel tersebut diketahui bahwa alokasi untuk retribusi juga tidak ada artinya karena persentasenya sangat kecil (mendekati 0,00%). Gaji dan tunjangan Provinsi Bali sebesar 62,30%, terbesar pada Kabupaten Buleleng dan mencapai 95,42% dan terkecil di Kabupaten Gianyar sebesar 38,50%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka pada kabupaten sebesar 64,01% dan kota sebesar 50,88%. Dengan demikian, tambahan penghasilan sebesar 37,70% dengan terkecil pada Kabupaten Buleleng

sebesar 4,58% dan terbesar pada Kabupaten Gianyar sebesar 61,50%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka tambahan penghasilan pada kabupaten sebesar 35,99% lebih kecil daripada kota sebesar 49,12%.

Selanjutnya, bila kabupaten/kota di Provinsi Bali dibandingkan maka belanja tidak langsung terbesar terjadi pada Kabupaten Buleleng sebesar 18,64%, diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 14,56% dan terkecil adalah Kabupaten Klungkung sebesar 3,96%. Kabupaten Buleleng memiliki belanja tidak langsung terbesar karena telah memasukkan gaji guru yang cukup besar (Rp263.243,6 juta), Kabupaten Badung memiliki belanja tidak langsung tiga besar karena telah memasukkan gaji guru (Rp18.322,7 juta), sedangkan Kabupaten Gianyar walaupun memasukkan gaji guru yang cukup besar (Rp82.000,4 juta) ternyata termasuk urutan ketujuh dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Grafik 4.4B
Porsi Belanja Tidak Langsung Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015



3. Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja

Berdasarkan program dan tipe belanja pada tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.3A maka dari 16 program yang dikumpulkan hanya 2 program yang tidak diisi atau tidak ada di kabupaten/kota, yaitu program 10 pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK dan PLK) dan program 15 perguruan tinggi (PT). Program 7 wajar dikdas yang memiliki program dengan tipe belanja yang lengkap, yaitu pegawai, barang dan jasa, dan modal, demikian juga program 8 pendidikan menengah, program 11 mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), program 12 pelayanan pendidikan, dan program 13 kepemudaan dan olahraga. Program 3 disiplin aparatur hanya diisi oleh 4 kabupaten, program 4 kapasitas sumber daya hanya diisi oleh 2 kabupaten/kota, program 5 capaian kinerja dan keuangan diisi oleh 5 kabupaten, program 6 PAUD tidak diisi oleh Kabupaten Bangli, program 7 PNF tidak diisi oleh Kabupaten Gianyar, program 14 kebudayaan hanya diisi 3 kabupaten, dan program 16 lainnya hanya diisi oleh 3 kabupaten.

Tabel 4.3A
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	1. Pelayanan Adm Perkantoran				2. Sarana dan Prasarana Aparatur Neg				3. Disiplin Aparatur			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	16,712,152,000	4,063,632,460	18,161,000	20,793,945,460	0	1,297,011,442	5,727,637,298	7,024,648,740	0	2,408,165,250	0	2,408,165,250
2	Kab. Bangli	18,425,000	302,155,000	26,280,000	346,860,000	6,110,000	160,572,000	505,500,000	672,182,000	0	0	0	0
3	Kab. Buleleng	584,865,000	1,856,107,497	0	2,440,972,497	10,640,000	2,093,259,889	2,376,342,380	4,480,242,269	0	97,950,000	0	97,950,000
4	Kab. Gianyar	499,776,000	1,238,025,381	0	1,737,801,381	4,420,000	195,840,000	636,820,000	837,080,000	0	0	0	0
5	Kab. Jembrana	250,134,000	639,742,375	24,200,000	914,076,375	0	413,426,000	0	413,426,000	0	14,000,000	0	14,000,000
6	Kab. Karangasem	100,520,000	3,251,947,400	159,013,250	3,511,480,650	0	503,297,352	75,000,000	578,297,352	0	0	0	0
7	Kab. Klungkung	415,456,002	3,348,143,195	338,000,000	4,101,599,197	0	443,264,000	1,040,768,000	1,484,032,000	0	20,000,000	0	20,000,000
8	Kab. Tabanan	300,000,000	8,281,103,000	0	8,581,103,000	0	0	155,000,000	155,000,000	0	0	0	0
9	Kota Denpasar	271,156,000	5,722,780,000	0	5,993,936,000	0	1,807,736,146	96,250,000	1,903,986,146	0	0	0	0
	Jumlah kabupaten + kota	19,152,484,002	28,703,636,308	565,654,250	48,421,774,560	21,170,000	6,914,406,829	10,613,317,678	17,548,894,507	0	2,540,115,250	0	2,540,115,250
	Jumlah 8 kabupaten	18,881,328,002	22,980,856,308	565,654,250	42,427,838,560	21,170,000	5,106,670,683	10,517,067,678	15,644,908,361	0	2,540,115,250	0	2,540,115,250
	Jumlah kota	271,156,000	5,722,780,000	0	5,993,936,000	0	1,807,736,146	96,250,000	1,903,986,146	0	0	0	0

Program 1, pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp48.421,8 juta dengan rincian di 8 kabupaten sebesar Rp42.427,8 juta dan kota sebesar Rp5.993,9 juta. Program 1 terbesar pada Kabupaten Badung sebesar Rp20.793,9 juta dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar Rp346,9 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur negara sebesar Rp17.548,9 juta dengan rincian di 8 kabupaten sebesar Rp15.644,9 juta dan kota sebesar Rp1.904,0 juta. Program 3, disiplin aparatur sebesar Rp2.540,1 juta, hanya terdapat di 4 kabupaten.

Program 4, kapasitas sumber daya sebesar Rp242,7 juta dengan rincian di kabupaten Klungkung sebesar Rp116,5 juta dan kota Denpasar sebesar Rp126,2 juta. Program 5, capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp477,4 juta semuanya di 5 kabupaten. Program 6, PAUD sebesar Rp9.820,3 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp9.439,1 juta karena Kabupaten Bangli tak mengalokasikan PAUD dan Kota Denpasar sebesar Rp381,2 juta.

Program 7, wajib belajar pendidikan dasar sebesar Rp431.266,8 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp354.683,9 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp76.583,0 juta. Program 8, pendidikan menengah sebesar Rp132.568,8 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp115.553,2 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp17,105,6 juta. Program 9, pendidikan nonformal sebesar Rp5.053,1 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp4.246,7 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp806,4 juta. Program 10, PKLK tak ada di Provinsi Bali.

Program 11, mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp18.861,9 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp16.822,2 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp2,039,7 juta. Program 12, pelayanan pendidikan sebesar Rp13.859,1 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp9.251,1 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp4,608,0 juta. Program 13, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp37.398,1 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp31.008,3 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp6.389,8 juta.

Tabel 4.3A (lanjutan 1)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	4. Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu				6. PAUD			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	0	0	0	0	165,900,000	48,866,525	0	214,766,525	0	574,265,700	0	574,265,700
2	Kab. Bangli	0	0	0	0	925,000	14,075,000	0	15,000,000	0	0	0	0
3	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0	0	0	27,860,000	3,057,246,300	0	3,085,106,300
4	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0	0	0	88,470,000	1,107,440,700	0	1,195,910,700
5	Kab. Jembrana	0	0	0	0	51,264,000	2,917,000	0	54,181,000	144,000,000	268,750,500	431,500,000	844,250,500
6	Kab. Karangasem	0	0	0	0	98,850,000	20,283,800	36,800,000	155,933,800	44,855,000	1,653,919,250	0	1,698,774,250
7	Kab. Klungkung	1,890,000	98,734,800	15,855,000	116,479,800	0	0	0	0	760,000	1,764,989,000	0	1,765,749,000
8	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000	13,308,000	261,692,000	0	275,000,000
9	Kota Denpasar	0	126,204,000	0	126,204,000	0	0	0	0	0	365,694,150	15,500,560	381,194,710
	Jumlah kabupaten + kota	1,890,000	224,938,800	15,855,000	242,683,800	316,939,000	123,642,325	36,800,000	477,381,325	319,253,000	9,053,997,600	447,000,560	9,820,251,160
	Jumlah 8 kabupaten	1,890,000	98,734,800	15,855,000	116,479,800	316,939,000	123,642,325	36,800,000	477,381,325	319,253,000	8,688,303,450	431,500,000	9,439,056,450
	Jumlah kota	0	126,204,000	0	126,204,000	0	0	0	0	0	365,694,150	15,500,560	381,194,710

Tabel 4.3A (lanjutan 2)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	7. Wajar Dikdas 9 Tahun				8. Pendidikan Menengah				9. Pendidikan Nonformal			
		Pegawai	Brng dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brng dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brng dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	4,121,499,999	58,871,681,037	109,745,413,631	172,738,594,666	3,843,930,783	13,157,875,337	4,100,175,097	21,101,981,217	0	1,692,737,975	140,468,000	1,833,205,975
2	Kab. Bangli	51,146,500	9,414,191,842	4,563,736,000	14,029,074,342	100,903,600	804,624,400	5,286,552,394	6,192,080,394	6,580,000	8,420,000	0	15,000,000
3	Kab. Buleleng	130,060,000	4,151,855,320	45,661,202,653	49,943,117,973	160,400,000	6,172,320,694	17,641,774,000	23,974,494,694	16,540,000	427,461,500	0	444,001,500
4	Kab. Gianyar	420,995,000	8,683,348,290	17,399,187,560	26,503,530,850	246,845,000	2,486,272,182	5,773,669,725	8,506,786,907	0	0	0	0
5	Kab. Jembrana	143,462,500	2,094,180,434	15,067,813,994	17,305,456,928	1,356,550,000	6,962,464,257	8,431,964,900	16,750,979,157	0	376,740,900	123,950,000	500,690,900
6	Kab. Karangasem	249,353,250	2,971,763,919	13,557,006,130	16,778,123,299	200,020,000	3,403,890,362	12,543,210,012	16,147,120,374	52,365,000	636,216,200	0	688,581,200
7	Kab. Klungkung	505,190,000	2,290,287,600	17,407,703,081	20,203,180,681	342,294,000	2,230,441,500	7,829,325,841	10,402,061,341	31,060,000	548,611,950	20,524,000	600,195,950
8	Kab. Tabanan	480,138,000	9,133,028,150	27,569,625,050	37,182,791,200	205,520,000	9,613,821,504	2,658,353,500	12,477,695,004	14,170,000	150,830,000	0	165,000,000
9	Kota Denpasar	4,348,750,000	26,223,633,730	46,010,582,321	76,582,966,051	0	3,680,356,380	13,425,265,000	17,105,621,380	0	806,377,826	0	806,377,826
	Jumlah kabupaten + kota	10,450,595,249	123,833,970,322	296,982,270,420	431,266,835,990	6,456,463,383	48,512,066,616	77,690,290,469	132,658,820,468	120,715,000	4,647,396,351	284,942,000	5,053,053,351
	Jumlah 8 kabupaten	6,101,845,249	97,610,336,592	250,971,688,099	354,683,869,939	6,456,463,383	44,831,710,236	64,265,025,469	115,553,199,088	120,715,000	3,841,018,525	284,942,000	4,246,675,525
	Jumlah kota	4,348,750,000	26,223,633,730	46,010,582,321	76,582,966,051	0	3,680,356,380	13,425,265,000	17,105,621,380	0	806,377,826	0	806,377,826

Catatan: Program 10 PK dan PLK tidak ada yang mengisi sehingga dibuang

Program 14, kebudayaan sebesar Rp3.617,5 juta, dan hanya ada di Kabupaten Jembrana, Karangasem dan Tabanan. Program 15, tak ada di Provinsi Bali. Program 16, Lainnya sebesar Rp11.963,4 juta, dengan rincian 7 kabupaten sebesar Rp9.267,5 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp2,695,9 juta.

Berdasarkan data belanja langsung seluruhnya pada tahun 2014 sebesar Rp733.729,9 juta dengan 7 kabupaten sebesar Rp615.096,2 juta dan kota sebesar Rp118.637,7 juta. Dari dana sebesar itu maka dana untuk program 7 wajar dikdas menduduki porsi yang terbesar sebesar Rp431,266,8 juta, sedangkan program 3, program 5, dan program 14 menduduki porsi terkecil dan dalam persentase mendekati 0%.

Tabel 4.3A (lanjutan 3)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	11. Mutu P dan TK				12. Pelayanan Pendidikan				13. Kepemudaan dan Olahraga			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	1,939,448,000	2,696,161,230	0	4,635,609,230	194,700,000	96,077,750	0	290,777,750	0	6,123,950,395	150,435,000	6,274,385,395
2	Kab. Bangli	62,725,000	212,775,000	9,500,000	285,000,000	41,144,000	436,831,400	68,719,600	546,695,000	203,820,000	542,430,000	0	746,250,000
3	Kab. Buleleng	258,305,000	7,718,965,238	0	7,977,270,238	768,550,000	3,437,037,780	0	4,205,587,780	152,400,000	4,169,835,600	5,700,000,000	10,022,235,600
4	Kab. Gianyar	257,700,000	252,298,375	0	509,998,375	1,022,675,000	1,098,977,440	24,500,000	2,146,152,440	494,870,000	1,702,359,400	12,000,000	2,209,229,400
5	Kab. Jembrana	1,837,635,000	327,667,000	0	2,165,302,000	16,000,000	39,899,025	0	55,899,025	387,475,000	1,644,810,000	388,000,000	2,420,285,000
6	Kab. Karangasem	142,110,000	199,421,200	0	341,531,200	243,810,000	643,385,300	45,000,000	932,195,300	621,750,000	2,428,231,400	1,882,628,200	4,932,609,600
7	Kab. Klungkung	87,820,000	402,712,900	12,000,000	502,532,900	174,630,000	324,176,916	20,000,000	518,806,916	125,280,000	1,404,805,300	681,500,000	2,231,585,100
8	Kab. Tabanan	19,555,000	385,445,000	0	405,000,000	34,760,000	520,240,000	0	555,000,000	91,475,000	2,080,225,000	0	2,171,700,000
9	Kota Denpasar	0	1,999,675,000	40,000,000	2,039,675,000	5,640,000	4,207,362,730	395,000,000	4,608,002,730	53,500,000	6,316,345,275	20,000,000	6,389,845,275
	Jumlah kabupaten + kota	4,605,298,000	14,195,120,943	61,500,000	18,861,918,943	2,501,909,000	10,803,988,341	553,219,600	13,859,116,941	2,130,570,000	26,432,992,170	8,834,563,200	37,398,125,370
	Jumlah 8 kabupaten	4,605,298,000	12,195,445,943	21,500,000	16,822,243,943	2,496,269,000	6,596,625,611	158,219,600	9,251,114,211	2,077,070,000	20,116,646,895	8,814,563,200	31,008,280,095
	Jumlah kota	0	1,999,675,000	40,000,000	2,039,675,000	5,640,000	4,207,362,730	395,000,000	4,608,002,730	53,500,000	6,316,345,275	20,000,000	6,389,845,275

Tabel 4.3A (lanjutan 4)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	14. Kebudayaan				16. Lainnya				Jumlah			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	0	0	0	0	0	0	0	0	26,977,630,782	91,030,425,101	119,882,290,026	237,890,345,908
2	Kab. Bangli	0	0	0	0	8,611,420,000	96,100,000	0	8,707,520,000	9,103,199,100	11,992,174,642	10,460,287,994	31,555,661,736
3	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,620,000	33,182,039,818	71,379,319,033	106,670,978,851
4	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,751,000	16,764,561,768	23,846,177,285	43,646,490,053
5	Kab. Jembrana	42,850,000	3,295,641,750	27,000,000	3,365,491,750	0	0	0	0	4,229,370,500	16,080,239,241	24,494,428,894	44,804,038,635
6	Kab. Karangasem	10,080,000	26,920,000	0	37,000,000	0	0	0	0	1,763,713,250	15,739,276,183	28,298,657,592	45,801,647,025
7	Kab. Klungkung	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,380,002	12,896,166,961	27,365,675,922	41,946,222,885
8	Kab. Tabanan	14,180,000	200,820,000	0	215,000,000	46,275,000	513,725,000	0	560,000,000	1,219,381,000	31,178,429,654	30,382,978,550	62,780,789,204
9	Kota Denpasar	0	0	0	0	0	2,661,661,655	34,250,000	2,695,911,655	4,679,046,000	53,917,826,892	60,036,847,881	118,633,720,773
	Jumlah kabupaten + kota	67,110,000	3,523,381,750	27,000,000	3,617,491,750	8,657,695,000	3,271,486,655	34,250,000	11,963,431,655	54,802,091,634	282,781,140,260	396,146,663,177	733,729,895,070
	Jumlah 8 kabupaten	67,110,000	3,523,381,750	27,000,000	3,617,491,750	8,657,695,000	609,825,000	0	9,267,520,000	50,123,045,634	228,863,313,368	336,109,815,296	615,096,174,297
	Jumlah kota	0	0	0	0	0	2,661,661,655	34,250,000	2,695,911,655	4,679,046,000	53,917,826,892	60,036,847,881	118,633,720,773

Seperti halnya tahun 2014 maka berdasarkan program dan tipe belanja pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.3B, dari 16 program yang dikumpulkan hanya 2 program yang tidak diisi atau tidak ada di kabupaten/kota, yaitu program 10 PK dan PLK dan program 15 PT. Program 7 wajar dikdas yang memiliki program dengan tipe belanja yang lengkap, yaitu pegawai, barang dan jasa, dan modal. Program 2 sarana dan prasarana aparatur negara, program 6 PAUD, program 9 pendidikan nonformal, program 11 mutu pendidik dan tenaga kependidikan memiliki program barang dan jasa lengkap. Program 3 disiplin aparatur hanya diisi oleh 2 Kabupaten Badung dan Karangasem, program 4 kapasitas sumber daya hanya diisi oleh 3 Kabupaten Bangli, Klungkung dan kota Denpasar, program 5 capaian kinerja dan keuangan diisi oleh 5 kabupaten, program PK dan PLK hanya diisi oleh Kabupaten Karangasem, program 14 kebudayaan hanya di Kabupaten Jembrana, dan program 16 lainnya diisi oleh 4 kabupaten.

Tabel 4.3B
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	1. Pelayanan Adm Perkantoran				2. Sarana dan Prasarana Aparatur Neg				3. Disiplin Aparatur			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	14,221,187,000	6,632,693,800	0	20,853,880,800	0	1,188,036,625	302,995,000	1,491,031,625	0	75,000,000	0	75,000,000
2	Kab. Bangli	0	0	0	0	6,130,000	423,629,600	92,350,000	522,109,600	0	0	0	0
3	Kab. Buleleng	507,460,000	2,091,986,940	52,000,000	2,651,446,940	0	78,892,000	1,283,110,000	1,362,002,000	0	0	0	0
4	Kab. Gianyar	696,088,000	1,853,448,154	0	2,549,536,154	5,740,000	344,349,700	1,536,000,000	1,886,089,700	0	0	0	0
5	Kab. Jembrana	141,880,000	3,865,730,650	859,964,000	4,867,574,650	9,650,000	1,011,420,851	976,750,000	1,997,820,851	0	0	0	0
6	Kab. Karangasem	3,418,500,000	450,598,400	37,950,000	3,907,048,400	4,620,000	190,355,000	94,540,000	289,515,000	0	12,500,000	0	12,500,000
7	Kab. Klungkung	785,171,620	3,278,639,995	60,762,534	4,124,574,149	0	450,213,000	0	450,213,000	0	0	0	0
8	Kab. Tabanan	684,748,000	16,899,575,150	0	17,584,323,150	27,830,000	81,435,300	711,458,350	820,723,650	0	0	0	0
9	Kota Denpasar	143,500,000	7,244,480,000	0	7,387,980,000	0	1,518,271,000	798,500,000	2,316,771,000	0	0	0	0
	Jumlah kabupaten + kota	20,598,534,620	42,317,153,089	1,010,676,534	63,926,364,243	53,970,000	5,286,603,076	5,795,703,350	11,136,276,426	0	87,500,000	0	87,500,000
	Jumlah 8 kabupaten	20,455,034,620	35,072,673,089	1,010,676,534	56,538,384,243	53,970,000	3,768,332,076	4,997,203,350	8,819,505,426	0	87,500,000	0	87,500,000
	Jumlah kota	143,500,000	7,244,480,000	0	7,387,980,000	0	1,518,271,000	798,500,000	2,316,771,000	0	0	0	0

Catatan: Program PT dibuang karena tak ada yang mengisi

Program 1, pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp63.926,4 juta dengan rincian di 7 kabupaten sebesar Rp56.538,4 juta dan kota sebesar Rp7.388,0 juta. Program 1 terbesar pada Kabupaten Badung sebesar Rp20.853,9 juta dan terkecil pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp2.549,5 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur negara sebesar Rp11.136,3 juta dengan rincian di 8 kabupaten sebesar Rp8.819,5 juta dan kota sebesar Rp2.316,8 juta. Program 3, disiplin aparatur sebesar Rp87,5 juta, hanya terdapat di 2 Kabupaten Badung dan Karangasem.

Program 4, kapasitas sumber daya sebesar Rp462,6 juta dengan rincian di Kabupaten Bangli dan Klungkung sebesar Rp345,1 juta dan Rp42,6 juta serta kota sebesar Rp75,0 juta. Program 5, capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp11.904,6 juta semuanya di 5 kabupaten. Program 6, PAUD sebesar Rp16.091,0 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp15.417,9 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp673,2 juta.

Tabel 4.3B (lanjutan 1)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	4. Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu				6. PAUD			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	0	0	0	0	162,850,000	58,944,100	0	221,794,100	0	4,199,080,130	348,317,820	4,547,397,950
2	Kab. Bangli	62,600,000	282,490,000	0	345,090,000	11,249,814,400	0	0	11,249,814,400	1,500,000	50,500,000	0	52,000,000
3	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0	0	0	10,860,000	280,740,000	0	291,600,000
4	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0	0	0	38,140,000	813,941,700	0	852,081,700
5	Kab. Jembrana	0	0	0	0	98,310,000	67,965,600	0	166,275,600	55,005,000	2,344,707,660	598,285,000	2,997,997,660
6	Kab. Karangasem	0	0	0	0	18,750,000	45,500,000	0	64,250,000	756,935,000	2,397,197,900	636,860,000	3,790,992,900
7	Kab. Klungkung	6,060,000	36,446,900	0	42,506,900	0	0	0	0	4,350,000	2,516,460,000	0	2,520,810,000
8	Kab. Tabanan	0	0	0	0	23,070,000	179,430,000	0	202,500,000	26,400,000	338,600,000	0	365,000,000
9	Kota Denpasar	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	0	653,150,470	20,000,000	673,150,470
	Jumlah kabupaten + kota	68,660,000	393,936,900	0	462,596,900	11,552,794,400	351,839,700	0	11,904,634,100	893,190,000	13,594,377,860	1,603,462,820	16,091,030,680
	Jumlah 8 kabupaten	68,660,000	318,936,900	0	387,596,900	11,552,794,400	351,839,700	0	11,904,634,100	893,190,000	12,941,227,390	1,583,462,820	15,417,880,210
	Jumlah kota	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	0	653,150,470	20,000,000	673,150,470

Tabel 4.3B (lanjutan 2)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	7. Wajar Dikdas 9 Tahun				8. Pendidikan Menengah				9. Pendidikan Nonformal			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	477,084,500	162,940,432,378	41,516,746,874	204,934,263,752	1,405,250,000	12,346,848,003	891,222,212	14,643,320,215	0	1,987,110,800	695,162,342	2,682,273,142
2	Kab. Bangli	383,650,000	2,648,845,760	7,237,848,510	10,270,344,270	443,320,000	1,563,930,010	6,594,708,094	8,601,958,104	2,130,000	27,870,000	0	30,000,000
3	Kab. Buleleng	114,960,000	3,437,129,433	30,646,889,542	34,198,978,975	15,040,000	3,565,335,644	11,899,322,332	15,479,697,976	13,980,000	399,620,000	0	413,600,000
4	Kab. Gianyar	464,760,000	6,481,024,037	16,318,870,275	23,264,654,312	280,320,000	531,795,350	4,879,342,500	5,691,457,850	11,160,000	20,770,000	0	31,930,000
5	Kab. Jembrana	8,895,993,993	42,741,823,414	38,956,596,140	90,594,413,547	244,300,000	10,169,844,009	8,684,293,207	19,098,437,216	249,215,000	263,777,000	0	512,992,000
6	Kab. Karangasem	47,770,000	17,194,020,000	10,232,910,000	27,474,700,000	43,285,000	8,817,537,500	3,589,545,000	12,450,367,500	19,300,000	171,432,800	0	190,732,800
7	Kab. Klungkung	415,985,000	2,558,960,293	18,313,803,285	21,288,748,578	319,375,000	2,447,416,375	5,410,847,000	8,177,638,375	17,830,000	542,745,500	2,500,000	563,075,500
8	Kab. Tabanan	591,290,000	4,202,176,898	24,532,321,602	29,325,788,500	364,430,000	4,110,286,500	4,820,579,500	9,295,296,000	40,810,000	429,190,000	0	470,000,000
9	Kota Denpasar	4,277,050,000	12,899,413,800	45,896,063,621	63,072,527,421	0	3,764,849,690	6,415,602,045	10,180,451,735	0	1,239,432,526	64,500,000	1,303,932,526
Jumlah kabupaten + kota		15,668,543,493	255,103,826,013	233,652,049,849	504,424,419,355	3,115,320,000	47,317,843,081	53,185,461,890	103,618,624,971	354,425,000	5,081,948,626	762,162,342	6,198,535,968
Jumlah 8 kabupaten		11,391,493,493	242,204,412,213	187,755,986,228	441,351,891,934	3,115,320,000	43,552,993,391	46,769,859,845	93,438,173,236	354,425,000	3,842,516,100	697,662,342	4,894,603,442
Jumlah kota		4,277,050,000	12,899,413,800	45,896,063,621	63,072,527,421	0	3,764,849,690	6,415,602,045	10,180,451,735	0	1,239,432,526	64,500,000	1,303,932,526

Program 7, wajib belajar pendidikan dasar sebesar Rp504.424,4 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp441.351,9 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp63.072,5 juta. Program 8, pendidikan menengah sebesar Rp103.618,6 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp93.438,2 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp10.180,5 juta. Program 9, pendidikan nonformal sebesar Rp6.198,5 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp4.894,6 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp1.303,9 juta.

Program 10, PK dan PLK sebesar Rp594,8 juta hanya di Kabupaten Karangasem. Program 11, mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp32.907,5 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp31.327,7 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp1,579,8 juta. Program 12, pelayanan pendidikan sebesar Rp13.323,4 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp7.662,2 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp5,661,2 juta.

Tabel 4.3B (lanjutan 3)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	10. PK dan PLK				11. Mutu P dan TK				12. Pelayanan Pendidikan			
		Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg dan Jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	0	0	0	0	1,536,870,000	2,484,238,350	0	4,021,108,350	0	219,521,300	0	219,521,300
2	Kab. Bangli	0	0	0	0	2,665,424,080	190,413,720	0	2,855,837,800	30,310,000	264,174,000	7,016,000	301,500,000
3	Kab. Buleleng	0	0	0	0	252,730,000	10,297,129,160	0	10,549,859,160	152,210,000	2,231,962,788	0	2,384,172,788
4	Kab. Gianyar	0	0	0	0	1,480,585,000	401,081,260	7,500,000	1,889,166,260	398,880,000	640,102,700	0	1,038,982,700
5	Kab. Jembrana	0	0	0	0	271,210,000	469,674,500	22,500,000	763,384,500	222,580,000	1,044,301,598	30,000,000	1,296,881,598
6	Kab. Karangasem	27,800,000	567,000,000	0	594,800,000	8,389,850,000	1,620,094,500	0	10,009,944,500	69,450,000	852,550,000	0	922,000,000
7	Kab. Klungkung	0	0	0	0	62,930,000	656,867,375	0	719,797,375	37,968,375	376,402,787	0	414,371,162
8	Kab. Tabanan	0	0	0	0	39,900,000	478,700,000	0	518,600,000	60,655,000	1,024,145,000	0	1,084,800,000
9	Kota Denpasar	0	0	0	0	0	1,533,705,970	46,050,000	1,579,755,970	0	4,580,959,250	1,080,237,800	5,661,197,050
Jumlah kabupaten + kota		27,800,000	567,000,000	0	594,800,000	14,699,499,080	18,131,904,835	76,050,000	32,907,453,915	972,053,375	11,234,119,423	1,117,253,800	13,323,426,598
Jumlah 8 kabupaten		27,800,000	567,000,000	0	594,800,000	14,699,499,080	16,598,198,865	30,000,000	31,327,697,945	972,053,375	6,653,160,173	37,016,000	7,662,229,548
Jumlah kota		0	0	0	0	0	1,533,705,970	46,050,000	1,579,755,970	0	4,580,959,250	1,080,237,800	5,661,197,050

Tabel 4.3B (lanjutan 4)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	13. Kepemudaan dan Olahraga				14. Kebudayaan				16. Lainnya				Jumlah			
		Pegawai	Brng dan jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brng dan jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brng dan jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brng dan jasa	Modal	Jumlah
1	Kab. Badung	0	6.768.137,640	0	6.768.137,640	0	0	0	0	0	0	0	0	17.803.241,500	198.900,043,126	43.754.444,248	260.457.728,874
2	Kab. Bangli	179.435,000	821.565,000	0	1.001.000,000	0	0	0	0	4.450,000	95.550,000	0	100.000,000	15.028.763,480	6.368.968,090	13.931.922,604	35.329.654,174
3	Kab. Buleleng	75.900,000	4.810.571,300	13.434.900,000	18.321.371,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143,140,000	27.093.767,265	57.316.221,874	85.653.129,139
4	Kab. Giampr	602.010,000	1.990.490,500	14.448,500	2.606.949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.977.683,000	13.077.003,801	22.756.161,275	39.810.848,076
5	Kab. Jembrana	926.775,000	2.167.443,700	41.301,800	3.135.520,500	10.080,000	22.049,000	0	32.129,000	0	0	0	0	11.124.998,999	64.168.737,882	50.169.690,147	125.463.427,122
6	Kab. Karangasem	97.110,000	2.690.690,900	1.143.490,000	3.931.290,900	0	0	0	0	5.500,000	41.344,500	16.421.434,000	16.468.278,500	12.898.870,000	35.050.821,500	32.156.729,000	80.106.420,500
7	Kab. Klungkung	122.700,000	1.770.527,100	418.550,000	2.311.777,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.772.360,999	14.634.679,325	24.206.462,819	40.613.512,129
8	Kab. Tabanan	129.070,000	2.670.590,000	0	2.800,000,000	0	0	0	0	116.283,400	768.716,600	0	885,000,000	2.104.486,400	31.083.185,448	30.064.359,852	63.952.031,300
9	Kota Denpasar	537.700,000	6.857.924,115	30.000,000	7.425.624,115	0	0	0	0	0	2.193.446,155	0	2.193,446,155	4.958.250,000	42.560.632,976	54.350.953,466	101.869.836,442
	Jumlah Kabupaten + Kota	2.670.700,000	30.548.680,653	15.082.690,300	48.302.070,953	10.080,000	22.049,000	0	32.129,000	126.233,400	3.099,057,255	16.421.434,000	19.646,724,655	70.811.803,368	433.137.839,513	328.706.944,885	832.656.587,766
	Jumlah 8 kabupaten	2.133.000,000	23.690.756,540	15.053.690,300	40.876.446,840	10.080,000	22.049,000	0	32.129,000	126.233,400	905.611,100	16.421.434,000	17.453.278,500	65.853.553,368	390.577.206,537	274.355.991,419	730.786.751,324
	Jumlah kota	537.700,000	6.857.924,115	30.000,000	7.425.624,115	0	0	0	0	0	2.193.446,155	0	2.193,446,155	4.958.250,000	42.560.632,976	54.350.953,466	101.869.836,442

Program 13, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp48.302,1 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp40.876,4 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp7.425,1 juta. Program 14, kebudayaan sebesar Rp32.119,0 juta hanya di Kabupaten Jembrana. Program 15, tak ada di Provinsi Bali. Program 16, Lainnya sebesar Rp19.646,7 juta, dengan rincian 8 kabupaten sebesar Rp17.413,2 juta dan Kota Denpasar sebesar Rp2.191,2 juta.

Berdasarkan data belanja langsung menurut program pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.3B (lanjutan 4), jumlah seluruhnya adalah Rp832.656,6 juta. Dari dana sebesar itu maka dana untuk program 7 wajar dikdas menduduki porsi yang terbesar sebesar Rp504.424,4 juta, sedangkan program 3, program 5, program 10, dan program 14 menduduki porsi terkecil dan dalam persentase mendekati 0%.

4. Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja

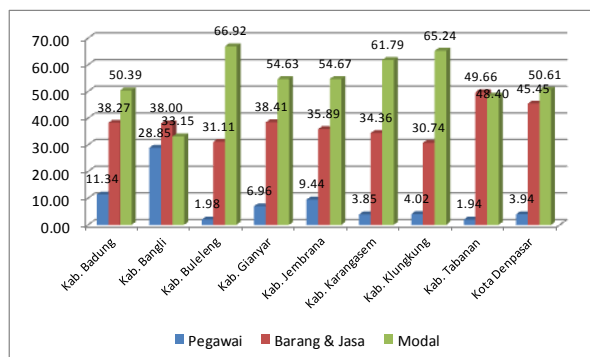
Berdasarkan Tabel 4.4A maka pada tahun 2014 belanja pegawai sebesar 7,47% dibandingkan dengan barang dan jasa sebesar 38,54% dan modal menduduki nilai terbesar sebesar 53,99%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka belanja pegawai kabupaten sebesar 8,15% lebih besar daripada kota sebesar 3,94%. Demikian juga belanja modal kabupaten sebesar 54,64% sedikit lebih besar daripada kota sebesar 50,61%. Sebaliknya, belanja barang dan jasa kabupaten sebesar 37,21% lebih kecil daripada kota sebesar 45,45%.

Alokasi belanja pegawai terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 28,85% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Tabanan sebesar 1,94%. Sebaliknya, alokasi barang dan jasa terbesar pada Kabupaten Tabanan sebesar 49,66% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Klungkung sebesar 30,74%. Alokasi belanja modal terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 66,92% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 33,15%.

Tabel 4.4A
Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Pegawai	%	Brg dan Jasa	%	Modal	%	Jumlah
1	Kab. Badung	26,977,630,782	11.34	91,030,425,101	38.27	119,882,290,026	50.39	237,890,345,908
2	Kab. Bangli	9,103,199,100	28.85	11,992,174,642	38.00	10,460,287,994	33.15	31,555,661,736
3	Kab. Buleleng	2,109,620,000	1.98	33,182,039,818	31.11	71,379,319,033	66.92	106,670,978,851
4	Kab. Gianyar	3,035,751,000	6.96	16,764,561,768	38.41	23,846,177,285	54.63	43,646,490,053
5	Kab. Jembrana	4,229,370,500	9.44	16,080,239,241	35.89	24,494,428,894	54.67	44,804,038,635
6	Kab. Karangasem	1,763,713,250	3.85	15,739,276,183	34.36	28,298,657,592	61.79	45,801,647,025
7	Kab. Klungkung	1,684,380,002	4.02	12,896,166,961	30.74	27,365,675,922	65.24	41,946,222,885
8	Kab. Tabanan	1,219,381,000	1.94	31,178,429,654	49.66	30,382,978,550	48.40	62,780,789,204
9	Kota Denpasar	4,679,046,000	3.94	53,917,826,892	45.45	60,036,847,881	50.61	118,633,720,773
	Jumlah kabupaten + kota	54,802,091,634	7.47	282,781,140,260	38.54	396,146,663,177	53.99	733,729,895,070
	Jumlah 8 kabupaten	50,123,045,634	8.15	228,863,313,368	37.21	336,109,815,296	54.64	615,096,174,297
	Jumlah kota	4,679,046,000	3.94	53,917,826,892	45.45	60,036,847,881	50.61	118,633,720,773

Grafik 4.5A
Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014



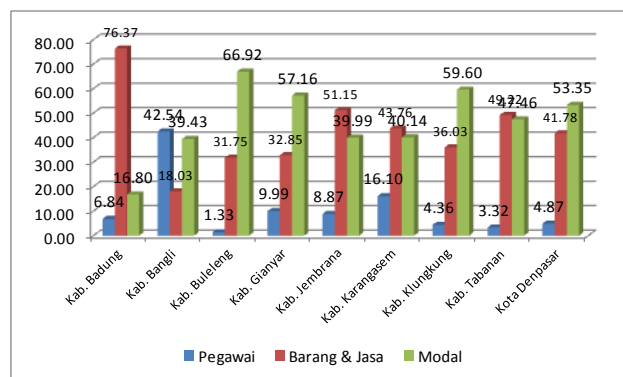
Berdasarkan Tabel 4.4B maka pada tahun 2015 belanja pegawai sebesar 8,50% dibandingkan dengan barang dan jasa sebesar 52,02% menduduki nilai terbesar, dan modal sebesar 39,48%. Bila dibandingkan antara kabupaten dan kota maka belanja pegawai kabupaten sebesar 9,01% lebih besar daripada kota sebesar 4,87%. Demikian juga belanja barang dan jasa kabupaten sebesar 53,45% lebih besar daripada kota sebesar 41,78%. Sebaliknya, belanja modal kabupaten sebesar 37,54% lebih kecil daripada kota sebesar 53,35%.

Alokasi belanja pegawai terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 42,54% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Buleleng sebesar 1,33%. Sebaliknya, alokasi barang dan jasa terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 76,37% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 18,03%. Alokasi belanja modal terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 66,92% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Badung sebesar 16,80%.

Tabel 4.4B
Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Pegawai		Barang dan Jasa		Modal		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Badung	17,803,241,500	6.84	198,900,043,126	76.37	43,754,444,248	16.80	260,457,728,874
2	Kab. Bangli	15,028,763,480	42.54	6,368,968,090	18.03	13,931,922,604	39.43	35,329,654,174
3	Kab. Buleleng	1,143,140,000	1.33	27,193,767,265	31.75	57,316,221,874	66.92	85,653,129,139
4	Kab. Gianyar	3,977,683,000	9.99	13,077,003,801	32.85	22,756,161,275	57.16	39,810,848,076
5	Kab. Jembrana	11,124,998,993	8.87	64,168,737,982	51.15	50,169,690,147	39.99	125,463,427,122
6	Kab. Karangasem	12,898,870,000	16.10	35,050,821,500	43.76	32,156,729,000	40.14	80,106,420,500
7	Kab. Klungkung	1,772,369,995	4.36	14,634,679,325	36.03	24,206,462,819	59.60	40,613,512,139
8	Kab. Tabanan	2,104,486,400	3.32	31,183,185,448	49.22	30,064,359,452	47.46	63,352,031,300
9	Kota Denpasar	4,958,250,000	4.87	42,560,632,976	41.78	54,350,953,466	53.35	101,869,836,442
	Jumlah kab + kota	70,811,803,368	8.50	433,137,839,513	52.02	328,706,944,885	39.48	832,656,587,766
	Jumlah 8 kabupaten	65,853,553,368	9.01	390,577,206,537	53.45	274,355,991,419	37.54	730,786,751,324
	Jumlah 1 kota	4,958,250,000	4.87	42,560,632,976	41.78	54,350,953,466	53.35	101,869,836,442

Grafik 4.5B
Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015



5. Belanja Langsung menurut Jenis Program

Berdasarkan Tabel 4.5A maka belanja langsung tahun 2014 hanya terdapat 14 program karena program 10 pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK dan PLK) dan program 15 perguruan tinggi (PT) tidak dialokasikan oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Alokasi terbesar pada program 7, wajib belajar pendidikan dasar sebesar Rp431.266,8 juta, program 8 pendidikan menengah sebesar Rp132.658,8 juta, sedangkan lima program lainnya masing-masing kurang dari Rp5.000,0 juta, yaitu program yang tidak terkait dengan pendidikan seperti disiplin aparatur, kapasitas sumber daya, capaian kinerja, pendidikan nonformal, dan kebudayaan sangat kecil.

Tabel 4.5A
Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	1. Adm Knt	2. SP Aparatur	3. Disiplin Ap	4. Kapasitas SD	5. Capaian Kinerja	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen
1	Kab. Badung	20,793,945,460	7,024,648,740	2,408,165,250	0	214,766,525	574,265,700	172,738,594,666	21,101,981,217
2	Kab. Bangli	346,860,000	672,182,000	0	0	15,000,000	0	14,029,074,342	6,192,080,394
3	Kab. Buleleng	2,440,972,497	4,480,242,269	97,950,000	0	0	3,085,106,300	49,943,117,973	23,974,494,694
4	Kab. Gianyar	1,737,801,381	837,080,000	0	0	0	1,195,910,700	26,503,530,850	8,506,786,907
5	Kab. Jembrana	914,076,375	413,426,000	14,000,000	0	54,181,000	844,250,500	17,305,456,928	16,750,979,157
6	Kab. Karangasem	3,511,480,650	578,297,352	0	0	155,933,800	1,698,774,250	16,778,123,299	16,147,120,374
7	Kab. Klungkung	4,101,599,197	1,484,032,000	20,000,000	116,479,800	0	1,765,749,000	20,203,180,681	10,402,061,341
8	Kab. Tabanan	8,581,103,000	155,000,000	0	0	37,500,000	275,000,000	37,182,791,200	12,477,695,004
9	Kota Denpasar	5,993,936,000	1,903,986,146	0	126,204,000	0	381,194,710	76,582,966,051	17,105,621,380
	Jumlah kabupaten + kota	48,421,774,560	17,548,894,507	2,540,115,250	242,683,800	477,381,325	9,820,251,160	431,266,835,990	132,658,820,468
	Jumlah 8 kabupaten	42,427,838,560	15,644,908,361	2,540,115,250	116,479,800	477,381,325	9,439,056,450	354,683,869,939	115,553,199,088
	Jumlah kota	5,993,936,000	1,903,986,146	0	126,204,000	0	381,194,710	76,582,966,051	17,105,621,380

Tabel 4.5A (lanjutan)
Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	9. PNF	11. Mutu PTK	12. Pelayanan Pend	13. Pemuda & OR	14. Kebud	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Badung	1,833,205,975	4,635,609,230	290,777,750	6,274,385,395	0	0	237,890,345,908
2	Kab. Bangli	15,000,000	285,000,000	546,695,000	746,250,000	0	8,707,520,000	31,555,661,736
3	Kab. Buleleng	444,001,500	7,977,270,238	4,205,587,780	10,022,235,600	0	0	106,670,978,851
4	Kab. Gianyar	0	509,998,375	2,146,152,440	2,209,229,400	0	0	43,646,490,053
5	Kab. Jembrana	500,690,900	2,165,302,000	55,899,025	2,420,285,000	3,365,491,750	0	44,804,038,635
6	Kab. Karangasem	688,581,200	341,531,200	932,195,300	4,932,609,600	37,000,000	0	45,801,647,025
7	Kab. Klungkung	600,195,950	502,532,900	518,806,916	2,231,585,100	0	0	41,946,222,885
8	Kab. Tabanan	165,000,000	405,000,000	555,000,000	2,171,700,000	215,000,000	560,000,000	62,780,789,204
9	Kota Denpasar	806,377,826	2,039,675,000	4,608,002,730	6,389,845,275	0	2,695,911,655	118,633,720,773
	Jumlah kabupaten + kota	5,053,053,351	18,861,918,943	13,859,116,941	37,398,125,370	3,617,491,750	11,963,431,655	733,729,895,070
	Jumlah 8 kabupaten	4,246,675,525	16,822,243,943	9,251,114,211	31,008,280,095	3,617,491,750	9,267,520,000	615,096,174,297
	Jumlah kota	806,377,826	2,039,675,000	4,608,002,730	6,389,845,275	0	2,695,911,655	118,633,720,773

Tabel 4.5B
Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	1. Adm Knt	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SD	5. Capaian Kinerja	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen
1	Kab. Badung	20,853,880,800	1,491,031,625	75,000,000	0	221,794,100	4,547,397,950	204,934,263,752	14,643,320,215
2	Kab. Bangli	0	522,109,600	0	345,090,000	11,249,814,400	52,000,000	10,270,344,270	8,601,958,104
3	Kab. Buleleng	2,651,446,940	1,362,002,000	0	0	0	291,600,000	34,198,978,975	15,479,697,976
4	Kab. Gianyar	2,549,536,154	1,886,089,700	0	0	0	852,081,700	23,264,654,312	5,691,457,850
5	Kab. Jembrana	4,867,574,650	1,997,820,851	0	0	166,275,600	2,997,997,660	90,594,413,547	19,098,437,216
6	Kab. Karangasem	3,907,048,400	289,515,000	12,500,000	0	64,250,000	3,790,992,900	27,474,700,000	12,450,367,500
7	Kab. Klungkung	4,124,574,149	450,213,000	0	42,506,900	0	2,520,810,000	21,288,748,578	8,177,638,375
8	Kab. Tabanan	17,584,323,150	820,723,650	0	0	202,500,000	365,000,000	29,325,788,500	9,295,296,000
9	Kota Denpasar	7,387,980,000	2,316,771,000	0	75,000,000	0	673,150,470	63,072,527,421	10,180,451,735
	Jumlah kabupaten + kota	63,926,364,243	11,136,276,426	87,500,000	462,596,900	11,904,634,100	16,091,030,680	504,424,419,355	103,618,624,971
	Jumlah 8 kabupaten	56,538,384,243	8,819,505,426	87,500,000	387,596,900	11,904,634,100	15,417,880,210	441,351,891,934	93,438,173,236
	Jumlah kota	7,387,980,000	2,316,771,000	0	75,000,000	0	673,150,470	63,072,527,421	10,180,451,735

Berdasarkan Tabel 4.5B maka belanja langsung tahun 2015 hanya terdapat 15 program karena program 15 PT tidak dialokasikan oleh semua

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Alokasi terbesar pada program 7, wajib belajar pendidikan dasar sebesar Rp504.424,4 juta, program 8 pendidikan menengah sebesar Rp103.641,6 juta, sedangkan PK dan PLK sebesar Rp594,8 juta, sedangkan program yang tidak terkait dengan pendidikan seperti disiplin aparatur, kapasitas sumber daya, capaian kinerja, dan kebudayaan sangat kecil.

Tabel 4.5B (lanjutan)
Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	9. PNF	10. PK & PLK	11. Mutu PTK	12. Pelayanan Pendidikan	13. Pemuda & OR	14. Kebud	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Badung	2,682,273,142	0	4,021,108,350	219,521,300	6,768,137,640	0	0	260,457,728,874
2	Kab. Bangli	30,000,000	0	2,855,837,800	301,500,000	1,001,000,000	0	100,000,000	35,329,654,174
3	Kab. Buleleng	413,600,000	0	10,549,859,160	2,384,172,788	18,321,771,300	0	0	85,653,129,139
4	Kab. Gianyar	31,930,000	0	1,889,166,260	1,038,982,700	2,606,949,400	0	0	39,810,848,076
5	Kab. Jembrana	512,992,000	0	763,384,500	1,296,881,598	3,135,520,500	32,129,000	0	125,463,427,122
6	Kab. Karangasem	190,732,800	594,800,000	10,009,944,500	922,000,000	3,931,290,900	0	16,468,278,500	80,106,420,500
7	Kab. Klungkung	563,075,500	0	719,797,375	414,371,162	2,311,777,100	0	0	40,613,512,139
8	Kab. Tabanan	470,000,000	0	518,600,000	1,084,800,000	2,800,000,000	0	885,000,000	63,352,031,300
9	Kota Denpasar	1,303,932,526	0	1,579,755,970	5,661,197,050	7,425,624,115	0	2,193,446,155	101,869,836,442
	Jumlah kabupaten + kota	6,198,535,968	594,800,000	32,907,453,915	13,323,426,598	48,302,070,955	32,129,000	19,646,724,655	832,656,587,766
	Jumlah 8 kabupaten	4,894,603,442	594,800,000	31,327,697,945	7,662,229,548	40,876,446,840	32,129,000	17,453,278,500	730,786,751,324
	Jumlah kota	1,303,932,526	0	1,579,755,970	5,661,197,050	7,425,624,115	0	2,193,446,155	101,869,836,442

6. Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program

Berdasarkan Tabel 4.6A di kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 mengalokasikan belanja terbesar pada program 7 wajar dikdas, terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 72,61% dan terkecil pada Kabupaten Karangasem sebesar 36,63%. Alokasi belanja untuk program 3, program 5, dan program 14 Provinsi Bali sangat kecil mendekati 0%. Alokasi belanja program 8 pendidikan menengah sebesar 18,08%, diikut program 13 kepemudaan dan olahraga sebesar 5,10%, program 1 administrasi kantor sebesar 6,60%, program 12 pelayanan pendidikan sebesar 1,89%, sedangkan program lainnya kurang dari 2%.

Tabel 4.6A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	1. Adm Knt	2. SP Aparat	3. Disip Ap	4. Kapas SD	5. Capai Kinerja	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen	9. PNF	11. Mutu PTK	12. Pelayanan Pendidikan	13. Pemuda & OR	14. Kebud	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Badung	8.74	2.95	1.01	0.00	0.09	0.24	72.61	8.87	0.77	1.95	0.12	2.64	0.00	0.00	100.00
2	Kab. Bangli	1.10	2.13	0.00	0.00	0.05	0.00	44.46	19.62	0.05	0.90	1.73	2.36	0.00	27.59	100.00
3	Kab. Buleleng	2.29	4.20	0.09	0.00	0.00	2.89	46.82	22.48	0.42	7.48	3.94	9.40	0.00	0.00	100.00
4	Kab. Gianyar	3.98	1.92	0.00	0.00	0.00	2.74	60.72	19.49	0.00	1.17	4.92	5.06	0.00	0.00	100.00
5	Kab. Jembrana	2.04	0.92	0.03	0.00	0.12	1.88	38.62	37.39	1.12	4.83	0.12	5.40	0.71	0.00	100.00
6	Kab. Karangasem	7.67	1.26	0.00	0.00	0.34	3.71	36.63	35.25	1.50	0.75	2.04	10.77	0.08	0.00	100.00
7	Kab. Klungkung	9.78	3.54	0.05	0.28	0.00	4.21	48.16	24.80	1.43	1.20	1.24	5.32	0.00	0.00	100.00
8	Kab. Tabanan	13.67	0.25	0.00	0.00	0.06	0.44	59.23	19.88	0.26	0.65	0.88	3.46	0.34	0.89	100.00
9	Kota Denpasar	5.05	1.60	0.00	0.11	0.00	0.32	64.55	14.42	0.68	1.72	3.88	5.39	0.00	2.27	100.00
	Jumlah kabupaten + kota	6.60	2.39	0.35	0.03	0.07	1.34	58.78	18.08	0.69	2.57	1.89	5.10	0.49	1.63	100.00
	Jumlah 8 kabupaten	6.90	2.54	0.41	0.02	0.08	1.53	57.66	18.79	0.69	2.73	1.50	5.04	0.59	1.51	100.00
	Jumlah kota	5.05	1.60	0.00	0.11	0.00	0.32	64.55	14.42	0.68	1.72	3.88	5.39	0.00	2.27	100.00

Dengan adanya program terbesar pada wajar dikdas yang hampir 60% dari belanja langsung yang ada menunjukkan bahwa pendidikan dasar masih merupakan program yang sangat penting sehingga dialokasikan sangat besar. Sebaliknya, PAUD sebesar 1,34% sebagai program paling mendasar pendidikan justru belum mendapatkan perhatian Provinsi Bali, demikian juga PNF hanya sebesar 0,69%.

Berdasarkan Tabel 4.6B maka di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2015 mengalokasikan belanja terbesar pada program 7 wajar dikdas, terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 78,68% dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 29,07%. Alokasi belanja untuk program 3, program 5, program 10, dan program 16 Provinsi Bali sangat kecil mendekati 0%. Alokasi belanja program 8 pendidikan menengah sebesar 12,44%, diikuti program 13 kepemudaan dan olahraga sebesar 5,80%, program 1 administrasi kantor sebesar 7,68%, program 12 pelayanan pendidikan sebesar 1,60%, sedangkan program lainnya kurang dari 2%.

Tabel 4.6B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	1. Adm Knt	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas	5. Capaian	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen	9. PNF	10. PK & PLK	11. Mutu PTK	12. Pelayanan	13. Pemuda & OR	14. Kebud	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Badung	8.01	0.57	0.03	0.00	0.09	1.75	78.68	5.62	1.03	0.00	1.54	0.08	2.60	0.00	0.00	100.00
2	Kab. Bangli	0.00	1.48	0.00	0.98	31.84	0.15	29.07	24.35	0.08	0.00	8.08	0.85	2.83	0.00	0.28	100.00
3	Kab. Buleleng	3.10	1.59	0.00	0.00	0.00	0.34	39.93	18.07	0.48	0.00	12.32	2.78	21.39	0.00	0.00	100.00
4	Kab. Gianyar	6.40	4.74	0.00	0.00	0.00	2.14	58.44	14.30	0.08	0.00	4.75	2.61	6.55	0.00	0.00	100.00
5	Kab. Jembrana	3.88	1.59	0.00	0.00	0.13	2.39	72.21	15.22	0.41	0.00	0.61	1.03	2.50	0.03	0.00	100.00
6	Kab. Karangasem	4.88	0.36	0.02	0.00	0.08	4.73	34.30	15.54	0.24	0.74	12.50	1.15	4.91	0.00	20.56	100.00
7	Kab. Klungkung	10.16	1.11	0.00	0.10	0.00	6.21	52.42	20.14	1.39	0.00	1.77	1.02	5.69	0.00	0.00	100.00
8	Kab. Tabanan	27.76	1.30	0.00	0.00	0.32	0.58	46.29	14.67	0.74	0.00	0.82	1.71	4.42	0.00	1.40	100.00
9	Kota Denpasar	7.25	2.27	0.00	0.07	0.00	0.66	61.91	9.99	1.28	0.00	1.55	5.56	7.29	0.00	2.15	100.00
	Jumlah kabupaten + kota	7.68	1.34	0.01	0.06	1.43	1.93	60.58	12.44	0.74	0.07	3.95	1.60	5.80	0.00	2.36	100.00
	Jumlah 8 kabupaten	7.74	1.21	0.01	0.05	1.63	2.11	60.39	12.79	0.67	0.08	4.29	1.05	5.59	0.00	2.39	100.00
	Jumlah kota	7.25	2.27	0.00	0.07	0.00	0.66	61.91	9.99	1.28	0.00	1.55	5.56	7.29	0.00	2.15	100.00

7. Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan

Bila belanja langsung pada tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.7A dilihat per program pendidikan maka wajar dikdas menduduki porsi tertinggi sebesar 58,78%, dikmen sebesar 18,08%, PAUD sebesar 1,34%, PNF sebesar 0,69%, institusi lain sebesar 4,46%, sedangkan program kepemudaan dan olahraga yang menjadi nama dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga di hampir semua kabupaten/kota hanya mendapat alokasi 5,10%, dan kebudayaan sebesar 0,49%. Belanja langsung untuk bukan institusi pendidikan sebesar 11,07% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 30,87% dan terkecil pada Kabupaten Jembrana sebesar 3,12%. PAUD sebesar 1,34% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Klungkung sebesar 4,21% dan terkecil pada Kabupaten Badung sebesar 0,24%. Wajar dikdas yang menduduki porsi terbesar sebesar 58,78% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 72,61% dan

terkecil pada Kabupaten Karangasem sebesar 36,63%. Pendidikan menengah sebesar 0,69% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Karangasem sebesar 1,50% dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 0,05% sedangkan Kabupaten Gianyar tidak mengalokasikan PNF. Institusi lain sebesar 4,46% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 11,42% dan terkecil pada Kabupaten Tabanan sebesar 1,53%. Program kebudayaan sebesar 0,49% hanya dialokasikan oleh tiga kabupaten, yaitu Jembrana, Karangasem, dan Tabanan.

Tabel 4.7A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Bkn Inst Pend		PAUD		Wajar Dikdas		Dikmen	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kab. Badung	30,441,525,975	12.80	574,265,700	0.24	172,738,594,666	72.61	21,101,981,217	8.87
2	Kab. Bangli	9,741,562,000	30.87	0	0.00	14,029,074,342	44.46	6,192,080,394	19.62
3	Kab. Buleleng	7,019,164,766	6.58	3,085,106,300	2.89	49,943,117,973	46.82	23,974,494,694	22.48
4	Kab. Gianyar	2,574,881,381	5.90	1,195,910,700	2.74	26,503,530,850	60.72	8,506,786,907	19.49
5	Kab. Jembrana	1,395,683,375	3.12	844,250,500	1.88	17,305,456,928	38.62	16,750,979,157	37.39
6	Kab. Karangasem	4,245,711,802	9.27	1,698,774,250	3.71	16,778,123,299	36.63	16,147,120,374	35.25
7	Kab. Klungkung	5,722,110,997	13.64	1,765,749,000	4.21	20,203,180,681	48.16	10,402,061,341	24.80
8	Kab. Tabanan	9,333,603,000	14.87	275,000,000	0.44	37,182,791,200	59.23	12,477,695,004	19.88
9	Kota Denpasar	10,720,037,801	9.04	381,194,710	0.32	76,582,966,051	64.55	17,105,621,380	14.42
	Jumlah kabupaten + kota	81,194,281,097	11.07	9,820,251,160	1.34	431,266,835,990	58.78	132,658,820,468	18.08
	Jumlah 8 kabupaten	70,474,243,296	11.46	9,439,056,450	1.53	354,683,869,939	57.66	115,553,199,088	18.79
	Jumlah kota	10,720,037,801	9.04	381,194,710	0.32	76,582,966,051	64.55	17,105,621,380	14.42

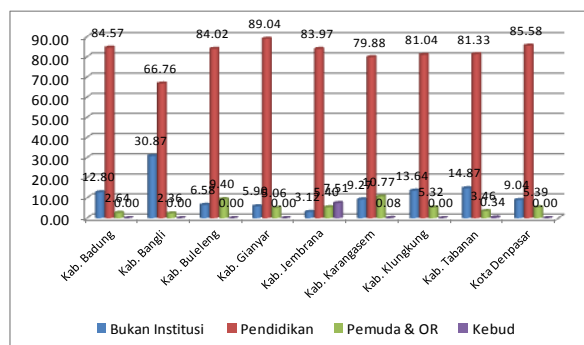
Tabel 4.7A (lanjutan)
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	PNF		Institusi Lain		Pemuda & OR		Kebudayaan	Jumlah seluruhnya
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	
1	Kab. Badung	1,833,205,975	0.77	4,926,386,980	2.07	6,274,385,395	2.64	0	237,890,345,908
2	Kab. Bangli	15,000,000	0.05	831,695,000	2.64	746,250,000	2.36	0	31,555,661,736
3	Kab. Buleleng	444,001,500	0.42	12,182,858,018	11.42	10,022,235,600	9.40	0	106,670,978,851
4	Kab. Gianyar	0	0.00	2,656,150,815	6.09	2,209,229,400	5.06	0	43,646,490,053
5	Kab. Jembrana	500,690,900	1.12	2,221,201,025	4.96	2,420,285,000	5.40	3,365,491,750	44,804,038,635
6	Kab. Karangasem	688,581,200	1.50	1,273,726,500	2.78	4,932,609,600	10.77	37,000,000	45,801,647,025
7	Kab. Klungkung	600,195,950	1.43	1,021,339,816	2.43	2,231,585,100	5.32	0	41,946,222,885
8	Kab. Tabanan	165,000,000	0.26	960,000,000	1.53	2,171,700,000	3.46	215,000,000	62,780,789,204
9	Kota Denpasar	806,377,826	0.68	6,647,677,730	5.60	6,389,845,275	5.39	0	118,633,720,773
	Jumlah kabupaten + kota	5,053,053,351	0.69	32,721,035,884	4.46	37,398,125,370	5.10	3,617,491,750	733,729,895,070
	Jumlah 8 kabupaten	4,246,675,525	0.69	26,073,358,154	4.24	31,008,280,095	5.04	3,617,491,750	615,096,174,297
	Jumlah kota	806,377,826	0.68	6,647,677,730	5.60	6,389,845,275	5.39	0	118,633,720,773

Bila belanja langsung pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.7B dilihat per program pendidikan maka wajar dikdas juga menduduki porsi tertinggi sebesar 60,58%, dikmen sebesar 12,44%, PAUD sebesar 1,93%, PNF sebesar 0,74%, institusi lain sebesar 5,62%, sedangkan program kepemudaan dan olahraga yang menjadi nama dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga hanya mendapat alokasi 5,80%, dan kebudayaan mendekati 0,00%. Belanja langsung

untuk bukan institusi pendidikan sebesar 12,87% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 34,58% dan terkecil pada Kabupaten Buleleng sebesar 4,69%.

Grafik 4.6A
Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014



Tabel 4.7B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

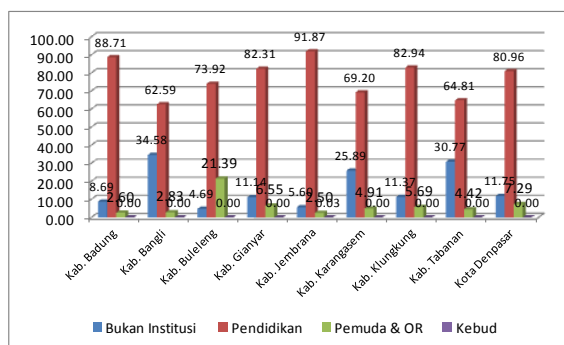
No.	Nama Kab/Kota	Bkn Inst Pend		PAUD		Wajar Dikdas		Dikmen	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kab. Badung	22,641,706,525	8.69	4,547,397,950	1.75	204,934,263,752	78.68	14,643,320,215	5.62
2	Kab. Bangli	12,217,014,000	34.58	52,000,000	0.15	10,270,344,270	29.07	8,601,958,104	24.35
3	Kab. Buleleng	4,013,448,940	4.69	291,600,000	0.34	34,198,978,975	39.93	15,479,697,976	18.07
4	Kab. Gianyar	4,435,625,854	11.14	852,081,700	2.14	23,264,654,312	58.44	5,691,457,850	14.30
5	Kab. Jembrana	7,031,671,101	5.61	2,997,997,660	2.39	90,594,413,547	72.23	19,098,437,216	15.23
6	Kab. Karangasem	20,741,591,900	25.89	3,790,992,900	4.73	27,474,700,000	34.30	12,450,367,500	15.54
7	Kab. Klungkung	4,617,294,049	11.37	2,520,810,000	6.21	21,288,748,578	52.42	8,177,638,375	20.14
8	Kab. Tabanan	19,492,546,800	30.77	365,000,000	0.58	29,325,788,500	46.29	9,295,296,000	14.67
9	Kota Denpasar	11,973,197,155	11.75	673,150,470	0.66	63,072,527,421	61.91	10,180,451,735	9.99
	Jumlah kab + kota	107,164,096,324	12.87	16,091,030,680	1.93	504,424,419,355	60.58	103,618,624,971	12.44
	Jumlah 8 kabupaten	95,190,899,169	13.03	15,417,880,210	2.11	441,351,891,934	60.40	93,438,173,236	12.79
	Jumlah 1 kota	11,973,197,155	11.75	673,150,470	0.66	63,072,527,421	61.91	10,180,451,735	9.99

PAUD sebesar 1,93% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Klungkung sebesar 6,21% dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 0,15%. Wajar dikdas yang menduduki porsi terbesar sebesar 60,58% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 78,68% dan terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar 29,07%. Pendidikan menengah sebesar 12,44% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 24,35% dan terkecil pada Kabupaten Badung sebesar 5,62%. Institusi lain sebesar 5,62% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 15,10% dan terkecil pada Kabupaten Jembrana sebesar 1,64%. Pemuda dan olahraga sebesar 5,80% dengan rincian terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 21,39% dan terkecil pada Kabupaten Jembrana sebesar 2,50%. Kebudayaan hanya dialokasikan oleh Kabupaten Jembrana sebesar 0,03% sangat kecil jika dibandingkan dengan program lainnya.

Tabel 4.7B (lanjutan)
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	PNF		Institusi Pend		Pemuda & OR		Kebudayaan		Jumlah seluruhnya
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Badung	2,682,273,142	1.03	4,240,629,650	1.63	6,768,137,640	2.60	0	0.00	260,457,728,874
2	Kab. Bangli	30,000,000	0.08	3,157,337,800	8.94	1,001,000,000	2.83	0	0.00	35,329,654,174
3	Kab. Buleleng	413,600,000	0.48	12,934,031,948	15.10	18,321,771,300	21.39	0	0.00	85,653,129,139
4	Kab. Gianyar	31,930,000	0.08	2,928,148,960	7.36	2,606,949,400	6.55	0	0.00	39,810,848,076
5	Kab. Jembrana	512,992,000	0.41	2,060,266,098	1.64	3,135,520,500	2.50	32,129,000	0.03	125,463,427,122
6	Kab. Karangasem	190,732,800	0.24	11,526,744,500	14.39	3,931,290,900	4.91	0	0.00	80,106,420,500
7	Kab. Klungkung	563,075,500	1.39	1,134,168,537	2.79	2,311,777,100	5.69	0	0.00	40,613,512,139
8	Kab. Tabanan	470,000,000	0.74	1,603,400,000	2.53	2,800,000,000	4.42	0	0.00	63,352,031,300
9	Kota Denpasar	1,303,932,526	1.28	7,240,953,020	7.11	7,425,624,115	7.29	0	0.00	101,869,836,442
	Jumlah kab + kota	6,198,535,968	0.74	46,825,680,513	5.62	48,302,070,955	5.80	32,129,000	0.00	832,656,587,766
	Jumlah 8 kabupaten	4,894,603,442	0.67	39,584,727,493	5.42	40,876,446,840	5.59	32,129,000	0.00	730,786,751,324
	Jumlah 1 kota	1,303,932,526	1.28	7,240,953,020	7.11	7,425,624,115	7.29	0	0.00	101,869,836,442

Grafik 4.6B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015



8. Persentase Belanja Tidak Langsung dan Langsung

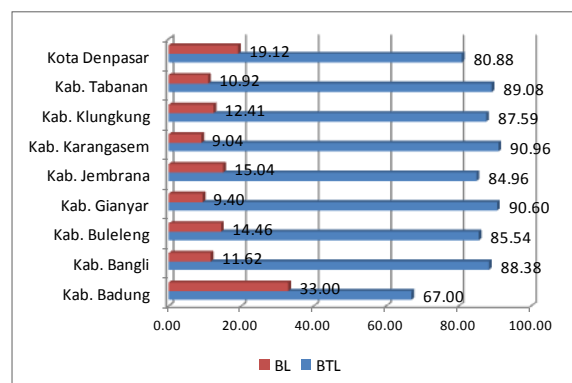
Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan langsung tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.8A maka belanja tidak langsung menduduki porsi sangat besar. Jumlah belanja tidak langsung Provinsi Bali sebesar Rp3.798.709,7 juta atau 83,81% dan jumlah belanja langsung sebesar Rp733.729,9 juta atau 16,19% sehingga jumlah belanja menjadi sebesar Rp4.532.439,6 juta. Bila dilihat secara kuantitas belanja tidak langsung di setiap kabupaten/kota, alokasi terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp630.811,6 juta dan alokasi terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar Rp240.084,1 juta. Bila dilihat dalam bentuk persentase maka Kabupaten Karangasem mengalokasikan belanja tidak langsung yang terbesar sebesar 90,96% dan Kabupaten Badung mengalokasikan yang terkecil sebesar 67,00%. Kabupaten mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar 84,28% lebih besar daripada kota sebesar 80,88% sehingga terjadi perbedaan wilayah -3,40%. Bila dilihat secara kuantitas belanja langsung di setiap

kabupaten/kota, alokasi terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp237.890,3 juta dan alokasi terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar Rp31.555,7 juta. Bila dilihat dalam bentuk persentase maka belanja langsung sebesar 16,19% dengan Kabupaten Buleleng mengalokasikan yang terbesar sebesar 33,00% dan Kabupaten Karangasem mengalokasikan yang terkecil sebesar 9,04%. Rata-rata Kabupaten mengalokasikan belanja langsung sebesar 15,72% lebih kecil daripada kota sebesar 19,12% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 3,40%.

Tabel 4.8A
Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
		Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	Kab. Badung	482,937,570,876	67.00	237,890,345,908	33.00	720,827,916,784
2	Kab. Bangli	240,084,075,000	88.38	31,555,661,736	11.62	271,639,736,736
3	Kab. Buleleng	630,811,554,589	85.54	106,670,978,851	14.46	737,482,533,440
4	Kab. Gianyar	420,691,354,310	90.60	43,646,490,053	9.40	464,337,844,363
5	Kab. Jembrana	253,016,558,845	84.96	44,804,038,635	15.04	297,820,597,480
6	Kab. Karangasem	460,838,878,084	90.96	45,801,647,025	9.04	506,640,525,109
7	Kab. Klungkung	296,125,033,905	87.59	41,946,222,885	12.41	338,071,256,790
8	Kab. Tabanan	512,362,715,710	89.08	62,780,789,204	10.92	575,143,504,914
9	Kota Denpasar	501,841,941,747	80.88	118,633,720,773	19.12	620,475,662,520
	Jumlah kab + kota	3,798,709,683,066	83.81	733,729,895,070	16.19	4,532,439,578,136
	Jumlah 8 kabupaten	3,296,867,741,319	84.28	615,096,174,297	15.72	3,911,963,915,616
	Jumlah kota	501,841,941,747	80.88	118,633,720,773	19.12	620,475,662,520
	Perbedaan wilayah		-3.40		3.40	

Grafik 4.7A
Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014



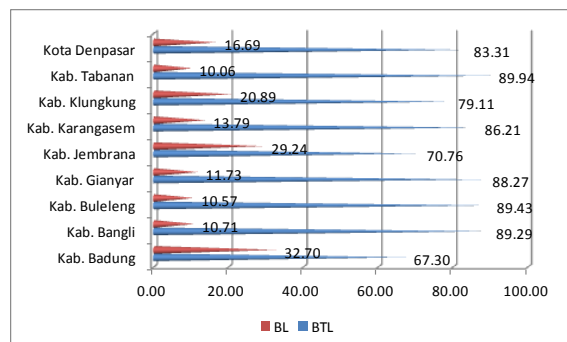
Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan langsung tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.8B maka belanja tidak langsung menduduki porsi sangat besar. Jumlah belanja tidak langsung Provinsi Bali sebesar Rp3.887.391,5 juta atau 82,36% dan jumlah belanja langsung sebesar Rp832.656,6 juta atau 17,64% sehingga jumlah belanja menjadi sebesar Rp4.720.048,0 juta. Bila dilihat

secara kuantitas belanja tidak langsung di setiap kabupaten/kota, alokasi terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp724.515,3 juta atau 89,43% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp153.804,3 juta atau 79,11%. Kabupaten mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar 82,22% lebih kecil daripada kota sebesar 83,31% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 1,09%.

Tabel 4.8B
Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
		Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	Kab. Badung	536,170,258,530	67.30	260,457,728,874	32.70	796,627,987,404
2	Kab. Bangli	294,442,608,087	89.29	35,329,654,174	10.71	329,772,262,261
3	Kab. Buleleng	724,515,286,000	89.43	85,653,129,139	10.57	810,168,415,139
4	Kab. Gianyar	299,655,607,100	88.27	39,810,848,076	11.73	339,466,455,176
5	Kab. Jembrana	303,650,216,737	70.76	125,463,427,122	29.24	429,113,643,859
6	Kab. Karangasem	500,672,231,748	86.21	80,106,420,500	13.79	580,778,652,248
7	Kab. Klungkung	153,804,251,894	79.11	40,613,512,139	20.89	194,417,764,033
8	Kab. Tabanan	566,168,229,221	89.94	63,352,031,300	10.06	629,520,260,521
9	Kota Denpasar	508,312,770,790	83.31	101,869,836,442	16.69	610,182,607,232
	Jumlah kabupaten + kota	3,887,391,460,107	82.36	832,656,587,766	17.64	4,720,048,047,873
	Jumlah 8 kabupaten	3,379,078,689,317	82.22	730,786,751,324	17.78	4,109,865,440,641
	Jumlah kota	508,312,770,790	83.31	101,869,836,442	16.69	610,182,607,232
	Perbedaan wilayah		1.09		-1.09	

Grafik 4.7B
Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015



Bila dilihat secara kuantitas belanja langsung di setiap kabupaten/kota, alokasi terbesar pada Kabupaten Badung sebesar Rp260.457,7 juta atau 32,870% dan alokasi terkecil pada Kabupaten Bangli sebesar Rp35.329,7 juta atau 10,71%. Kabupaten mengalokasikan belanja langsung sebesar 17,78% lebih besar daripada kota sebesar 16,69% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 1,09%.

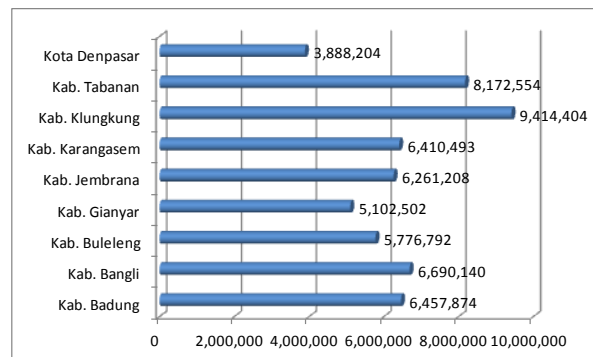
9. Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen

Belanja pendidikan di Provinsi Bali tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.9A sebesar Rp4.532.439,6 juta digunakan untuk institusi bukan pendidikan, institusi pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.

Tabel 4.9A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan	Tahun 2013/2014					Rasio
			SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	
1	Kab. Badung	720,827,916,784	59,839	28,097	10,396	13,288	111,620	6,457,874
2	Kab. Bangli	271,639,736,736	22,766	10,874	3,344	3,619	40,603	6,690,140
3	Kab. Buleleng	737,482,533,440	71,279	32,272	13,494	10,618	127,663	5,776,792
4	Kab. Gianyar	464,337,844,363	47,474	22,009	7,582	13,937	91,002	5,102,502
5	Kab. Jembrana	297,820,597,480	25,500	12,052	5,401	4,613	47,566	6,261,208
6	Kab. Karang Asem	506,640,525,109	46,854	19,757	7,865	4,557	79,033	6,410,493
7	Kab. Klungkung	338,071,256,790	18,083	9,162	5,279	3,386	35,910	9,414,404
8	Kab. Tabanan	575,143,504,914	38,358	18,751	7,256	6,010	70,375	8,172,554
9	Kota Denpasar	620,475,662,520	84,512	36,086	18,174	20,807	159,579	3,888,204
	Jumlah Kab+Kota	4,532,439,578,136	414,665	189,060	78,791	80,835	763,351	5,937,556
	Jumlah 8 kabupaten	3,911,963,915,616	330,153	152,974	60,617	60,028	603,772	6,479,207
	Jumlah kota	620,475,662,520	84,512	36,086	18,174	20,807	159,579	3,888,204
	Perbedaan wilayah							(2,591,004)

Grafik 4.8A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, 2014



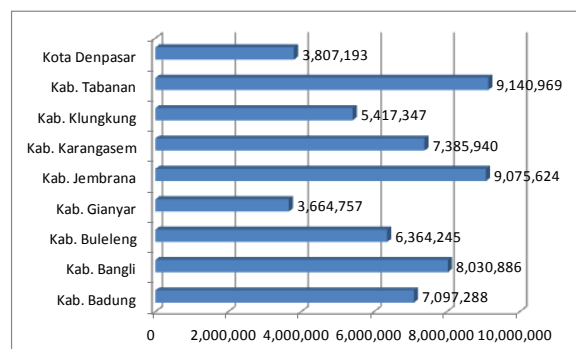
Oleh karena peserta didik PAUD dan PNF per kabupaten/kota tidak diperoleh datanya maka digunakan data siswa dikdasmen. Berdasarkan pada Tabel 4.9A, Kabupaten Buleleng dan Gianyar telah memasukkan gaji guru, namun rasio belanja pendidikan terhadap dikdasmen masing-masing sebesar Rp5.776,9 ribu dan Rp5.102,5 ribu lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang tidak memasukkan gaji guru. Rasio Provinsi Bali sebesar Rp5.937,6 ribu, terbesar terjadi di Kabupaten Klungkung sebesar Rp9.414,4 ribu dan terkecil terjadi di Kabupaten Gianyar sebesar Rp5.102,5 ribu, sedangkan rata-rata

kabupaten sebesar Rp6.479,2 ribu dan kota sebesar Rp3.888,2 ribu sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar Rp2.591,0 ribu.

Tabel 4.9B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan	Tahun 2013/2014					Rasio
			SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	
1	Kab. Badung	796,627,987,404	59,793	29,070	10,806	12,575	112,244	7,097,288
2	Kab. Bangli	329,772,262,261	23,158	10,672	3,531	3,702	41,063	8,030,886
3	Kab. Buleleng	810,168,415,139	69,362	32,729	14,298	10,911	127,300	6,364,245
4	Kab. Gianyar	339,466,455,176	47,512	23,033	7,702	14,383	92,630	3,664,757
5	Kab. Jembrana	429,113,643,859	25,044	11,971	5,425	4,842	47,282	9,075,624
6	Kab. Karang Asem	580,778,652,248	45,442	20,160	7,934	5,097	78,633	7,385,940
7	Kab. Klungkung	194,417,764,033	17,706	9,495	5,164	3,523	35,888	5,417,347
8	Kab. Tabanan	629,520,260,521	37,212	19,056	7,583	5,017	68,868	9,140,969
9	Kota Denpasar	610,182,607,232	85,167	37,730	16,702	20,672	160,271	3,807,193
	Jumlah Kab+Kota	4,720,048,047,873	410,396	193,916	79,145	80,722	764,179	6,176,626
	Jumlah 8 kab	4,109,865,440,641	325,229	156,186	62,443	60,050	603,908	6,805,450
	Jumlah 1 kota	610,182,607,232	85,167	37,730	16,702	20,672	160,271	3,807,193
	Perbedaan wilayah							(2,998,257)

Grafik 4.8B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, 2015



Belanja pendidikan di Provinsi Bali tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.9B sebesar Rp4.720.048,0 juta digunakan untuk institusi bukan pendidikan, institusi pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan. Oleh karena PAUD dan PNF per kabupaten/kota tidak diperoleh datanya maka digunakan data siswa dikdasmen. Berdasarkan pada Tabel 4.9B, Kabupaten Badung, Buleleng dan Gianyar telah memasukkan gaji guru, namun rasio belanja pendidikan terhadap dikdasmen masing-masing sebesar Rp7.097,3 ribu, Rp6.364,8 ribu, dan Rp3.664,8 ribu lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang tidak memasukkan gaji guru. Rasio Provinsi Bali sebesar Rp6.176,6 ribu, terbesar terjadi di Kabupaten Tabanan sebesar Rp9.141,0 ribu dan terkecil terjadi di Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.664,8 ribu, sedangkan rata-rata kabupaten

sebesar Rp6.805,5 ribu dan kota sebesar Rp3.807,2 ribu. Dalam hal rasio belanja pendidikan maka terjadi perbedaan wilayah sebesar Rp2.998,3 ribu lebih kecil kota daripada kabupaten.

10. Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD

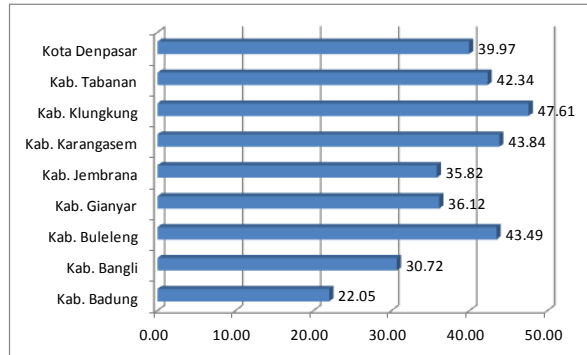
APBD berdasarkan fungsi di Provinsi Bali pada tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.10A sebesar Rp12.743.137,7 juta dengan rincian terbesar pada Kabupaten Badung sebesar Rp3.269.667,2 juta dan terkecil pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp710.072,0 juta. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 35,57%, tertinggi pada Kabupaten Klungkung sebesar 47,61% dan terkecil pada Kabupaten Badung sebesar 22,05%. Persentase rata-rata kabupaten sebesar 34,96% lebih kecil daripada kota sebesar 39,97%, sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 5,02% lebih baik kota daripada kabupaten.

Tabel 4.10A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan	APBD	%
1	Kab. Badung	720,827,916,784	3,269,667,228,515	22.05
2	Kab. Bangli	271,639,736,736	884,350,976,726	30.72
3	Kab. Buleleng	737,482,533,440	1,695,941,962,368	43.49
4	Kab. Gianyar	464,337,844,363	1,285,370,082,601	36.12
5	Kab. Jembrana	297,820,597,480	831,345,012,786	35.82
6	Kab. Karangasem	506,640,525,109	1,155,747,491,172	43.84
7	Kab. Klungkung	338,071,256,790	710,072,006,777	47.61
8	Kab. Tabanan	575,143,504,914	1,358,421,516,900	42.34
9	Kota Denpasar	620,475,662,520	1,552,221,463,244	39.97
	Jumlah kab + kota	4,532,439,578,136	12,743,137,741,089	35.57
	Jumlah 8 kabupaten	3,911,963,915,616	11,190,916,277,845	34.96
	Jumlah kota	620,475,662,520	1,552,221,463,244	39.97
	Perbedaan wilayah			5.02

APBD berdasarkan fungsi di Provinsi Bali pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.10B sebesar Rp13.936.249,2 juta dengan rincian terbesar pada Kabupaten Badung sebesar Rp3.527.203,2 juta dan terkecil pada Kabupaten Jembrana sebesar Rp875.100,0 juta. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 33,87%, tertinggi pada Kabupaten Jembrana sebesar 49,04% dan terkecil pada Kabupaten Klungkung sebesar 21,30%. Persentase rata-rata kabupaten ternyata sebesar 33,75% lebih kecil daripada kota sebesar 34,66% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 0,90%.

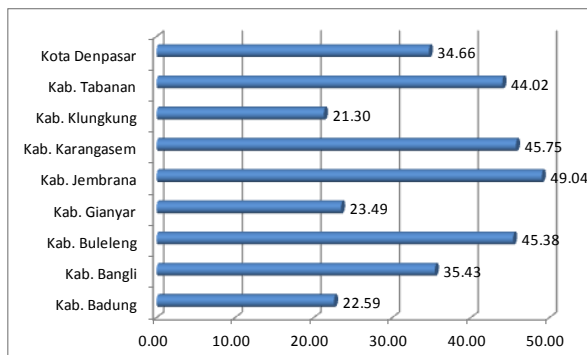
Grafik 4.9A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014



Tabel 4.10B
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota
Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan	APBD	%
1	Kab. Badung	796,627,987,404	3,527,203,219,418	22.59
2	Kab. Bangli	329,772,262,261	930,895,764,975	35.43
3	Kab. Buleleng	810,168,415,139	1,785,202,065,650	45.38
4	Kab. Gianyar	339,466,455,176	1,445,120,498,816	23.49
5	Kab. Jembrana	429,113,643,859	875,100,013,459	49.04
6	Kab. Karangasem	580,778,652,248	1,269,495,869,214	45.75
7	Kab. Klungkung	194,417,764,033	912,707,523,258	21.30
8	Kab. Tabanan	629,520,260,521	1,429,917,386,211	44.02
9	Kota Denpasar	610,182,607,232	1,760,606,869,553	34.66
	Jumlah kab + kota	4,720,048,047,873	13,936,249,210,554	33.87
	Jumlah 8 kabupaten	4,109,865,440,641	12,175,642,341,001	33.75
	Jumlah 1 kota	610,182,607,232	1,760,606,869,553	34.66
	Perbedaan wilayah			0.90

Grafik 4.9B
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015



C. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali

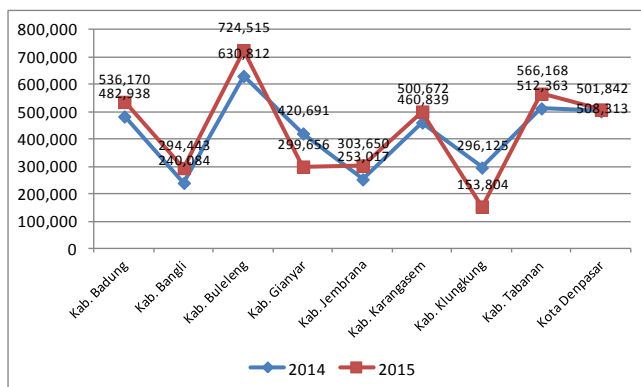
Analisis perkembangan keuangan hanya dipilih yang menarik, sehingga analisis ini hanya terdiri dari 6 jenis indikator keuangan, yaitu persentase belanja tidak langsung menurut jenis belanja, persentase belanja langsung menurut jenis belanja, persentase belanja langsung menurut institusi pendidikan dan lainnya, persentase belanja tidak langsung dan langsung, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap APBD. Perkembangan selama 2 tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebenarnya belum bisa melihat kenaikan atau penurunan dana yang signifikan. Namun, karena yang tersedia hanya data selama 2 tahun maka diberikan deskripsinya.

Tabel 4.11
Perkembangan Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015

No.	Nama Kab/Kota	Gaji dan Tunjangan			Tambahan Penghasilan			Retribusi			Jumlah		
		2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	268,205,262,582	301,427,085,210	12.39	214,730,208,294	234,741,073,320	9.32	2,100,000	2,100,000	0.00	482,937,570,876	536,170,258,530	11.02
2	Kab. Bangli	151,827,657,000	175,592,943,087	15.65	88,256,418,000	118,849,665,000	34.66	0	0	-	240,084,075,000	294,442,608,087	22.64
3	Kab. Buleleng	598,904,532,821	691,328,206,000	15.43	31,907,021,768	33,187,080,000	4.01	0	0	-	630,811,554,589	724,515,286,000	14.85
4	Kab. Gianyar	231,545,557,390	115,373,859,100	-50.17	189,145,796,920	184,281,748,000	-2.57	0	0	-	420,691,354,310	299,655,607,100	-28.77
5	Kab. Jembrana	155,258,990,205	155,994,165,597	0.47	97,757,568,640	147,656,051,140	51.04	0	0	-	253,016,558,845	303,650,216,737	20.01
6	Kab. Karangasem	293,650,656,596	305,207,013,748	3.94	167,187,571,488	195,464,943,000	16.91	650,000	275,000	-57.69	460,838,878,084	500,672,231,748	8.64
7	Kab. Klungkung	166,667,217,501	92,296,007,894	-44.62	129,457,816,404	61,508,244,000	-52.49	0	0	-	296,125,033,905	153,804,251,894	-48.06
8	Kab. Tabanan	308,909,879,035	325,789,375,411	5.46	203,452,186,675	240,378,853,810	18.15	650,000	0	-	512,362,715,710	566,168,229,221	10.50
9	Kota Denpasar	252,639,605,767	258,649,045,300	2.38	249,202,335,980	249,663,725,490	0.19	0	0	-	501,841,941,747	508,312,770,790	1.29
	Jumlah kab + kota	2,427,609,358,897	2,421,657,701,347	-0.25	1,371,096,924,169	1,465,731,383,760	6.90	3,400,000	2,375,000	-30.15	3,798,709,883,066	3,887,391,460,107	2.33
	Jumlah 8 kab	2,174,969,753,130	2,163,008,656,047	-0.55	1,121,894,588,189	1,216,067,658,270	8.39	3,400,000	2,375,000	-30.15	3,296,867,741,319	3,379,078,689,317	2.49
	Jumlah 1 kota	252,639,605,767	258,649,045,300	2.38	249,202,335,980	249,663,725,490	0.19	0	0	-	501,841,941,747	508,312,770,790	1.29
	Perbedaan wilayah			2.93			-8.21						-1.20

Berdasarkan perkembangan selama dua tahun yang terdapat pada Tabel 4.11 maka terjadi peningkatan dan penurunan belanja tidak langsung menurut jenis belanja. Peningkatan belanja tidak langsung merupakan hal yang wajar karena menyangkut gaji pegawai, namun penurunan belanja tidak langsung menimbulkan tanda tanya apakah data yang diberikan cukup valid atau tidak. Peningkatan belanja tidak langsung terbesar pada Kabupaten Bangli sebesar 22,64% dan terkecil pada Kota Denpasar sebesar 1,29%. Sebaliknya, penurunan terbesar belanja tidak langsung terjadi pada Kabupaten Klungkung sebesar 48,06% dan Kabupaten Gianyar sebesar 28,77%. Rata-rata kabupaten masih meningkat sebesar 2,49%, demikian juga kota sebesar 1,29% sehingga terjadi perbedaan perkembangan belanja wilayah sebesar -1,20% yang berarti perkembangan belanja kabupaten lebih baik daripada kota.

Grafik 4.10
Perkembangan Belanja Tidak langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015



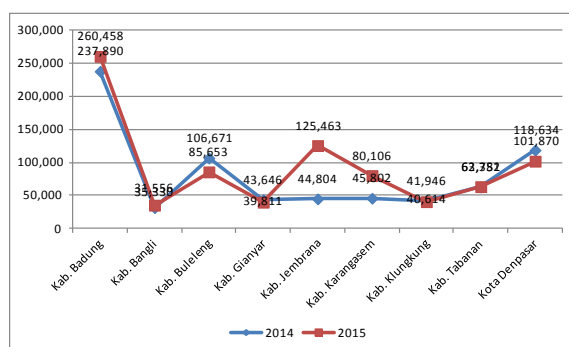
Tabel 4.12
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015

No.	Nama Kab/Kota	Pegawai			Barang dan Jasa			Modal			Jumlah		
		2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	26,977,630,782	17,803,241,500	-34.01	91,030,425,101	198,900,043,126	118.50	119,882,290,026	43,754,444,248	-63.50	237,890,345,908	260,457,728,874	9.49
2	Kab. Bangli	9,103,199,100	15,028,763,480	65.09	11,992,174,642	6,368,968,090	-46.89	10,460,287,994	13,931,922,604	33.19	31,555,661,736	35,329,654,174	11.96
3	Kab. Buleleng	2,109,620,000	1,143,140,000	-45.81	33,182,039,818	27,193,767,265	-18.05	71,379,319,033	57,316,221,874	-19.70	106,670,978,851	85,653,129,139	-19.70
4	Kab. Gianyar	3,035,751,000	3,977,683,000	31.03	16,764,561,768	13,077,003,801	-22.00	23,846,177,285	22,756,161,275	-4.57	43,646,490,053	39,810,848,076	-8.79
5	Kab. Jembrana	4,229,370,500	11,124,998,993	163.04	16,080,239,241	64,168,737,982	299.05	24,494,428,894	50,169,690,147	104.82	44,804,038,635	125,463,427,122	180.03
6	Kab. Karangasem	1,763,713,250	12,898,870,000	631.35	15,739,276,183	35,050,821,500	122.70	28,298,657,592	32,156,729,000	13.63	45,801,647,025	80,106,420,500	74.90
7	Kab. Klungkung	1,684,380,002	1,772,369,995	5.22	12,896,166,961	14,634,679,325	13.48	27,365,675,922	24,206,462,819	-11.54	41,946,222,885	40,613,512,139	-3.18
8	Kab. Tabanan	1,219,381,000	2,104,486,400	72.59	31,178,429,654	31,183,185,448	0.02	30,382,978,550	30,064,359,452	-1.05	62,780,789,204	63,352,031,300	0.91
9	Kota Denpasar	4,679,046,000	4,958,250,000	5.97	53,917,826,892	42,560,632,976	-21.06	60,036,847,881	54,350,953,466	-9.47	118,633,720,773	101,869,836,442	-14.13
	Jumlah kabupaten + kota	54,802,091,634	70,811,803,368	29.21	282,781,140,260	433,137,839,513	53.17	396,146,663,177	328,706,944,885	-17.02	733,729,895,070	832,656,587,766	13.48
	Jumlah 8 kabupaten	50,123,045,634	65,853,553,368	31.38	228,863,313,368	390,577,206,537	70.66	336,109,815,296	274,355,991,419	-18.37	615,096,174,297	730,786,751,324	18.81
	Jumlah 1 kota	4,679,046,000	4,958,250,000	5.97	53,917,826,892	42,560,632,976	-21.06	60,036,847,881	54,350,953,466	-9.47	118,633,720,773	101,869,836,442	-14.13
	Perbedaan wilayah			-25.42			-91.72			8.90			-32.94

Berdasarkan perkembangan selama dua tahun yang terdapat pada Tabel 4.12 maka terjadi peningkatan belanja langsung sebesar 13,48% dan penurunan belanja modal sebesar 17,02%, sedangkan belanja langsung barang dan jasa meningkat terbesar sebesar 53,17% dan pegawai sebesar 29,21%. Peningkatan terbesar pada Kabupaten Jembrana sebesar 180,03% dan terkecil pada Kabupaten Tabanan sebesar 0,91%. Sebaliknya, penurunan terbesar pada Kabupaten Buleleng sebesar 19,70% dan Kota Denpasar sebesar 14,13%. Rata-rata kabupaten meningkat 18,81%, sedangkan kota menurun sebesar 14,13%, sehingga terjadi perbedaan perkembangan belanja wilayah sebesar -32,94% yang berarti perkembangan belanja kabupaten lebih baik daripada kota.

Bila dilihat dari belanja pegawai Provinsi Bali mengalokasikan meningkat sebesar 29,21% dengan rincian Kabupaten Karangasem meningkat sangat tajam sebesar 631,35% dan Jembrana sebesar 163,04%, dan penurunan terjadi di Kabupaten Buleleng dan Bandung masing-masing sebesar 45,81% dan 34,01%. Bila dilihat dari belanja barang dan jasa Provinsi Bali mengalokasikan meningkat sebesar 53,17% maka Kabupaten Jembrana meningkat sangat tajam sebesar 299,05%, Kabupaten Karangasem sebesar 122,70%, dan Kabupaten Badung sebesar 118,50%, sedangkan Kabupaten Bangli menurun 46,89% dan Kota Denpasar sebesar 21,06%. Bila dilihat dari belanja modal Provinsi Bali mengalokasikan menurun sebesar 17,02% maka Kabupaten Jembrana meningkat sangat tajam sebesar 104,82% dan penurunan terbesar pada Kabupaten Badung sebesar 63,50%. Penurunan maupun peningkatan pada belanja modal adalah wajar karena modal tidak dilaksanakan secara rutin tiap tahun seperti halnya belanja tidak langsung.

Grafik 4.11
Perkembangan Belanja Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015



Berdasarkan persentase belanja langsung menurut jenis institusi pendidikan pada Tabel 4.13 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peserta didik PAUD maka di Provinsi Bali terjadi peningkatan belanja program PAUD sebesar 63,86%, sedangkan pendidikan menengah menurun sebesar 21,89%. Program kebudayaan menurun sangat tajam karena sebelumnya ada di 3 kabupaten dan tahun 2015 hanya di Kabupaten Jembrana. Peningkatan untuk institusi lain juga cukup besar sebesar 43,11% dengan kabupaten sangat lebih besar sebesar 51,82% dan kota sebesar 8,92% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 42,90% lebih baik kabupaten. Program pemuda dan olahraga di mana hampir semua Dinas Pendidikan juga mengelola Pemuda dan Olahraga hanya meningkat 29,16% dengan rincian kabupaten meningkat lebih besar sebesar 31,82% daripada kota sebesar 16,21%. Program yang bukan institusi pendidikan justru meningkat cukup besar sebesar 31,98% dengan peningkatan di kabupaten sebesar 35,07% lebih besar daripada di kota sebesar 11,69%,

sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 23,38% lebih besar kabupaten daripada kota.

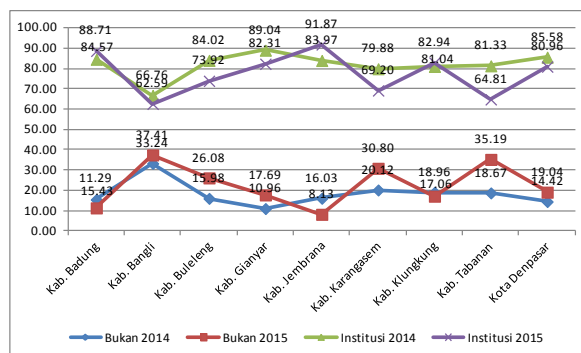
Tabel 4.13
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015

No.	Nama Kab/Kota	Bukan institusi pendidikan			PAUD			Pendidikan Dasar			Pendidikan Menengah		
		2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	30,441,525,975	22,641,706,525	-25.62	574,265,700	4,547,397,950	691.86	172,738,594,666	204,934,263,752	18.64	21,101,981,217	14,643,320,215	-30.61
2	Kab. Bangli	9,741,562,000	12,217,014,000	25.41	0	52,000,000	-	14,029,074,342	10,270,344,270	-26.79	6,192,080,394	8,601,958,104	38.92
3	Kab. Buleleng	7,019,164,766	4,013,448,940	-42.82	3,085,106,300	291,600,000	-90.55	49,943,117,973	34,198,978,975	-31.52	23,974,494,694	15,479,697,976	-35.43
4	Kab. Gianyar	2,574,881,381	4,435,625,854	72.27	1,195,910,700	852,081,700	-28.75	26,503,530,850	23,264,654,312	-12.22	8,506,786,907	5,691,457,850	-33.10
5	Kab. Jembrana	1,395,683,375	7,031,671,101	403.82	844,250,500	2,997,997,660	255.11	17,305,456,928	90,594,413,547	423.50	16,750,979,157	19,098,437,216	14.01
6	Kab. Karangasem	4,245,711,802	20,741,591,900	388.53	1,698,774,250	3,790,992,900	123.16	16,778,123,299	27,474,700,000	63.75	16,147,120,374	12,450,367,500	-22.89
7	Kab. Klungkung	5,722,110,997	4,617,294,049	-19.31	1,765,749,000	2,520,810,000	42.76	20,203,180,681	21,288,748,578	5.37	10,402,061,341	8,177,638,375	-21.38
8	Kab. Tabanan	9,333,603,000	19,492,546,800	108.84	275,000,000	365,000,000	32.73	37,182,791,200	29,325,788,500	-21.13	12,477,695,004	9,295,296,000	-25.50
9	Kota Denpasar	10,720,037,801	11,973,197,155	11.69	381,194,710	673,150,470	76.59	76,582,966,051	63,072,527,421	-17.64	17,105,621,380	10,180,451,735	-40.48
Jumlah kabupaten + kota		81,194,281,097	107,164,096,324	31.98	9,820,251,160	16,091,030,680	63.86	431,266,835,990	504,424,419,355	16.96	132,658,820,468	103,618,624,971	-21.89
Jumlah 8 kabupaten		70,474,243,296	95,190,899,169	35.07	9,439,056,450	15,417,880,210	63.34	354,683,869,939	441,351,891,934	24.44	115,553,199,088	93,438,173,236	-19.14
Jumlah 1 kota		10,720,037,801	11,973,197,155	11.69	381,194,710	673,150,470	76.59	76,582,966,051	63,072,527,421	-17.64	17,105,621,380	10,180,451,735	-40.48
Perbedaan wilayah				-23.38			13.25			-42.08			-21.35

Tabel 4.13 (lanjutan)
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015

No.	Nama Kab/Kota	PNF			Institusi Lain			Pemuda dan OR			Kebudayaan			Jumlah	
		2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015	AP	2014	2015
1	Kab. Badung	1,833,205,975	2,682,273,142	46.32	4,926,386,980	4,240,629,650	-13.92	6,274,385,395	6,768,137,640	7.87	0	0	-	237,890,345,908	260,457,728,874
2	Kab. Bangli	15,000,000	30,000,000	100.00	831,695,000	3,157,337,800	279.63	746,250,000	1,001,000,000	34.14	0	0	-	31,555,661,736	35,329,654,174
3	Kab. Buleleng	444,001,500	413,600,000	-6.85	12,182,858,018	12,934,031,948	6.17	10,022,235,600	18,321,771,300	82.81	0	0	-	106,670,978,851	85,653,129,139
4	Kab. Gianyar	0	31,930,000	-	2,656,150,815	2,928,148,960	10.24	2,209,229,400	2,606,949,400	18.00	0	0	-	43,646,490,053	39,810,848,076
5	Kab. Jembrana	500,690,900	512,992,000	2.46	2,221,201,025	2,060,266,098	-7.25	2,420,285,000	3,135,520,500	29.55	3,365,491,750	32,129,000	99.05	44,804,038,635	125,463,427,122
6	Kab. Karangasem	688,581,200	190,732,800	-72.30	1,273,726,500	11,526,744,500	804.96	4,932,609,600	3,931,290,900	-20.30	37,000,000	0	-	45,801,647,025	80,106,420,500
7	Kab. Klungkung	600,195,950	563,075,500	-6.18	1,021,339,816	1,134,168,537	11.05	2,231,585,100	2,311,777,100	3.59	0	0	-	41,946,222,885	40,613,512,139
8	Kab. Tabanan	165,000,000	470,000,000	184.85	960,000,000	1,603,400,000	67.02	2,171,700,000	2,800,000,000	28.93	215,000,000	0	-	62,780,789,204	63,352,031,300
9	Kota Denpasar	806,377,826	1,303,932,526	61.70	6,647,677,730	7,240,953,020	8.92	6,389,845,275	7,425,624,115	16.21	0	0	-	118,633,720,773	101,869,836,442
Jumlah kabupaten + kota		5,053,053,351	6,198,535,968	22.67	32,721,035,884	46,825,680,513	43.11	37,398,125,370	48,302,070,955	29.16	3,617,491,750	32,129,000	99.11	733,729,895,070	832,656,587,766
Jumlah 8 kabupaten		4,246,675,525	4,894,603,442	15.26	26,073,358,154	39,584,727,493	51.82	31,008,280,095	40,876,446,840	31.82	3,617,491,750	32,129,000	99.11	615,096,174,297	730,786,751,324
Jumlah 1 kota		806,377,826	1,303,932,526	61.70	6,647,677,730	7,240,953,020	8.92	6,389,845,275	7,425,624,115	16.21	0	0	-	118,633,720,773	101,869,836,442
Perbedaan wilayah				46.45			9	-42.90		-15.61		1	-		

Grafik 4.12
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014--2015

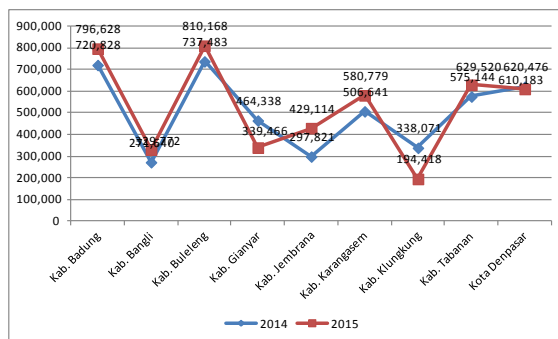


Tabel 4.14
Perkembangan Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014–2015

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Tak Langsung				Belanja Langsung				Jumlah		
		2014	%	2015	%	2014	%	2015	%	2014	2015	%
1	Kab. Badung	482,937,570,876	67.00	536,170,258,530	67.30	237,890,345,908	33.00	260,457,728,874	32.70	720,827,916,784	796,627,987,404	10.52
2	Kab. Bangli	240,084,075,000	88.38	294,442,608,087	89.29	31,555,661,736	11.62	35,329,654,174	10.71	271,639,736,736	329,772,262,261	21.40
3	Kab. Buleleng	630,811,554,589	85.54	724,515,286,000	89.43	106,670,978,851	14.46	85,653,129,139	10.57	737,482,533,440	810,168,415,139	9.86
4	Kab. Gianyar	420,691,354,310	90.60	299,655,607,100	88.27	43,646,490,053	9.40	39,810,848,076	11.73	464,337,844,363	339,466,455,176	-26.89
5	Kab. Jembrana	253,016,558,845	84.96	303,650,216,737	70.76	44,804,038,635	15.04	125,463,427,122	29.24	297,820,597,480	429,113,643,859	44.08
6	Kab. Karangasem	460,838,878,084	90.96	500,672,231,748	86.21	45,801,647,025	9.04	80,106,420,500	13.79	506,640,525,109	580,778,652,248	14.63
7	Kab. Klungkung	296,125,033,905	87.59	153,804,251,894	79.11	41,946,222,885	12.41	40,613,512,139	20.89	338,071,256,790	194,417,764,033	-42.49
8	Kab. Tabanan	512,362,715,710	89.08	566,168,229,221	89.94	62,780,789,204	10.92	63,352,031,300	10.06	575,143,504,914	629,520,260,521	9.45
9	Kota Denpasar	501,841,941,747	80.88	508,312,770,790	83.31	118,633,720,773	19.12	101,869,836,442	16.69	620,475,662,520	610,182,607,232	-1.66
	Jumlah kab + kota	3,798,709,683,066	83.81	3,887,391,460,107	82.36	733,729,895,070	16.19	832,656,587,766	17.64	4,532,439,578,136	4,720,048,047,873	4.14
	Jumlah 8 kabupaten	3,296,867,741,319	84.28	3,379,078,689,317	82.22	615,096,174,297	15.72	730,786,751,324	17.78	3,911,963,915,616	4,109,865,440,641	5.06
	Jumlah 1 kota	501,841,941,747	80.88	508,312,770,790	83.31	118,633,720,773	19.12	101,869,836,442	16.69	620,475,662,520	610,182,607,232	-1.66
	Perbedaan wilayah		-3.40		1.09		3.40		-1.09			-6.72

Bila dilihat belanja perbandingan belanja langsung dan tidak langsung yang terdapat pada Tabel 4.14 maka terjadi peningkatan sebesar 4,14% dengan peningkatan kabupaten sebesar 5,06%, sedangkan kota justru menurun sebesar 1,66%, sehingga terjadi perbedaan belanja wilayah sebesar 6,72% dengan kabupaten lebih baik daripada kota. Dari tabel tersebut juga diketahui adanya peningkatan belanja langsung dari 16,19% menjadi 17,64% yang berarti terjadi penurunan pada belanja tidak langsung dari 83,81% menjadi 82,36%.

Grafik 4.13
Perkembangan Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014—2015

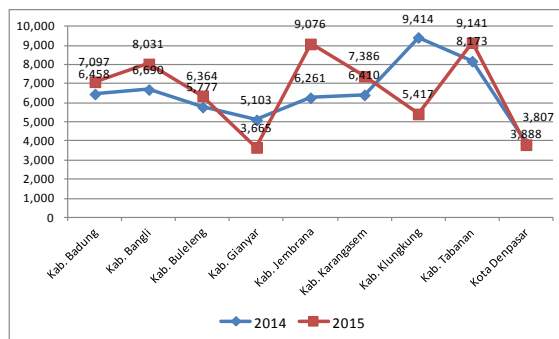


Bila dibandingkan antara belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen yang terdapat pada Tabel 4.15 maka terdapat kecenderungan meningkat dari 5.937.556 menjadi 6.176.626 atau meningkat 4,03%. Peningkatan terjadi pada kabupaten sebesar 5,04% dan penurunan pada kota sebesar 2,08% sehingga perbedaan wilayah sebesar 7,12% lebih baik kabupaten daripada kota. Namun, terjadi penurunan cukup besar pada Kabupaten Klungkung sebesar 42,46% dan Kabupaten Gianyar sebesar 28,18%, sedangkan peningkatan terbesar pada Kabupaten Jembrana sebesar 44,95% dan Kabupaten Bangli sebesar 20,04%.

Tabel 4.15
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014–2015

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan		Siswa Dikdasmen		Rasio		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	720,827,916,784	796,627,987,404	111,620	112,244	6,457,874	7,097,288	9.90
2	Kab. Bangli	271,639,736,736	329,772,262,261	40,603	41,063	6,690,140	8,030,886	20.04
3	Kab. Buleleng	737,482,533,440	810,168,415,139	127,663	127,300	5,776,792	6,364,245	10.17
4	Kab. Gianyar	464,337,844,363	339,466,455,176	91,002	92,630	5,102,502	3,664,757	-28.18
5	Kab. Jembrana	297,820,597,480	429,113,643,859	47,566	47,282	6,261,208	9,075,624	44.95
6	Kab. Karangasem	506,640,525,109	580,778,652,248	79,033	78,633	6,410,493	7,385,940	15.22
7	Kab. Klungkung	338,071,256,790	194,417,764,033	35,910	35,888	9,414,404	5,417,347	-42.46
8	Kab. Tabanan	575,143,504,914	629,520,260,521	70,375	68,868	8,172,554	9,140,969	11.85
9	Kota Denpasar	620,475,662,520	610,182,607,232	159,579	160,271	3,888,204	3,807,193	-2.08
	Jumlah kab + kota	4,532,439,578,136	4,720,048,047,873	763,351	764,179	5,937,556	6,176,626	4.03
	Jumlah 8 kabupaten	3,911,963,915,616	4,109,865,440,641	603,772	603,908	6,479,207	6,805,450	5.04
	Jumlah 1 kota	620,475,662,520	610,182,607,232	159,579	160,271	3,888,204	3,807,193	-2.08
	Perbedaan wilayah							-7.12

Grafik 4.14
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014—2015



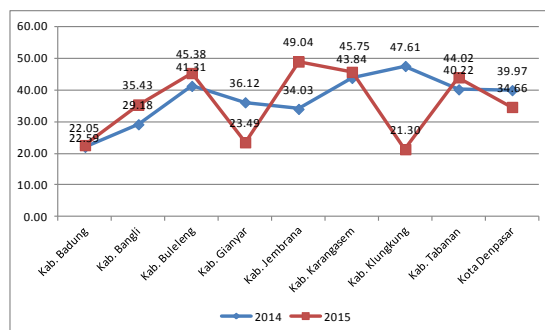
Data APBD tidak diperoleh lengkap tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun untuk menunjukkan berapa persentase belanja pendidikan maka digunakan APBD yang sama untuk empat kabupaten, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Tabanan, menggunakan APBD tahun 2015. Perkembangan persentase belanja pendidikan terhadap APBD menurun dari 34,88% menjadi 33,87% atau sebesar 2,90%, penurunan juga terjadi pada kabupaten sebesar 1,27% dan kota sebesar 13,30% sehingga makin terjadi perbedaan wilayah sebesar 12,03% lebih baik kabupaten. Penurunan terjadi di tiga kabupaten, dengan penurunan terbesar di Kabupaten Klungkung sebesar 55,26%, Kabupaten Gianyar sebesar 34,97%, dan Kota Denpasar sebesar 13,30%, walaupun ketiga kabupaten/kota telah menggunakan APBD yang sesuai. Sebaliknya, Kabupaten Jembrana sebesar sangat besar sebesar 44,08% dan Kabupaten Bangli sebesar 21,30%.

Tabel 4.16
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Pendidikan		APBD			Rasio		
		2014	2015	2014	2015	AP	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	720,827,916,784	796,627,987,404	3,269,667,228,515	3,527,203,219,418	7.88	22.05	22.59	2.45
2	Kab. Bangli	271,639,736,736	329,772,262,261	930,895,764,975	930,895,764,975	0.00	29.18	35.43	21.40
3	Kab. Buleleng	737,482,533,440	810,168,415,139	1,785,202,065,650	1,785,202,065,650	0.00	41.31	45.38	9.86
4	Kab. Gianyar	464,337,844,363	339,466,455,176	1,285,370,082,601	1,445,120,498,816	12.43	36.12	23.49	-34.97
5	Kab. Jembrana	297,820,597,480	429,113,643,859	875,100,013,459	875,100,013,459	0.00	34.03	49.04	44.08
6	Kab. Karangasem	506,640,525,109	580,778,652,248	1,155,747,491,172	1,269,495,869,214	9.84	43.84	45.75	4.36
7	Kab. Klungkung	338,071,256,790	194,417,764,033	710,072,006,777	912,707,523,258	28.54	47.61	21.30	-55.26
8	Kab. Tabanan	575,143,504,914	629,520,260,521	1,429,917,386,211	1,429,917,386,211	0.00	40.22	44.02	9.45
9	Kota Denpasar	620,475,662,520	610,182,607,232	1,552,221,463,244	1,760,606,869,553	13.42	39.97	34.66	-13.30
	Jumlah kab + kota	4,532,439,578,136	4,720,048,047,873	12,994,193,502,604	13,936,249,210,554	7.25	34.88	33.87	-2.90
	Jumlah 8 kabupaten	3,911,963,915,616	4,109,865,440,641	11,441,972,039,360	12,175,642,341,001	6.41	34.19	33.75	-1.27
	Jumlah 1 kota	620,475,662,520	610,182,607,232	1,552,221,463,244	1,760,606,869,553	13.42	39.97	34.66	-13.30
	Perbedaan wilayah					7.01	5.78	0.90	-12.03

Catatan: 1) dana APBD tahun 2015

Grafik 4.15
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, Tahun 2014—2015



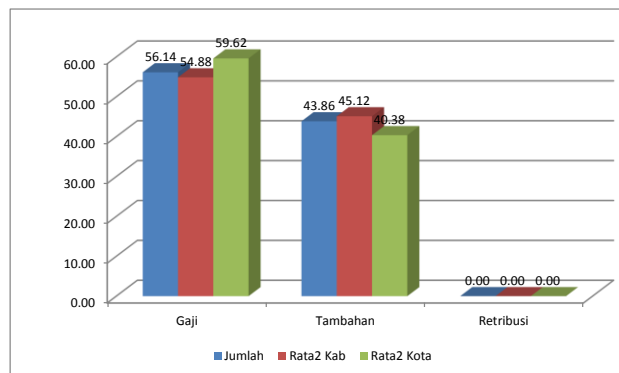
D. Analisis Data Keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota

Analisis untuk semua sampel sebanyak 67 Kabupaten/Kota juga dilakukan seperti halnya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun dengan analisis yang tidak selengkap analisis Provinsi Bali. Bila Provinsi Bali menggunakan data dan indikator sebanyak 10 jenis, untuk sampel 67 kabupaten/kota menggunakan data dan indikator sebanyak 8 jenis.

1. Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja

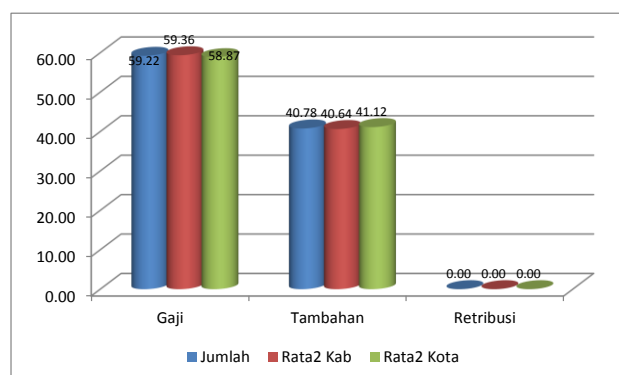
Berdasarkan data pada Tabel 4.17A, pada tahun 2014 gaji dan tunjangan untuk kabupaten/kota sampel sebesar Rp17.153.007,0 juta dengan rincian terbesar pada Kota Bandung sebesar Rp938,640,1 juta dan terkecil pada Kabupaten Mamuju sebesar Rp13.128,1 juta. Tambahan penghasilan PNS untuk

Grafik 4.16A
Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota, Tahun 2014



Data tahun 2015 pada Tabel 4.17B, menunjukkan belanja tidak langsung sebesar Rp29.821.023,7 juta, gaji dan tunjangan kabupaten/kota sampel sebesar Rp17.660.717,0 juta, terbesar di Kota Bandung sebesar Rp943,566,7 juta dan terkecil di Kabupaten Kebumen sebesar Rp26.765,2 juta. Tambahan penghasilan PNS kabupaten/kota sampel sebesar Rp12.160.190,3 juta, terbesar juga di Kota Bandung sebesar Rp752.843,4 juta dan terkecil di Kota Yogyakarta sebesar Rp25.080,0 juta. Retribusi hanya dialokasikan pada 10 kabupaten/kota sebesar Rp116.343 ribu sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja lainnya.

Grafik 4.16B
Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota, Tahun 2015



Tabel 4.17B
Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Gaji dan Tunjangan		Tambahan Penghasilan		Retribusi		Jumlah
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Badung	30	Bali	301,427,085,210	56.22	234,741,073,320	43.78	2,100,000	0.00	536,170,258,530
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	153,933,673,954	59.41	105,184,474,000	40.59	0	0.00	259,118,147,954
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	92,296,007,894	60.01	61,508,244,000	39.99	0	0.00	153,804,251,894
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	77,671,434,761	53.71	66,950,950,357	46.29	0	0.00	144,622,385,118
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	84,477,842,900	51.04	81,048,946,000	48.96	0	0.00	165,526,788,900
6	Kab. Bangli	30	Bali	175,592,943,087	59.64	118,849,665,000	40.36	0	0.00	294,442,608,087
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	130,218,819,676	62.88	76,858,592,000	37.12	0	0.00	207,077,411,676
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	469,499,042,000	60.79	302,893,087,000	39.21	0	0.00	772,392,129,000
9	Kab. Bantul	4	Jawa Tengah	262,776,565,795	56.47	202,571,522,000	43.53	0	0.00	465,348,087,795
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	76,394,938,000	41.23	108,914,855,500	58.77	0	0.00	185,309,793,500
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	234,350,126,208	61.01	149,739,901,000	38.99	0	0.00	384,090,027,208
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Bualeleng	30	Bali	691,328,206,000	95.42	33,187,080,000	4.58	0	0.00	724,515,286,000
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	111,701,232,128	46.20	130,059,065,000	53.80	0	0.00	241,760,297,128
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	513,435,105,075	56.27	398,997,094,400	43.73	0	0.00	912,432,199,475
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	270,472,182,631	55.10	220,438,099,000	44.90	0	0.00	490,910,281,631
17	Kab. Gianyar	30	Bali	115,373,859,100	38.50	184,281,748,000	61.50	0	0.00	299,655,607,100
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	70,506,079,381	63.07	41,279,028,000	36.93	0	0.00	111,785,107,381
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	318,153,317,131	62.15	193,765,114,000	37.85	0	0.00	511,918,431,131
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	532,518,095,000	58.04	385,011,289,000	41.96	0	0.00	917,529,384,000
21	Kab. Jembrana	30	Bali	155,994,165,597	51.37	147,656,051,140	48.63	0	0.00	303,650,216,737
22	Kab. Jember	25	Sulawesi Selatan	185,535,596,745	59.60	125,739,198,000	40.39	50,000,000	0.02	311,324,794,745
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	461,384,347,859	60.20	305,071,641,000	39.80	0	0.00	766,455,988,859
24	Kab. Karangasem	30	Bali	305,207,013,748	60.96	195,464,943,000	39.04	275,000	0.00	500,672,231,748
25	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	26,765,200,000	6.64	376,258,797,000	93.36	0	0.00	403,023,997,000
26	Kab. Kedu	4	Jawa Tengah	389,043,201,469	59.84	261,144,548,200	40.16	1,750,000	0.00	650,189,499,669
27	Kab. Klungkung	30	Bali	92,296,007,894	60.01	61,508,244,000	39.99	0	0.00	153,804,251,894
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	182,076,971,650	63.11	106,438,359,000	36.89	0	0.00	288,515,330,650
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	576,952,697,000	66.92	285,190,833,000	33.08	0	0.00	862,143,530,000
30	Kab. Lebak	3	Banten	450,841,009,773	56.33	349,460,305,000	43.67	0	0.00	800,301,314,773
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	417,514,326,045	63.21	243,006,207,000	36.79	1,318,000	0.00	660,521,851,045
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	482,152,401,496	58.51	341,951,200,000	41.49	0	0.00	824,103,601,496
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	58,927,191,217	42.41	80,012,530,552	57.59	0	0.00	138,939,721,769
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	243,116,404,547	59.28	166,986,338,801	40.72	0	0.00	410,102,743,348
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	499,942,460,512	59.25	343,876,070,000	40.75	0	0.00	843,818,530,512
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	367,677,042,184	59.98	245,300,617,000	40.02	0	0.00	612,977,659,184
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	204,979,930,000	62.05	125,365,376,000	37.95	0	0.00	330,345,306,000
38	Kab. Pidie	7	Aceh	297,013,830,241	62.29	179,802,047,000	37.71	0	0.00	476,815,877,241
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	115,893,669,781	61.78	71,696,639,000	38.22	0	0.00	187,590,308,781
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	373,780,339,358	57.08	281,094,921,898	42.92	0	0.00	654,875,261,256
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	278,804,816,858	59.86	186,922,704,000	40.14	0	0.00	465,727,520,858
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	213,015,196,319	62.30	128,884,383,000	37.70	0	0.00	341,899,579,319
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	554,068,059,408	59.89	371,004,101,000	40.11	0	0.00	925,072,160,408
44	Kab. Tabanan	30	Bali	325,789,375,411	57.54	240,378,853,810	42.46	0	0.00	566,168,229,221
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	213,103,734,046	86.46	33,356,551,500	13.53	16,000,000	0.01	246,476,285,546
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	200,616,467,000	62.02	122,853,192,000	37.98	0	0.00	323,469,659,000
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	297,043,476,894	61.17	188,580,289,000	38.83	0	0.00	485,623,765,894
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	943,566,709,646	55.62	752,843,360,043	44.38	0	0.00	1,696,410,069,689
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	102,367,052,180	57.68	75,119,865,750	42.32	0	0.00	177,486,917,930
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	121,774,821,922	63.35	70,438,509,675	36.65	0	0.00	192,213,331,597
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	229,704,354,178	55.80	181,947,426,735	44.20	0	0.00	411,651,780,913
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	184,307,688,724	62.18	112,101,604,000	37.82	0	0.00	296,409,292,724
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	195,747,546,737	75.59	63,201,417,328	24.41	0	0.00	258,948,964,065
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	271,697,549,116	55.24	220,183,544,000	44.76	0	0.00	491,881,093,116
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	118,946,947,036	65.39	62,941,473,000	34.60	10,500,000	0.01	181,898,920,036
56	Kota Denpasar	30	Bali	258,649,045,300	50.88	249,663,725,490	49.12	0	0.00	508,312,770,790
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	278,735,180,984	54.96	228,438,066,000	45.04	0	0.00	507,173,246,984
58	Kota Jambi	23	Jambi	293,446,628,106	56.33	227,510,325,229	43.67	2,100,000	0.00	520,959,053,335
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	248,372,346,300	63.72	141,433,433,000	36.28	0	0.00	389,805,779,300
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	136,911,976,000	60.23	90,405,804,000	39.77	0	0.00	227,317,780,000
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	107,751,129,727	50.11	107,294,006,868	49.89	0	0.00	215,045,136,595
62	Kota Parepare	25	Sulawesi Selatan	174,253,275,812	76.39	53,824,361,536	23.60	30,000,000	0.01	228,107,637,348
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	124,337,817,000	56.66	95,110,380,000	43.34	2,300,000	0.00	219,450,497,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	61,521,643,266	53.48	53,511,879,100	46.52	0	0.00	115,033,522,366
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	688,708,186,790	56.99	519,733,215,205	43.01	0	0.00	1,208,441,401,995
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	184,116,232,369	52.27	168,123,130,751	47.73	0	0.00	352,239,363,120
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	284,119,394,705	91.89	25,080,000,000	8.11	0	0.00	309,199,394,705
Jumlah kabupaten + kota				17,660,717,014,880	59.22	12,160,190,296,188	40.78	116,343,000	0.00	29,821,023,654,068
Jumlah 47 kabupaten				12,651,661,488,982	59.36	8,661,284,768,478	40.64	71,443,000	0.00	21,313,017,700,460
Jumlah 20 kota				5,009,055,525,897	58.87	3,498,905,527,710	41.12	44,900,000	0.00	8,508,005,953,607

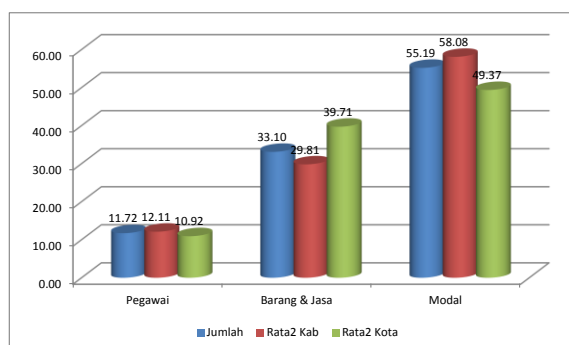
2. Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja

Data belanja langsung menurut jenis belanja tahun 2014 terdapat pada Tabel 4.18A. Dari tiga jenis belanja tersebut maka yang terbesar adalah belanja modal sebesar 55,19%, diikuti belanja barang dan jasa sebesar 33,10%, dan terkecil belanja pegawai sebesar 11,72%. Belanja modal terbesar terjadi pada Kabupaten Lombok Tengah sebesar 83,15% dan terkecil pada Kota Yogyakarta sebesar 4,30%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 58,08% dan kota sebesar 49,37%. Belanja pegawai terbesar terjadi pada Kabupaten Bogor sebesar 36,27% dan

terkecil pada Kota Kendari sebesar 0,80%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 12,11% dan kota sebesar 10,92%. Belanja barang dan jasa terbesar terjadi pada Kabupaten Bulungan sebesar 70,76% dan terkecil pada Kabupaten Kebumen sebesar 11,11%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 29,81% dan kota sebesar 39,71%. Dengan demikian, belanja langsung 67 kabupaten/kota sebesar Rp5.861.910,1 juta dengan kabupaten sebesar Rp3.913.974,0 dan kota sebesar Rp1.947.936,1 juta.

Data belanja langsung menurut jenis belanja tahun 2015 terdapat pada Tabel 4.18B. Dari tiga jenis belanja tersebut maka yang terbesar adalah belanja modal sebesar 51,67%, diikuti belanja barang dan jasa sebesar 35,65%, dan terkecil belanja pegawai sebesar 12,69%. Belanja modal terbesar terjadi pada Kota Kendari sebesar 81,91% dan terkecil pada Kota Yogyakarta sebesar 9,57%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 53,02% dan kota sebesar 48,22%. Belanja pegawai terbesar terjadi pada Kota Tangerang Selatan sebesar 43,52% dan terkecil pada Kota Kendari sebesar 0,27%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 12,08% dan kota sebesar 14,22%. Belanja barang dan jasa terbesar terjadi pada Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 89,32% dan terkecil pada Kabupaten Bogor sebesar 10,69%, sedangkan rata-rata kabupaten sebesar 34,89% dan kota sebesar 37,56%. Dengan demikian, belanja langsung 67 kabupaten/kota sebesar Rp5.715.439,4 juta dengan kabupaten sebesar Rp4.102.024,9 dan kota sebesar Rp1.613.414,6 juta.

Grafik 4.17A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota, Tahun 2014



Tabel 4.18A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

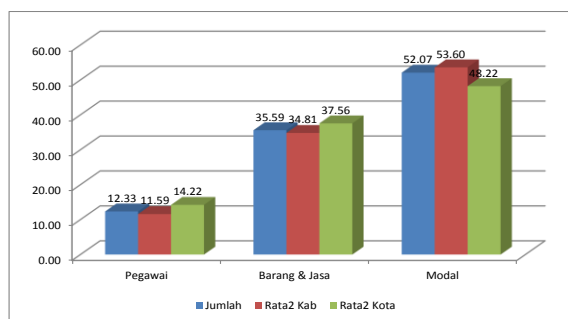
No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Jumlah Seluruhnya					
				Pegawai		Barang dan Jasa		Modal	
					%		%		%
1	Kab. Badung	30	Bali	26,977,630,782	11.34	91,030,425,101	38.27	119,882,290,026	50.39
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	17,234,963,500	23.05	23,342,823,450	31.22	34,187,036,450	45.73
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	4,249,510,000	5.23	41,606,135,970	51.23	35,360,024,100	43.54
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	31,624,922,311	35.21	16,604,241,689	18.49	41,579,878,400	46.30
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	10,889,014,000	16.41	12,915,699,000	19.46	42,558,740,000	64.13
6	Kab. Bangli	30	Bali	9,103,199,100	28.85	11,992,174,642	38.00	10,460,287,994	33.15
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	3,780,208,000	5.32	43,762,358,750	61.57	23,534,660,725	33.11
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	18,152,089,000	15.51	54,508,699,834	46.57	44,379,208,735	37.92
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	8,632,552,000	17.39	16,446,025,000	33.12	24,571,987,928	49.49
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	12,547,640,500	24.60	21,433,587,660	42.02	17,032,812,300	33.39
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	52,537,009,500	13.82	56,463,206,900	14.85	271,238,227,626	71.33
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	123,898,721,000	36.27	48,495,757,510	14.20	169,240,457,370	49.54
13	Kab. Buleleng	30	Bali	2,109,620,000	1.98	33,182,039,818	31.11	71,379,319,033	66.92
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	1,878,155,156	15.54	8,550,482,110	70.76	1,655,924,913	13.70
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	3,991,925,000	3.07	22,325,421,000	17.17	103,741,657,772	79.77
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	6,477,937,100	10.22	12,993,505,100	20.50	43,911,355,800	69.28
17	Kab. Gianyar	30	Bali	3,035,751,000	6.96	16,764,561,768	38.41	23,846,177,285	54.63
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	8,526,775,000	19.35	9,027,962,009	20.49	26,502,910,730	60.16
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	8,871,381,000	17.69	23,313,216,025	46.48	17,374,293,475	35.83
20	Kab. Indragiri	2	Jawa Barat	1,323,537,500	1.35	24,359,260,500	24.81	72,488,954,000	73.84
21	Kab. Jember	30	Bali	4,293,370,500	9.44	16,080,239,241	35.89	24,494,428,894	54.67
22	Kab. Jeneponto	25	Sulawesi Selatan	580,550,000	0.90	39,829,720,100	61.78	24,054,762,500	37.31
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	8,845,699,688	9.07	24,966,149,917	25.59	63,734,127,069	65.34
24	Kab. Karangasem	30	Bali	1,763,713,250	3.85	15,739,276,183	34.36	28,298,657,592	61.79
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	11,113,354,000	10.86	11,371,362,000	11.11	79,842,306,000	78.03
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	4,693,640,000	4.76	39,861,373,397	40.42	54,074,697,560	54.83
27	Kab. Klungkung	30	Bali	1,684,380,002	4.02	12,896,166,961	30.74	27,365,675,922	65.24
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	5,070,043,150	9.41	12,569,311,724	23.33	36,240,183,686	67.26
30	Kab. Lebak	3	Banten	1,152,900,000	1.12	24,165,406,850	23.53	77,387,022,650	75.35
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	2,400,500,000	3.33	9,741,093,062	13.52	59,896,384,813	83.15
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	1,700,725,000	2.51	16,656,200,002	24.61	49,314,883,000	72.87
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	9,836,243,000	15.85	22,082,795,813	35.60	30,119,811,187	48.55
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	3,869,401,000	2.25	69,781,572,550	40.56	98,393,400,050	57.19
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	10,712,424,000	9.19	20,592,302,500	17.66	85,320,645,405	73.16
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	4,476,698,000	6.62	35,703,239,500	52.77	27,482,196,150	40.62
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	6,866,700,000	19.66	8,045,918,000	23.04	20,012,444,000	57.30
38	Kab. Pidie	7	Aceh	2,412,055,900	4.14	30,945,180,048	53.17	24,842,331,340	42.68
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	2,672,975,290	7.05	5,177,469,570	13.65	30,090,058,476	79.31
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	9,616,479,950	8.14	25,434,112,141	21.54	83,046,145,100	70.32
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	2,793,518,500	4.01	36,026,943,990	51.69	30,874,767,215	44.30
42	Kab. Sijunjung	25	Sulawesi Selatan	940,515,000	2.01	25,786,011,840	55.17	20,012,768,040	42.82
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	1,219,381,000	1.94	31,178,429,654	49.66	30,382,978,550	48.40
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	10,996,808,400	13.80	29,222,104,307	36.68	39,447,117,651	49.52
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	8,533,072,100	15.44	13,730,129,900	24.85	32,996,201,300	59.71
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	25,533,235,895	7.57	142,095,957,874	42.13	169,659,393,769	50.30
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	7,101,970,700	11.74	7,205,789,800	11.91	46,195,467,985	76.35
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	8,709,085,012	14.28	9,771,018,250	16.02	42,496,714,964	69.69
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	7,652,675,300	19.54	12,479,614,700	31.86	19,039,938,000	61.61
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	2,052,942,500	4.24	16,505,499,670	34.10	29,848,120,500	68.66
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	501,407,000	1.70	9,313,516,466	31.50	19,752,001,284	66.80
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	14,693,158,498	12.83	28,452,686,512	24.84	71,375,289,670	62.32
55	Kota Bukittinggi	9	Sumatera Barat	6,220,799,750	16.13	13,777,030,110	35.72	18,569,044,220	48.15
56	Kota Denpasar	30	Bali	4,679,046,000	3.94	53,917,826,892	45.45	60,036,847,881	50.61
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	0	0.00	154,621,585,900	47.73	169,357,373,430	52.27
58	Kota Jambi	23	Jambi	1,462,570,000	2.09	29,594,693,250	42.35	38,831,111,750	55.56
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	277,220,000	0.80	10,337,260,771	29.78	24,100,669,729	69.42
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	3,548,327,000	8.21	15,974,393,000	36.96	23,701,029,000	54.83
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	9,134,512,700	10.41	30,641,853,416	34.93	47,950,347,500	54.66
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	524,000,000	1.41	20,884,817,900	56.15	15,783,261,248	42.44
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	14,286,281,000	17.47	21,736,621,000	26.58	45,761,568,000	55.95
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	5,909,860,400	13.07	11,357,765,850	25.11	27,959,545,500	61.82
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	53,206,615,875	23.60	87,534,472,423	38.82	84,744,955,102	37.58
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	47,258,901,000	31.28	97,327,767,500	64.42	6,490,672,000	4.30
Jumlah Kabupaten + kota				686,776,297,809	11.72	1,940,230,264,369	33.10	3,234,903,550,344	55.19
Jumlah 47 Kabupaten				474,023,689,179	12.11	1,166,700,093,085	29.81	2,273,250,198,812	58.08
Jumlah 20 kota				212,752,608,630	10.92	773,530,171,284	39.71	961,653,351,532	49.37

Catatan: Kab. Subang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Surabaya

Tabel 4.18B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Jumlah semua program					
				Pegawai		Brg dan Jasa		Modal	
					%		%		%
1	Kab. Badung	30	Bali	17,803,241,500	6.84	198,900,043,126	76.37	43,754,444,248	16.80
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	19,307,544,400	24.42	19,946,676,353	25.23	39,806,799,113	50.35
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	12,898,870,000	16.10	35,050,821,500	43.76	32,156,720,000	40.14
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	26,235,125,400	33.39	15,684,489,000	19.96	36,645,364,550	46.64
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	14,429,002,000	18.31	15,234,321,000	19.33	49,130,276,000	62.35
6	Kab. Bangli	30	Bali	15,028,763,480	42.54	6,368,968,090	18.03	13,931,922,604	39.43
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	4,891,593,000	10.03	26,712,887,900	54.79	17,150,243,150	35.18
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	18,132,803,000	18.66	49,965,525,453	51.41	29,088,312,000	29.93
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	3,772,504,500	5.80	19,184,719,090	29.48	42,116,154,738	64.72
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	13,034,258,720	23.96	24,619,058,269	45.25	16,749,724,520	30.79
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	65,421,609,900	19.12	58,264,735,255	17.03	218,485,282,995	63.85
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	95,235,947,000	25.79	39,498,649,014	10.69	234,599,504,858	63.52
13	Kab. Buleleng	30	Bali	1,143,340,000	8.63	27,193,767,265	31.75	57,316,221,874	66.92
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	1,899,190,562	15.50	8,661,823,707	70.70	1,690,336,850	13.80
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	2,465,805,000	2.82	11,954,484,064	13.66	73,097,997,514	83.52
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	14,430,055,000	16.91	20,056,533,000	23.50	50,856,406,000	59.59
17	Kab. Gianyar	30	Bali	3,977,683,000	9.99	13,077,003,801	32.85	22,756,611,275	57.16
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	7,266,800,000	14.87	5,726,020,165	11.71	35,887,760,979	73.42
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	3,129,710,100	5.97	32,109,190,792	61.24	17,190,674,386	32.79
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	23,945,481,000	20.17	34,824,387,000	29.33	59,955,625,000	50.50
21	Kab. Jembrana	30	Bali	11,124,998,993	8.87	64,168,737,982	51.15	50,169,690,147	39.99
22	Kab. Jenebonto	25	Sulawesi Selatan	727,580,000	1.15	32,067,955,600	50.50	30,704,464,400	48.35
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	9,118,707,364	8.63	32,008,123,798	30.28	64,577,817,970	61.08
24	Kab. Karangasem	30	Bali	12,898,870,000	16.10	35,050,821,500	43.76	32,156,720,000	40.14
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	10,079,160,000	13.51	8,274,219,000	11.09	56,240,253,000	75.40
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	3,877,115,000	4.36	36,910,597,692	41.49	48,185,198,058	54.16
27	Kab. Klungkung	30	Bali	1,772,369,995	4.36	14,634,679,325	36.03	24,206,462,819	59.60
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	673,590,900	1.43	42,018,553,575	89.32	4,348,000,000	9.24
29	Kab. Langkat	6	Jawa Timur	4,872,593,150	43.38	3,903,471,850	34.76	2,455,000,000	21.86
30	Kab. Lebak	3	Banten	945,648,000	0.85	33,128,058,424	29.66	77,617,831,138	69.49
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	2,604,607,000	3.96	11,607,858,300	17.63	51,615,538,380	78.41
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	743,640,000	0.96	18,804,911,100	24.33	57,757,049,587	74.71
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	1,247,294,077	1.59	33,324,269,576	42.55	43,750,726,845	55.86
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	222,465,000	0.14	83,719,337,850	52.05	76,916,801,150	47.82
35	Kab. Naganuk	6	Jawa Timur	10,640,229,000	13.68	15,983,454,900	20.55	51,155,298,360	65.77
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	3,271,204,500	4.11	28,787,520,650	36.17	47,541,600,400	59.73
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	5,990,737,000	16.30	10,344,933,190	28.15	20,412,634,810	55.55
38	Kab. Pidie	7	Aceh	2,135,046,300	3.28	25,078,194,950	38.50	37,918,174,503	58.22
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	2,890,733,000	7.24	8,470,611,449	21.22	28,556,741,843	71.54
40	Kab. Purwokerto	2	Jawa Barat	20,110,618,900	14.91	27,475,298,522	20.37	87,324,443,784	64.73
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	2,201,593,000	2.37	51,654,984,082	55.61	39,031,029,214	42.02
42	Kab. Sinali	25	Sulawesi Selatan	1,377,100,000	2.92	21,033,534,320	44.59	24,756,612,192	52.49
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	2,104,486,400	3.32	31,183,185,448	49.27	30,064,359,452	47.46
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	11,569,407,000	12.54	30,081,009,682	32.60	50,624,264,598	54.86
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	-	-	57,502,381,300	100.00	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	7,963,185,000	12.51	11,148,394,550	17.51	44,561,014,500	69.98
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	23,813,644,775	11.79	70,162,407,523	34.74	107,986,357,298	53.47
49	Kota Banjar	6	Jawa Barat	4,463,622,400	7.52	10,731,757,600	18.08	44,145,490,532	74.39
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	4,957,001,918	8.34	25,241,949,550	42.47	29,231,966,758	49.19
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	2,451,083,000	6.82	12,893,414,500	35.85	20,616,102,500	57.33
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	1,020,755,000	2.59	17,370,640,558	44.16	20,947,888,610	53.25
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	495,578,000	12.10	1,998,670,000	48.81	1,600,452,000	39.09
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	20,475,548,500	18.70	28,926,342,159	25.00	66,281,896,153	57.30
55	Kota Bukittinggi	8	Sumatera Barat	337,400,000	9.81	2,003,865,335	64.10	896,872,290	26.09
56	Kota Denpasar	30	Bali	4,958,250,000	4.87	42,560,632,976	41.78	54,350,953,466	53.35
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	-	-	95,434,752,450	35.51	173,322,931,248	64.49
58	Kota Jambi	23	Jambi	2,601,663,500	5.51	22,107,335,978	46.81	22,513,846,442	47.68
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	110,540,000	0.27	7,293,181,700	17.82	33,517,905,000	81.91
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	2,738,880,000	7.39	15,110,984,000	40.75	19,234,971,000	51.87
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	12,653,326,500	15.29	31,553,343,650	38.14	38,528,392,613	46.57
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	660,745,000	1.88	20,649,529,000	58.85	13,779,649,300	39.27
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	12,135,849,800	14.80	19,524,858,209	23.81	50,351,365,991	61.40
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	4,208,445,200	9.10	12,168,263,200	26.31	29,873,877,214	64.59
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	76,246,053,450	43.52	65,018,595,646	37.11	33,927,333,951	19.37
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	55,115,490,326	31.13	104,970,455,275	59.30	16,941,392,075	9.57
Jumlah kabupaten + kota				725,056,024,520	12.69	2,037,320,191,768	35.65	2,953,063,220,246	51.67
Jumlah 47 kabupaten				495,612,107,141	12.08	1,431,399,202,459	34.89	2,175,019,575,803	53.02
Jumlah 20 kota				229,443,917,379	14.22	605,920,989,309	37.56	778,049,644,443	48.22

Grafik 4.17B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Belanja
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten, dan Rata-rata Kota, Tahun 2015



Tabel 4.19A (lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Program
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	10. PKLK	11. Mutu PTK	12. Pelayanan Pend	13. Pemuda & OR	14. Kebud	15. PT	16. Lainnya	Jumlah	
1	Kab. Badung	30	Bali	0	4,635,609,230	290,777,750	6,274,385,395	0	0	0	237,890,345,908	
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	222,045,000	4,939,454,000	568,879,500	0	0	0	778,249,000	74,764,823,400	
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	624,000,000	9,044,026,750	1,040,337,750	2,816,058,500	0	0	15,382,198,100	81,215,670,070	
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	0	19,732,277,250	1,808,915,750	0	0	0	151,570,000	89,809,042,400	
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	228,480,000	3,630,000,000	340,600,000	0	0	0	0	66,363,453,000	
6	Kab. Bangli	30	Bali	0	285,000,000	546,695,000	746,250,000	0	0	8,707,520,000	31,555,661,736	
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	0	238,149,800	206,216,000	29,846,650,418	0	0	0	71,077,227,475	
8	Kab. Bantul	5	Yogyakarta	0	782,105,000	2,643,890,552	0	0	0	0	117,039,997,569	
9	Kab. Bantaeng	4	Jawa Tengah	65,000,000	6,266,578,500	1,176,100,000	1,502,585,000	0	0	299,750,000	44,804,038,635	
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	138,250,000	10,287,196,000	798,566,000	65,550,000	83,049,500	0	0	166,420,000	51,014,040,460
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	0	11,820,199,300	8,542,069,000	0	0	0	0	380,238,444,026	
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	0	106,213,313,550	4,800,087,000	0	0	0	0	341,634,935,880	
13	Kab. Buleleng	30	Bali	0	7,977,270,238	4,205,587,780	10,022,235,600	0	0	0	106,670,978,851	
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	0	233,545,172	66,069,135	140,415,960	0	0	0	12,084,562,179	
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	0	4,760,500,000	2,998,650,000	1,474,350,000	1,595,000,000	0	0	130,059,003,772	
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	0	806,894,000	884,550,000	787,000,000	0	1,478,130,000	70,000,000	63,382,798,000	
17	Kab. Gianyar	30	Bali	0	509,998,375	2,146,152,440	2,209,229,400	0	0	0	43,646,490,053	
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	0	8,089,605,000	195,000,000	388,450,000	66,750,000	2,150,865,000	372,958,275	44,057,647,739	
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	0	30,112,851,534	3,244,247,354	2,672,446,905	0	0	4,378,014,257	50,158,890,500	
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	98,171,752,000	
21	Kab. Jember	30	Bali	0	2,165,302,000	55,899,025	2,420,285,000	3,365,491,750	0	0	44,804,038,635	
22	Kab. Jember	25	Sulawesi Selatan	0	4,446,047,500	53,650,706,500	715,650,000	0	0	0	64,465,032,600	
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	299,379,500	1,942,526,950	922,432,000	0	0	0	0	97,545,976,674	
24	Kab. Karangasem	30	Bali	0	341,531,200	932,195,300	4,932,609,600	37,000,000	0	0	45,801,647,025	
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	0	2,664,650,000	295,000,000	1,822,492,000	0	0	0	102,327,022,000	
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	0	1,967,500,000	6,574,455,000	0	0	0	0	98,629,710,957	
27	Kab. Klungkung	30	Bali	0	502,532,900	518,806,916	2,231,585,100	0	0	0	41,946,222,885	
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	0	94,061,000	0	0	0	0	2,943,313,600	53,879,538,560	
30	Kab. Lebak	3	Banten	0	886,182,000	2,601,328,750	0	1,332,300,000	0	75,000,000	102,705,329,500	
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	0	491,579,000	177,700,000	878,127,883	641,449,000	0	0	72,037,977,875	
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	0	13,189,144,200	240,842,200	1,024,485,400	0	0	27,851,500	67,671,808,002	
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	0	1,501,980,500	2,640,262,423	2,286,911,000	0	0	693,441,000	62,308,850,080	
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	148,978,000	1,489,569,100	8,499,240,700	0	890,284,600	0	0	172,044,373,600	
35	Kab. Naganjok	6	Jawa Timur	0	764,250,000	190,000,000	1,500,000,000	0	0	0	12,313,018,000	116,625,371,905
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	181,000,000	2,633,415,800	1,396,525,000	0	1,316,450,000	0	0	318,300,000	67,662,133,650
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	0	360,300,000	200,000,000	0	865,775,000	0	0	34,925,062,000	
38	Kab. Pidie	7	Aceh	0	2,134,435,525	967,059,803	75,880,000	2,277,504,000	0	11,849,512,175	58,199,567,288	
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	0	101,200,000	649,911,795	0	0	0	310,000,000	37,940,503,336	
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	0	475,000,000	85,000,000	15,990,053,000	0	0	0	118,096,737,191	
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	3,510,105,000	671,030,750	522,183,550	0	0	0	0	69,695,229,705	
42	Kab. Sijai	25	Sulawesi Selatan	0	993,313,000	799,842,000	1,407,604,000	0	0	13,027,792,920	46,739,294,880	
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Kab. Tabanan	30	Bali	0	405,000,000	555,000,000	2,171,700,000	215,000,000	0	0	560,000,000	62,780,789,204
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	0	9,548,354,250	1,460,910,400	0	0	0	320,232,000	79,666,030,358	
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	1,200,000,000	8,105,336,300	251,765,000	432,285,000	0	0	150,000,000	55,259,403,300	
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	0	6,602,146,500	3,516,325,490	0	0	0	0	337,288,587,538	
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	0	255,000,000	40,000,000	11,282,756,585	300,000,000	0	0	60,503,228,485	
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	0	125,000,000	367,373,000	0	0	0	0	60,976,818,226	
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	0	599,415,000	7,636,181,000	103,702,500	392,860,000	0	107,600,000	39,172,228,000	
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	0	16,522,501,000	0	0	0	0	0	48,406,562,670	
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	0	0	17,032,200	531,808,025	0	0	342,050,000	29,566,924,750	
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	0	2,372,676,000	43,424,131,680	0	0	0	0	114,521,134,680	
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	110,107,550	1,129,178,150	5,431,587,100	2,918,820,900	0	0	0	38,566,874,080	
56	Kota Denpasar	30	Bali	0	2,039,675,000	4,608,002,730	6,389,845,275	0	0	2,695,911,655	118,633,720,773	
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	204,631,762,530	323,978,959,330	
58	Kota Jambi	23	Jambi	0	1,340,947,500	1,288,672,000	0	0	0	6,090,997,700	69,888,375,000	
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	0	444,380,000	101,771,000	0	0	0	546,346,300	34,715,150,500	
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	0	1,208,493,000	5,334,818,000	0	0	0	0	43,223,749,000	
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	0	7,720,763,500	235,230,500	0	0	0	1,004,258,500	87,726,713,616	
62	Kota Parepare	25	Sulawesi Selatan	0	205,905,600	857,799,000	0	0	0	0	37,192,079,148	
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	0	1,075,312,000	178,095,000	3,261,792,000	0	0	679,041,000	81,784,470,000	
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	0	1,335,614,400	1,905,266,200	0	85,412,000	0	40,228,000	45,227,171,750	
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	0	2,213,481,700	0	0	0	0	0	225,486,043,400	
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	0	23,901,100,900	0	0	0	0	0	151,077,340,500	
Jumlah kabupaten + kota				6,727,345,050	357,330,405,924	195,632,742,273	121,324,000,446	13,464,325,850	3,628,995,000	389,083,336,512	5,861,910,112,522	
Jumlah 47 kabupaten				6,617,237,500	288,238,815,674	120,690,457,373	96,835,275,161	12,686,053,850	3,628,995,000	72,945,140,827	5,913,973,981,076	
Jumlah 20 kota				110,107,550	69,091,590,250	74,942,284,900	24,488,725,285	778,272,000	0	316,138,195,685	1,947,936,131,446	

Berdasarkan Tabel 4.19B maka belanja langsung tahun 2015 terdapat 16 program dengan nilai sebesar Rp5.257.400,6 juta. Alokasi terbesar pada program 7, wajib belajar pendidikan dasar sebesar Rp2.323.683,7 juta, program 8 pendidikan menengah sebesar Rp1.236.517,0 juta, sedangkan program yang tidak terkait dengan pendidikan seperti administrasi perkantoran juga cukup besar sebesar Rp274.780,4 juta. Sebaliknya, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya, capaian kinerja, dan kebudayaan.

Tabel 4.19B (lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Program
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	10. PKLK	11. Mutu PTK	12. Pelayanan Pend	13. Pemuda & OR	14. Kebud	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Badung	30	Bali	0	4,021,108,350	219,521,300	6,768,137,640	0	0	0	260,457,728,874
2	Kab. Bangk	11	Bangka Belitung	160,800,000	4,104,250,920	958,264,380	0	0	0	1,476,547,000	79,061,019,866
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	594,800,000	10,009,944,500	922,000,000	3,931,290,900	0	0	16,468,278,500	80,106,420,500
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	0	20,031,717,400	1,433,000,000	0	0	0	165,000,000	78,564,978,950
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	323,400,000	3,169,800,000	340,600,000	0	0	0	570,580,000	78,793,599,000
6	Kab. Bangli	30	Bali	0	2,855,837,800	301,500,000	1,001,000,000	0	0	100,000,000	35,329,654,174
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	0	573,743,100	234,011,000	6,974,333,150	0	0	0	48,754,724,050
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	0	2,016,023,503	2,691,226,100	0	0	0	4,106,058,500	97,186,640,453
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	60,000,000	7,481,621,000	992,750,000	1,249,965,000	0	0	50,000,000	65,073,378,328
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	141,350,000	6,997,817,000	1,885,738,250	15,100,000	1,367,414,500	0	0	54,403,041,509
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	0	14,810,597,600	6,753,647,000	0	0	0	0	342,171,628,150
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	0	69,086,795,874	8,509,988,365	0	0	0	0	369,334,100,872
13	Kab. Buleleng	30	Bali	0	10,549,859,160	2,384,172,788	18,321,771,300	0	0	0	85,653,129,139
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	0	238,311,400	66,736,500	142,404,000	0	0	0	12,251,349,119
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	0	900,000,000	1,249,939,550	1,223,300,000	2,255,000,000	0	0	87,518,286,578
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	0	2,640,000,000	2,120,000,000	2,857,000,000	0	1,000,000,000	0	85,342,994,000
17	Kab. Gianyar	30	Bali	0	1,889,166,260	1,038,982,700	2,606,949,400	0	0	0	39,810,848,076
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	0	96,144,500	103,165,000	631,743,500	94,490,000	646,100,000	1,306,022,500	48,880,581,144
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	0	29,698,774,409	7,375,491,140	1,954,083,393	0	0	3,402,686,380	32,429,475,278
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	0	145,000,000	5,354,706,000	0	75,000,000	0	340,000,000	118,725,493,000
21	Kab. Jember	30	Bali	0	763,384,500	1,296,881,598	3,135,520,500	32,129,000	0	0	125,463,427,122
22	Kab. Jenepono	25	Sulawesi Selatan	0	3,356,842,950	46,051,463,500	1,579,575,500	0	0	0	63,500,000,000
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	509,550,000	4,781,756,000	1,171,915,500	0	0	0	0	105,704,649,132
24	Kab. Karangasem	30	Bali	594,800,000	10,009,944,500	922,000,000	3,931,290,900	0	0	16,468,278,500	80,106,420,500
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	0	2,349,200,000	295,000,000	1,383,276,000	0	0	670,000,000	74,593,632,000
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	0	4,997,300,000	7,192,904,000	0	0	0	0	88,972,910,750
27	Kab. Klungkung	30	Bali	0	719,797,375	414,371,162	2,311,777,100	0	0	0	40,613,512,139
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	0	9,808,048,720	237,495,500	0	0	0	20,000,000	47,040,144,475
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	0	94,061,000	0	0	0	0	2,943,313,600	11,231,065,000
30	Kab. Lebak	3	Bariten	0	1,990,688,000	613,250,600	0	1,260,349,900	0	35,000,000	111,691,537,562
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	382,868,800	535,382,300	1,459,585,000	1,350,000,000	0	0	471,745,480	65,828,003,680
32	Kab. Lombok Barat	31	Nusa Tenggara Barat	0	13,074,529,400	1,651,667,200	814,035,000	0	0	18,341,500	77,205,690,687
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	0	1,771,778,023	3,358,565,000	3,765,760,300	0	0	708,391,000	78,322,290,498
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	137,893,000	2,582,831,050	10,753,654,500	0	3,280,483,550	0	0	160,858,604,000
35	Kab. Naganjuk	6	Jawa Timur	0	630,550,000	240,000,000	1,570,000,000	0	0	11,176,068,000	77,778,982,260
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	0	2,036,050,000	3,279,336,150	0	1,109,200,000	0	1,121,500,000	79,600,325,550
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	0	0	55,000,000	0	435,000,000	0	0	36,748,305,000
38	Kab. Pidie	7	Aceh	1,067,296,200	2,928,000,000	630,346,000	0	0	0	8,712,593,000	65,131,415,753
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	0	438,000,000	530,000,000	0	0	0	240,000,000	39,918,086,292
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	0	150,000,000	1,745,000,000	33,573,000,000	0	0	0	134,910,361,206
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	135,112,500	864,172,500	1,871,349,200	0	0	0	0	92,887,606,296
42	Kab. Sijunjung	25	Sulawesi Selatan	0	833,119,600	857,481,800	1,209,856,800	0	0	13,048,888,500	47,167,246,512
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kab. Tabanan	30	Bali	0	518,600,000	1,084,800,000	2,800,000,000	0	0	885,000,000	63,352,031,300
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	0	12,603,820,900	1,085,493,600	0	0	0	0	92,274,681,280
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	0	650,000,000	606,767,000	0	0	0	0	57,502,381,300
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	0	7,507,955,900	2,955,589,500	0	0	0	151,000,000	63,672,594,050
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	0	4,565,590,000	6,274,647,190	0	0	0	0	201,962,409,595
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	0	265,000,000	40,000,000	1,215,000,000	364,000,000	0	0	59,340,870,532
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	0	100,180,000	342,336,500	0	0	0	0	59,430,918,226
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	0	258,345,000	6,855,759,500	155,350,000	109,235,000	0	112,400,000	35,960,600,000
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	0	1,098,461,000	0	0	0	0	0	39,339,284,170
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	490,922,000	0	0	4,094,700,000
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	0	2,508,300,000	58,009,600,000	0	0	0	0	115,683,786,822
55	Kota Sukitingsi	6	Sumatera Barat	24,496,300	0	206,787,702	297,239,280	0	0	0	3,438,177,625
56	Kota Denpasar	30	Bali	0	1,579,755,970	5,661,197,050	7,425,624,115	0	0	2,193,446,155	101,869,836,442
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	256,156,381,048	268,757,683,698
58	Kota Jambi	23	Jambi	0	1,301,252,550	271,916,000	0	0	0	593,027,000	47,222,845,920
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	0	904,550,000	59,321,000	0	129,985,000	0	40,200,000	40,921,626,700
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	0	1,777,861,000	3,904,668,000	100,000,000	0	0	111,950,000	37,084,845,000
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	0	12,701,786,500	775,570,000	0	0	0	1,307,643,200	82,735,062,763
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	20,000,000	354,428,000	924,560,750	0	0	0	0	35,089,923,300
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	0	729,000,000	265,269,000	3,769,900,000	0	0	139,000,000	82,012,074,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	0	923,149,000	1,557,702,200	0	0	0	53,087,000	46,250,585,614
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kota Tangerang Selatan	3	Bariten	0	2,173,672,100	0	0	0	0	0	175,191,983,047
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	0	28,211,763,175	0	0	0	0	0	177,027,337,676
Jumlah kabupaten + kota				4,152,366,800	336,765,399,789	219,908,691,775	118,064,283,778	11,003,208,950	1,646,100,000	345,362,426,872	5,715,439,436,534
Jumlah 47 kabupaten				4,107,870,500	277,312,305,494	134,759,356,883	105,101,170,383	9,909,066,950	1,646,100,000	84,655,292,469	4,102,024,885,403
Jumlah 20 kota				44,496,300	59,453,094,295	85,149,334,892	12,963,113,395	1,094,142,000	0	260,707,134,403	1,613,414,551,130

4. Persentase Belanja Langsung menurut Program

Berdasarkan Tabel 4.20A maka di kabupaten/kota sampel pada tahun 2014 mengalokasikan belanja terbesar pada program 7 wajar dikdas sebesar 48,51%, dengan rata-rata kabupaten sebesar 48,78% dan kota sebesar 47,97%, diikuti program 8 dikmen sebesar 22,49% dengan rata-rata kabupaten sebesar 25,47% dan kota sebesar 16,50%. Alokasi belanja untuk program 3, program 5, program 10, program 14, dan program 15 sangat kecil kurang dari 1%.

kepemudaan dan olahraga sebesar 2,07%, dan kebudayaan sebesar 0,23%, sedangkan bukan institusi pendidikan sebesar 13,41%.

Tabel 4.21A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

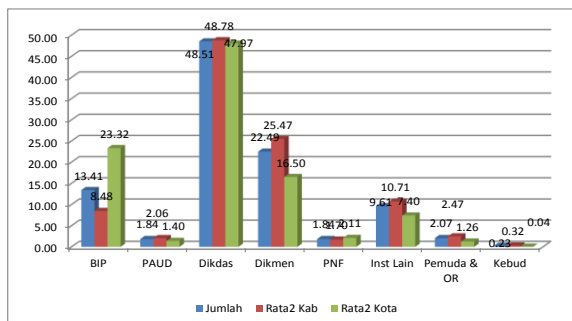
No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Bukan institusi pendidikan		PAUD		Pendidikan Dasar		Pendidikan Menengah	
				Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%
1	Kab. Badung	30	Bali	30,441,525,975	12.80	574,265,700	0.24	172,738,594,666	72.61	21,101,981,217	8.87
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	5,301,977,200	7.09	0	0.00	44,545,496,200	59.58	17,821,842,500	23.84
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	20,065,491,500	24.71	3,144,067,770	3.87	32,409,713,300	39.91	11,564,524,500	14.24
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	4,272,905,000	4.76	5,364,900,000	5.97	38,565,136,800	42.94	19,071,207,600	21.24
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	1,640,392,000	2.47	4,785,515,000	7.21	25,525,799,000	38.46	28,599,435,000	43.10
6	Kab. Bangli	30	Bali	9,741,562,000	30.87	0	0.00	14,029,074,342	44.46	6,192,080,394	19.62
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	1,555,628,500	2.19	1,108,224,000	1.56	25,629,398,850	36.06	12,081,589,407	17.00
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	3,274,189,892	2.80	1,321,562,500	1.13	62,090,893,574	53.05	39,854,191,051	34.05
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	5,409,889,928	10.90	1,569,925,000	3.16	24,422,169,000	49.19	9,058,195,000	18.24
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	4,381,055,960	8.59	2,837,980,000	5.56	17,875,754,500	35.04	14,243,895,000	27.92
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	32,294,169,000	8.49	5,739,350,000	1.51	168,838,822,642	44.40	150,062,645,584	39.47
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	9,417,630,400	2.76	1,480,343,000	0.43	136,226,627,120	39.87	66,129,348,100	19.36
13	Kab. Buleleng	30	Bali	7,019,164,766	6.58	3,085,106,300	2.89	49,943,117,973	46.82	23,974,494,694	22.48
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	1,919,850,356	15.89	86,225,202	0.71	7,243,470,167	59.94	2,154,726,131	17.83
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	2,524,682,500	1.94	240,000,000	0.18	60,042,668,718	46.17	52,088,762,554	40.05
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	8,677,900,000	13.69	591,000,000	0.93	27,263,468,000	43.01	22,019,856,000	34.74
17	Kab. Gianyar	30	Bali	2,574,881,381	5.90	1,195,910,700	2.74	26,503,530,850	60.72	8,506,786,907	19.49
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	3,536,846,109	8.03	0	0.00	19,756,181,314	44.84	9,697,424,516	22.01
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	5,785,617,757	11.53	203,880,000	0.41	0	0.00	4,900,000,000	9.77
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	2,275,276,000	2.32	0	0.00	95,896,476,000	97.68	0	0.00
21	Kab. Jember	30	Bali	1,395,683,375	3.12	844,250,500	1.88	17,305,456,928	38.62	16,750,979,157	37.39
22	Kab. Jenepon	25	Sulawesi Selatan	3,670,803,600	5.69	922,800,000	1.43	856,025,000	1.33	95,000,000	0.15
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	6,049,566,559	6.20	463,668,225	0.48	75,625,286,640	77.53	11,596,324,300	11.89
24	Kab. Karangasem	30	Bali	4,245,711,802	9.27	1,698,774,250	3.71	16,778,123,299	36.63	16,147,120,374	35.25
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	14,734,312,000	14.40	3,750,900,000	3.67	45,659,174,000	44.62	33,317,994,000	32.56
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	5,941,354,657	6.02	2,980,695,000	3.02	55,954,650,800	56.73	24,306,055,500	24.64
27	Kab. Klungkung	30	Bali	5,722,110,997	13.64	1,765,749,000	4.21	20,203,180,681	48.16	10,402,061,341	24.80
28	Kab. Kotawaringin Ti	17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	8,233,145,000	15.28	275,000,000	0.51	26,983,951,560	50.08	18,293,381,000	33.95
30	Kab. Lebak	3	Banten	2,564,828,250	2.50	3,008,285,000	2.93	55,574,468,000	54.11	35,669,713,000	34.73
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	2,641,122,000	3.67	1,952,238,000	2.71	41,224,255,487	57.23	22,691,388,505	31.50
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	1,671,863,452	2.47	899,524,250	1.33	31,781,748,100	46.96	18,524,020,300	27.37
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	12,158,284,640	19.60	1,905,425,000	3.07	18,622,152,787	30.02	22,293,845,650	35.94
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	12,329,605,400	7.17	2,359,166,000	1.37	94,160,950,300	54.73	48,824,485,000	28.38
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	14,228,867,000	12.20	4,572,777,500	3.92	66,100,746,625	56.68	29,060,230,780	24.92
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	1,378,635,000	2.04	3,643,698,500	5.39	31,795,793,130	46.99	22,470,616,220	33.21
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	8,313,217,000	23.80	350,000,000	1.00	14,617,555,560	41.85	9,275,627,440	26.56
38	Kab. Pidie	7	Aceh	15,517,611,945	26.66	3,211,063,050	5.52	22,254,570,215	38.24	9,487,932,750	16.30
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	4,036,753,065	10.64	1,429,382,000	3.77	16,162,872,437	42.60	15,482,034,039	40.81
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	6,017,595,191	5.10	645,000,000	0.55	65,864,922,500	55.77	28,469,166,500	24.11
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	7,095,306,370	10.18	3,229,215,000	4.63	28,434,118,568	40.80	22,723,165,467	32.60
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	15,511,123,420	33.19	2,125,220,820	4.55	9,145,798,200	19.57	16,172,690,940	34.60
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	0	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	9,333,603,000	14.87	275,000,000	0.44	37,182,791,200	59.23	12,477,695,000	19.88
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	3,998,768,287	5.02	4,235,044,560	5.32	40,507,393,223	50.85	19,435,006,288	24.40
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	0	-	-	-	-	-	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	2,888,746,750	5.23	842,000,000	1.52	27,011,215,250	48.88	13,820,494,500	25.01
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	16,986,189,800	50.4	4,501,700,000	1.33	252,167,353,246	74.76	47,600,022,502	14.11
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	6,395,452,900	10.57	1,498,000,000	2.48	23,645,111,000	39.08	16,723,908,000	27.64
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	4,023,518,212	6.60	6,058,443,000	9.94	33,861,469,226	55.53	16,106,716,988	26.41
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	2,379,566,500	6.07	481,550,000	1.23	18,249,572,400	46.59	9,286,015,600	23.71
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	6,816,034,170	14.08	608,115,600	1.26	17,003,699,000	35.13	6,626,542,900	13.69
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	4,380,033,875	14.81	33,263,250	0.11	14,277,444,400	48.29	10,288,089,000	34.80
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	2,109,550,000	1.84	0	0.00	39,226,147,000	34.25	26,593,630,000	23.22
55	Kota Bukittinggi	9	Sumatera Barat	2,007,844,500	5.21	185,303,300	0.48	8,986,554,650	23.30	17,209,892,530	44.62
56	Kota Denpasar	30	Bali	10,720,037,801	9.04	381,194,710	0.32	76,582,966,051	64.55	17,105,621,380	14.42
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	310,553,428,430	95.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
58	Kota Jambi	23	Jambi	9,268,607,600	13.26	2,580,250,000	3.69	33,005,186,000	47.23	22,127,711,900	31.66
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	3,031,217,800	8.73	41,875,000	0.12	19,592,477,200	56.44	11,503,429,500	33.14
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	4,784,997,000	11.07	252,640,000	0.58	23,203,031,000	53.68	8,042,330,000	18.61
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	7,422,505,550	8.46	5,262,922,417	6.00	47,769,469,769	54.45	18,792,977,080	21.42
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	1,358,371,273	3.65	385,000,000	1.04	21,461,409,174	57.70	12,548,594,101	33.74
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	9,845,959,000	12.04	736,380,000	0.90	41,465,406,000	50.70	12,278,324,000	15.01
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	6,425,818,200	14.21	139,372,000	0.31	21,796,919,600	48.19	12,176,765,350	26.92
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	0	-	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	29,893,067,166	13.26	2,733,315,900	1.21	136,776,416,419	60.66	52,543,066,215	23.30
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	15,806,273,525	10.46	1,435,665,000	0.95	105,359,130,450	69.74	3,826,064,375	2.53
Jumlah kabupaten + kota				785,997,728,286	13.41	108,028,122,004	1.84	2,843,783,356,091	48.51	1,318,289,715,631	22.49
Jumlah 47 kabupaten				331,487,254,984	8.48	80,713,131,827	2.06	1,909,353,593,506	48.78	996,910,014,210	25.47
Jumlah 20 kota				454,208,473,302	23.32	27,314,990,177	1.40	934,429,762,585	47.97	321,379,701,421	16.50

Tabel 4.21A (lanjutan)
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

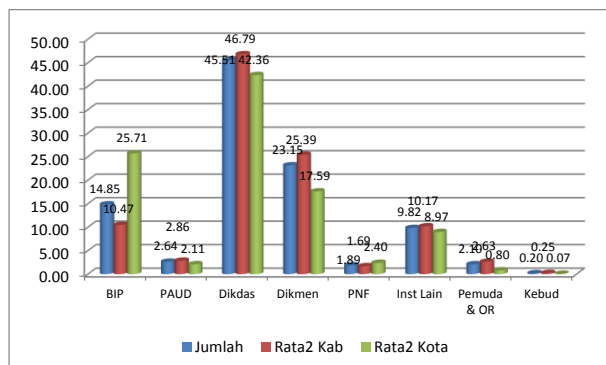
No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	PNF		Institusi Lain		Pemuda dan OR		Kebudayaan		Jumlah
				Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	
1	Kab. Badung	30	Bali	1,833,205,975	0.77	4,926,386,980	2.07	6,274,385,395	2.64	0	0.00	237,890,345,908
2	Kab. Bangk	11	Bangka Belitung	1,365,129,000	1.83	5,730,378,500	7.66	0	0.00	0	0.00	74,764,823,400
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	507,450,000	0.62	10,708,364,500	13.19	2,816,058,500	3.47	0	0.00	81,215,670,070
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	993,700,000	1.11	21,541,193,000	23.99	0	0.00	0	0.00	89,809,042,400
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	1,613,232,000	2.43	4,199,080,000	6.33	0	0.00	0	0.00	66,363,453,000
6	Kab. Bangli	30	Bali	15,000,000	0.05	831,695,000	2.64	746,250,000	2.36	0	0.00	31,555,661,736
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	411,370,500	0.58	444,365,800	0.63	29,846,650,418	41.99	0	0.00	71,077,227,475
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	7,073,165,000	6.04	3,425,995,552	2.93	0	0.00	0	0.00	117,039,997,569
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	180,122,500	0.36	7,507,678,500	15.12	1,502,585,000	3.03	0	0.00	49,650,564,928
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	302,743,500	0.59	11,224,012,000	22.00	65,550,000	0.13	83,049,500	0.16	51,014,040,460
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	2,941,188,500	0.77	20,362,268,300	5.36	0	0.00	0	0.00	380,238,444,026
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	17,367,586,710	5.08	111,013,400,550	32.49	0	0.00	0	0.00	341,634,935,880
13	Kab. Buleleng	30	Bali	444,001,500	0.42	12,182,858,018	11.42	10,022,235,600	9.40	0	0.00	106,670,978,851
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	240,260,056	1.99	299,614,307	2.48	140,415,960	1.16	0	0.00	12,084,562,179
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	4,334,390,000	3.33	7,759,150,000	5.97	1,474,350,000	1.13	1,595,000,000	1.23	130,059,003,772
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	874,000,000	1.38	3,169,574,000	5.00	787,000,000	1.24	0	0.00	63,382,798,000
17	Kab. Gianyar	30	Bali	0	0.00	2,656,150,815	6.09	2,209,229,400	5.06	0	0.00	43,646,490,053
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	176,525,800	0.40	10,435,470,000	23.69	388,450,000	0.88	66,750,000	0.15	44,057,647,739
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	3,239,846,950	6.46	33,357,098,888	66.50	2,672,446,905	5.33	0	0.00	50,158,690,500
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	98,171,752,000
21	Kab. Jember	30	Bali	500,690,900	1.12	2,221,201,025	4.96	2,420,285,000	5.40	3,365,491,750	7.51	44,804,038,635
22	Kab. Jenepon	25	Sulawesi Selatan	108,000,000	0.17	58,096,754,000	90.12	715,650,000	1.11	0	0.00	64,465,032,600
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	646,792,500	0.66	3,164,338,450	3.24	0	0.00	0	0.00	97,545,976,674
24	Kab. Karangasem	30	Bali	688,581,200	1.50	1,273,726,500	2.78	4,932,609,600	10.77	37,000,000	0.08	45,801,647,025
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	82,500,000	0.08	2,959,650,000	2.89	1,822,492,000	1.78	0	0.00	102,327,022,000
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	905,000,000	0.92	8,541,955,000	8.66	0	0.00	0	0.00	98,629,710,957
27	Kab. Klungkung	30	Bali	600,195,950	1.43	1,021,339,816	2.43	2,231,585,100	5.32	0	0.00	41,946,022,885
28	Kab. Kotawaringin Ti	17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	0	0.00	94,061,000	0.17	0	0.00	0	0.00	53,879,538,560
30	Kab. Lebak	3	Banten	1,068,224,500	1.04	3,487,510,750	3.40	0	0.00	1,332,300,000	1.30	102,705,329,500
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	1,340,118,000	1.86	669,279,000	0.93	878,127,883	1.22	641,449,000	0.89	72,037,977,875
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	340,180,100	0.50	13,429,986,400	19.85	1,024,485,400	1.51	0	0.00	67,671,808,002
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	629,988,000	1.02	4,142,242,923	6.68	2,286,911,000	3.69	0	0.00	62,038,850,000
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	3,342,094,500	1.94	10,137,787,800	5.89	0	0.00	890,284,600	0.52	172,044,373,600
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	208,500,000	0.18	954,250,000	0.82	1,500,000,000	1.29	0	0.00	116,625,371,905
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	2,846,000,000	4.21	4,210,940,800	6.22	0	0.00	1,316,450,000	1.95	67,662,133,650
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	942,587,000	2.70	560,300,000	1.60	0	0.00	865,775,000	2.48	34,925,062,000
38	Kab. Pidie	7	Aceh	2,273,510,000	3.91	3,301,495,328	5.33	75,880,000	0.13	2,277,504,000	0.89	58,199,567,288
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	78,350,000	0.21	751,111,795	1.98	0	0.00	0	0.00	37,940,503,336
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	550,000,000	0.47	560,000,000	0.47	15,990,053,000	13.54	0	0.00	118,096,737,191
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	3,510,105,000	5.04	4,703,319,300	6.75	0	0.00	0	0.00	69,695,229,705
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	583,702,500	1.25	1,793,155,000	3.84	1,407,604,000	3.01	0	0.00	46,739,294,880
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	165,000,000	0.26	960,000,000	1.53	2,171,700,000	3.46	215,000,000	0.34	62,780,789,204
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	480,553,350	0.60	11,009,264,650	13.82	0	0.00	0	0.00	79,666,030,358
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	707,560,500	1.28	9,557,101,300	17.29	432,285,000	0.78	0	0.00	55,259,403,300
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	5,914,850,000	1.75	10,118,471,990	3.00	0	0.00	0	0.00	337,288,587,538
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	363,000,000	0.60	295,000,000	0.49	11,282,756,585	18.65	300,000,000	0.50	60,503,228,485
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	434,297,800	0.71	492,373,000	0.81	0	0.00	0	0.00	60,976,818,226
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	43,365,000	0.11	8,235,596,000	21.02	103,702,500	0.26	392,860,000	1.00	39,172,228,000
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	829,670,000	1.71	16,522,501,000	34.13	0	0.00	0	0.00	48,406,562,670
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	39,254,000	0.13	17,032,200	0.06	531,808,025	1.80	0	0.00	29,566,924,750
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	795,000,000	0.69	45,796,807,680	39.99	0	0.00	0	0.00	114,521,134,680
55	Kota Bukittinggi	9	Sumatera Barat	587,585,400	1.52	6,670,872,800	17.30	2,918,820,900	7.57	0	0.00	38,566,874,080
56	Kota Denpasar	30	Bali	806,377,826	0.68	6,647,677,730	5.60	6,389,845,275	5.39	0	0.00	118,633,720,773
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	13,425,530,900	4.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	323,978,959,330
58	Kota Jambi	23	Jambi	277,000,000	0.40	2,629,619,500	3.76	0	0.00	0	0.00	69,888,375,000
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	0	0.00	546,151,000	1.57	0	0.00	0	0.00	34,715,150,500
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	397,440,000	0.92	6,543,311,000	15.14	0	0.00	0	0.00	43,223,749,000
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	522,844,800	0.60	7,955,994,000	9.07	0	0.00	0	0.00	87,726,713,616
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	375,000,000	1.01	1,063,704,600	2.86	0	0.00	0	0.00	37,192,079,148
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	12,943,202,000	15.83	1,253,407,000	1.53	3,261,792,000	3.99	0	0.00	81,784,470,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	1,362,004,000	3.01	3,240,880,600	7.17	0	0.00	85,412,000	0.19	45,227,171,750
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	1,326,696,000	0.59	2,213,481,700	0.98	0	0.00	0	0.00	225,486,043,400
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	749,106,250	0.50	23,901,100,900	15.82	0	0.00	0	0.00	151,077,340,500
Jumlah kabupaten + kota				107,703,375,967	1.84	563,319,488,247	9.61	121,324,000,446	2.07	13,464,325,850	0.23	5,861,910,112,522
Jumlah 47 kabupaten				66,511,151,991	1.70	419,175,505,547	10.71	96,835,275,161	2.47	12,686,053,850	0.32	3,913,973,981,076
Jumlah 20 kota				41,192,223,976	2.11	144,143,982,700	7.40	24,488,725,285	1.26	778,272,000	0.04	1,947,936,131,446

Persentase belanja langsung tahun 2015 terdapat pada Tabel 4.21B maka wajar dikdas menduduki porsi tertinggi sebesar 46,74%, dikmen sebesar 21,92%, PAUD sebesar 2,65%, PNF sebesar 1,88%, institusi lain sebesar 9,76%, program kepemudaan dan olahraga sebesar 2,11%, dan kebudayaan sebesar 0,20%, sedangkan bukan institusi pendidikan sebesar 14,91%.

Grafik 4.18A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten dan Rata-rata Kota, Tahun 2014



Grafik 4.18B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Kabupaten/Kota, Rata-rata Kabupaten dan Rata-rata Kota, Tahun 2015



Tabel 4.21B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Bukan institusi pendidikan		PAUD		Pendidikan Dasar		Pendidikan Menengah	
				Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%
1	Kab. Badung	30	Bali	22,641,706,525	8.69	4,547,397,950	1.75	204,934,263,752	78.68	14,643,320,215	5.62
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	2,575,135,400	3.26	1,967,396,500	2.49	45,871,383,756	58.02	22,038,358,910	27.88
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	20,741,591,900	25.89	3,790,992,900	4.73	27,474,700,000	34.30	12,450,367,500	15.54
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	4,698,603,000	5.98	6,781,660,000	8.63	27,448,632,400	34.94	16,977,366,150	21.61
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	2,195,281,000	2.79	5,094,255,000	6.47	42,494,252,000	53.93	23,583,649,000	29.93
6	Kab. Bangli	30	Bali	12,217,014,000	34.58	52,000,000	0.15	10,270,344,270	29.07	8,601,958,104	24.35
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	2,308,279,500	4.73	1,244,859,000	2.55	23,920,003,250	49.06	13,088,124,550	26.84
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	7,588,449,900	7.81	10,983,281,000	11.30	44,335,851,800	45.62	29,221,173,150	30.07
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	4,083,073,590	6.27	1,345,750,000	2.07	41,407,433,738	63.63	8,253,785,000	12.68
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	3,442,285,000	6.33	4,381,537,500	8.05	27,050,456,560	49.72	9,010,635,699	16.56
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	52,408,279,000	15.32	6,043,511,600	1.77	112,116,344,500	32.77	147,072,490,600	42.98
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	8,198,449,400	2.22	2,101,377,300	0.57	162,132,862,512	43.90	98,390,162,560	26.64
13	Kab. Buleleng	30	Bali	4,013,448,940	4.69	291,600,000	0.34	34,198,978,975	39.93	15,479,697,976	18.07
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	1,942,843,294	15.86	87,984,900	0.72	7,331,584,900	59.84	2,198,549,725	17.95
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	4,791,794,650	5.48	475,000,000	0.54	49,657,043,024	56.74	26,016,209,354	29.73
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	9,522,000,000	11.16	1,104,770,000	1.29	44,600,697,000	52.26	20,209,527,000	23.68
17	Kab. Gianyar	30	Bali	4,435,625,854	11.14	852,081,700	2.14	23,264,654,312	58.44	5,691,457,850	14.30
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	9,591,229,231	19.62	346,500,000	0.71	24,346,397,529	49.81	12,983,696,384	26.56
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	5,008,091,286	9.55	204,325,000	0.39	0	0.00	4,900,000,000	9.35
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	1,943,937,000	1.64	100,000,000	0.08	36,852,091,000	31.04	73,255,556,000	61.70
21	Kab. Jembrana	30	Bali	7,031,671,101	5.60	2,997,997,660	2.39	90,594,413,547	72.21	19,098,437,216	15.22
22	Kab. Jeneponto	25	Sulawesi Selatan	4,110,635,900	6.47	1,382,981,000	2.18	3,014,392,500	4.75	1,755,005,500	2.76
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	11,405,071,950	10.79	759,765,500	0.72	72,681,846,282	68.76	13,309,648,900	12.59
24	Kab. Karangasem	30	Bali	20,741,591,900	25.89	3,790,992,900	4.73	27,474,700,000	34.30	12,450,367,500	15.54
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	13,015,600,000	17.45	3,457,900,000	4.64	36,588,750,000	49.05	17,376,406,000	23.29
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	6,748,536,300	7.58	598,143,600	0.67	39,369,204,000	44.25	29,333,672,850	32.97
27	Kab. Klungkung	30	Bali	4,617,294,049	11.37	2,520,810,000	6.21	21,288,748,578	52.42	8,177,638,375	20.14
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	7,106,515,000	63.28	100,000,000	0.89	3,782,439,000	33.68	148,050,000	1.32
30	Kab. Lebak	3	Banten	4,202,070,500	3.76	2,563,679,024	2.30	56,308,493,513	50.41	43,698,949,025	39.12
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	2,445,272,580	3.71	1,991,793,000	3.03	31,751,525,000	48.23	24,246,017,000	36.83
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	1,545,740,500	2.00	884,166,800	1.14	36,501,608,141	47.22	22,189,044,046	28.70
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	21,881,713,453	27.94	2,267,734,000	2.90	19,604,179,292	25.03	24,665,002,380	31.49
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	10,456,985,800	6.50	3,700,220,200	2.30	80,377,205,400	49.97	45,484,020,500	28.28
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	12,360,991,000	15.89	5,613,441,500	7.22	47,966,176,200	61.67	9,147,823,560	11.76
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	4,312,830,000	5.42	4,990,750,000	6.27	39,963,598,400	50.21	20,998,061,000	26.38
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	6,396,005,000	17.40	125,000,000	0.34	16,923,206,202	46.05	12,719,093,798	34.61
38	Kab. Pidie	7	Aceh	11,848,545,909	18.19	6,480,256,000	9.95	24,720,246,834	37.95	15,020,224,809	23.06
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	3,703,300,000	9.28	1,601,308,000	4.01	15,048,280,912	37.70	18,488,197,380	46.32
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	2,659,565,700	1.97	1,090,000,000	0.81	63,218,143,528	46.86	30,574,651,978	22.66
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	7,420,190,450	7.99	3,492,553,800	3.76	42,932,753,078	46.22	32,757,742,268	35.27
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	16,378,192,074	34.72	2,231,464,820	4.73	16,949,348,798	35.93	8,131,921,720	17.24
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	0	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	19,492,546,800	30.77	365,000,000	0.58	29,325,788,500	46.29	9,295,296,000	14.67
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	5,373,203,500	5.82	8,999,328,000	9.75	43,383,627,930	47.02	19,713,207,600	21.36
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	9,826,183,800	-	-	-	-	-	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	19,187,789,950	30.14	542,180,000	0.85	20,766,608,700	32.61	12,144,427,500	19.07
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	19,954,978,359	9.88	6,121,250,000	3.03	116,841,985,846	57.85	40,511,183,200	20.06
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	6,760,858,600	11.39	1,499,410,000	2.53	32,047,766,674	54.01	15,644,835,258	26.36
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	4,613,548,000	7.76	7,036,755,612	11.84	31,358,670,254	52.76	15,595,130,060	26.24
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	1,178,599,000	3.28	419,300,000	1.17	16,974,649,500	47.20	9,963,932,000	27.71
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	6,754,596,970	17.17	1,900,233,000	4.83	19,691,417,950	50.06	9,405,544,250	23.91
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	2,868,927,500	70.06	6,719,500	0.16	530,126,000	12.95	53,763,500	1.31
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	3,601,179,360	3.11	1,307,825,000	1.13	28,019,413,320	24.22	21,009,469,142	18.16
55	Kota Bukittinggi	9	Sumatera Barat	72,742,900	2.12	92,555,150	2.69	1,398,147,759	40.67	1,295,722,664	37.69
56	Kota Denpasar	30	Bali	11,973,197,155	11.75	673,150,470	0.66	63,072,527,421	61.91	10,180,451,735	9.99
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	262,436,519,048	97.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00
58	Kota Jambi	23	Jambi	5,888,054,978	12.47	2,297,788,091	4.87	21,554,225,984	45.64	15,654,853,480	33.15
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	2,884,310,100	7.05	852,620,000	2.08	23,302,196,100	56.94	12,651,409,000	30.92
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	3,830,688,000	10.33	565,200,000	1.52	14,533,615,000	39.19	11,647,338,000	31.41
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	4,063,017,600	4.91	2,027,153,650	2.45	42,727,348,083	51.64	19,905,092,430	24.06
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	1,452,466,250	4.14	225,000,000	0.64	19,968,680,650	56.91	11,805,787,650	33.64
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	10,660,015,000	13.00	880,275,000	1.07	40,808,682,000	49.76	11,619,768,000	14.17
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	4,263,129,500	9.22	145,522,000	0.31	20,643,519,000	44.63	17,403,002,914	37.63
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	0	-	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	43,122,854,660	24.61	6,091,586,700	3.48	71,012,572,000	40.53	50,894,172,587	29.05
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	18,371,563,801	10.38	1,913,071,700	1.08	118,895,825,800	67.16	8,605,200,900	4.86
Jumlah kabupaten + kota				833,366,408,467	14.85	148,399,162,027	2.64	2,553,624,628,954	45.51	1,298,835,649,403	23.15
Jumlah 47 kabupaten				418,615,161,686	10.47	114,343,746,154	2.86	1,870,243,259,613	46.79	1,014,988,992,633	25.39
Jumlah 20 kota				414,751,246,781	25.71	34,055,415,873	2.11	683,381,369,341	42.36	283,846,656,770	17.59

Tabel 4.21B (Lanjutan)
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	PNF		Institusi Lain		Pemuda dan OR		Kebudayaan		Jumlah
				Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	Subjml	%	
1	Kab. Badung	30	Bali	2,682,273,142	1.03	4,240,629,650	1.63	6,768,137,640	2.60	0	0.00	260,457,728,874
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	1,385,430,000	1.75	5,223,315,300	6.61	0	0.00	0	0.00	79,061,019,866
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	190,732,800	0.24	11,526,744,500	14.39	3,931,290,900	4.91	0	0.00	80,106,420,500
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	1,194,000,000	1.52	21,464,717,400	27.32	0	0.00	0	0.00	78,564,978,950
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	1,592,362,000	2.02	3,833,800,000	4.87	0	0.00	0	0.00	78,793,599,000
6	Kab. Bangli	30	Bali	30,000,000	0.08	3,157,337,800	8.94	1,001,000,000	2.83	0	0.00	35,329,654,174
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	411,370,500	0.84	807,754,100	1.66	6,974,333,150	14.30	0	0.00	48,754,724,050
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	350,635,000	0.36	4,707,249,603	4.84	0	0.00	0	0.00	97,186,640,453
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	199,000,000	0.31	8,534,371,000	13.11	1,249,965,000	1.92	0	0.00	65,073,378,328
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	510,707,000	0.94	8,624,905,250	15.85	15,100,000	0.03	1,367,414,500	2.51	54,403,041,509
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	2,966,757,850	0.87	21,564,244,600	6.30	0	0.00	0	0.00	342,171,628,150
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	20,914,464,860	5.66	77,596,784,239	21.01	0	0.00	0	0.00	369,334,100,872
13	Kab. Buleleng	30	Bali	413,600,000	0.48	12,934,031,948	15.10	18,321,771,300	21.39	0	0.00	85,653,129,139
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	242,934,400	1.98	305,047,900	2.49	142,404,000	1.16	0	0.00	12,251,349,119
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	950,000,000	1.09	2,149,939,550	2.46	1,223,300,000	1.40	2,255,000,000	2.58	87,518,286,578
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	1,289,000,000	1.51	5,760,000,000	6.75	2,857,000,000	3.35	0	0.00	85,342,994,000
17	Kab. Gianyar	30	Bali	31,930,000	0.08	2,928,148,960	7.36	2,606,949,400	6.55	0	0.00	39,810,848,076
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	41,115,000	0.08	845,409,500	1.73	631,743,500	1.29	94,490,000	0.19	48,880,581,144
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	3,288,710,050	6.27	37,074,265,549	70.71	1,954,083,393	3.73	0	0.00	52,429,475,278
20	Kab. Indramayu	33	Jawa Barat	999,203,000	0.84	5,499,706,000	4.63	0	0.00	75,000,000	0.06	118,725,493,000
21	Kab. Jember	30	Bali	512,992,000	0.41	2,060,266,098	1.64	3,135,520,500	2.50	32,129,000	0.03	125,463,427,122
22	Kab. Jeneponto	25	Sulawesi Selatan	2,249,103,150	3.54	49,408,306,450	77.81	1,579,575,500	2.49	0	0.00	63,500,000,000
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	1,085,095,000	1.03	6,463,221,500	6.11	0	0.00	0	0.00	105,704,649,132
24	Kab. Karangasem	30	Bali	190,732,800	0.24	11,526,744,500	14.39	3,931,290,900	4.91	0	0.00	80,106,420,500
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	127,500,000	0.17	2,644,200,000	3.54	1,383,276,000	1.85	0	0.00	74,593,632,000
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	733,150,000	0.82	12,190,204,000	13.70	0	0.00	0	0.00	88,972,910,750
27	Kab. Klungkung	30	Bali	563,075,500	1.39	1,134,168,537	2.79	2,311,777,100	5.69	0	0.00	40,613,512,139
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	0	0.00	94,061,000	0.84	0	0.00	0	0.00	11,231,065,000
30	Kab. Lebak	3	Banten	1,054,077,000	0.94	2,603,918,600	2.33	0	0.00	1,260,349,900	1.13	111,691,537,562
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	1,665,560,000	2.53	2,377,836,100	3.61	1,350,000,000	2.05	0	0.00	65,828,003,680
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	644,809,600	0.83	14,726,196,600	19.05	814,035,000	1.05	0	0.00	77,305,600,687
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	1,007,558,050	1.29	5,130,343,023	6.55	3,765,760,300	4.81	0	0.00	78,322,290,498
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	4,265,310,000	2.65	13,294,378,550	8.26	0	0.00	3,280,483,550	2.04	160,858,604,000
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	250,000,000	0.32	870,550,000	1.12	1,570,000,000	2.02	0	0.00	77,778,982,260
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	2,910,500,000	3.66	5,315,386,150	6.68	0	0.00	1,109,200,000	1.39	79,600,325,550
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	95,000,000	0.26	55,000,000	0.15	0	0.00	435,000,000	1.18	36,748,305,000
38	Kab. Pidie	7	Aceh	2,436,500,000	3.74	4,625,642,200	7.10	0	0.00	0	0.00	65,131,415,753
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	109,000,000	0.27	968,000,000	2.42	0	0.00	0	0.00	39,918,086,292
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	1,900,000,000	1.41	1,895,000,000	1.40	33,573,000,000	24.89	0	0.00	134,910,361,206
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	3,413,732,500	3.68	2,870,634,200	3.09	0	0.00	0	0.00	92,887,606,296
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	575,860,900	1.22	1,690,601,400	3.58	1,209,856,800	2.57	0	0.00	47,167,246,512
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Tabanan	30	Bali	470,000,000	0.74	1,603,400,000	2.53	2,800,000,000	4.42	0	0.00	63,352,031,300
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	1,115,999,750	1.21	13,689,314,500	14.84	0	0.00	0	0.00	92,274,681,280
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	568,042,500	0.89	10,463,545,400	16.43	0	0.00	0	0.00	63,672,594,050
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	7,692,775,000	3.81	10,840,237,190	5.37	0	0.00	0	0.00	201,962,409,595
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	1,504,000,000	2.53	305,000,000	0.51	1,215,000,000	2.05	364,000,000	0.61	59,340,870,532
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	384,297,800	0.65	442,516,500	0.74	0	0.00	0	0.00	59,430,918,226
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	45,430,000	0.13	7,114,104,500	19.78	155,350,000	0.43	109,235,000	0.30	35,960,600,000
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	489,031,000	1.24	1,098,461,000	2.79	0	0.00	0	0.00	39,339,284,170
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	144,241,500	3.52	0	0.00	0	0.00	490,922,000	11.99	4,094,700,000
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	1,228,000,000	1.06	60,517,900,000	52.31	0	0.00	0	0.00	115,683,786,822
55	Kota Bukittinggi	9	Sumatera Barat	50,485,870	1.47	231,284,002	6.73	297,239,280	8.65	0	0.00	3,438,177,625
56	Kota Denpasar	30	Bali	1,303,932,526	1.28	7,240,953,020	7.11	7,425,624,115	7.29	0	0.00	101,869,836,442
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	6,321,164,650	2.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	268,757,683,698
58	Kota Jambi	23	Jambi	254,754,837	0.54	1,573,168,550	3.33	0	0.00	0	0.00	47,222,845,920
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	137,235,500	0.34	963,871,000	2.36	0	0.00	129,985,000	0.32	40,921,626,700
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	725,475,000	1.96	5,682,529,000	15.32	100,000,000	0.27	0	0.00	37,084,845,000
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	535,094,500	0.65	13,477,356,500	16.29	0	0.00	0	0.00	82,735,062,763
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	339,000,000	0.97	1,298,988,750	3.70	0	0.00	0	0.00	35,089,923,300
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	13,279,165,000	16.19	994,269,000	1.21	3,769,900,000	4.60	0	0.00	82,012,074,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	1,314,561,000	2.84	2,480,851,200	5.36	0	0.00	0	0.00	46,250,585,614
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	1,897,125,000	1.08	2,173,672,100	1.24	0	0.00	0	0.00	175,191,983,047
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	1,029,912,300	0.58	28,211,763,175	15.94	0	0.00	0	0.00	177,027,337,676
Jumlah kabupaten + kota				106,303,505,835	1.89	551,126,247,144	9.82	118,064,283,778	2.10	11,003,208,950	0.20	5,610,896,910,759
Jumlah 47 kabupaten				67,627,824,352	1.69	406,479,321,657	10.17	105,101,170,383	2.63	9,909,066,950	0.25	3,997,482,359,628
Jumlah 20 kota				38,675,681,483	2.40	144,646,925,487	8.97	12,963,113,395	0.80	1,094,142,000	0.07	1,613,414,551,130

6. Persentase Belanja Langsung dan Tidak langsung

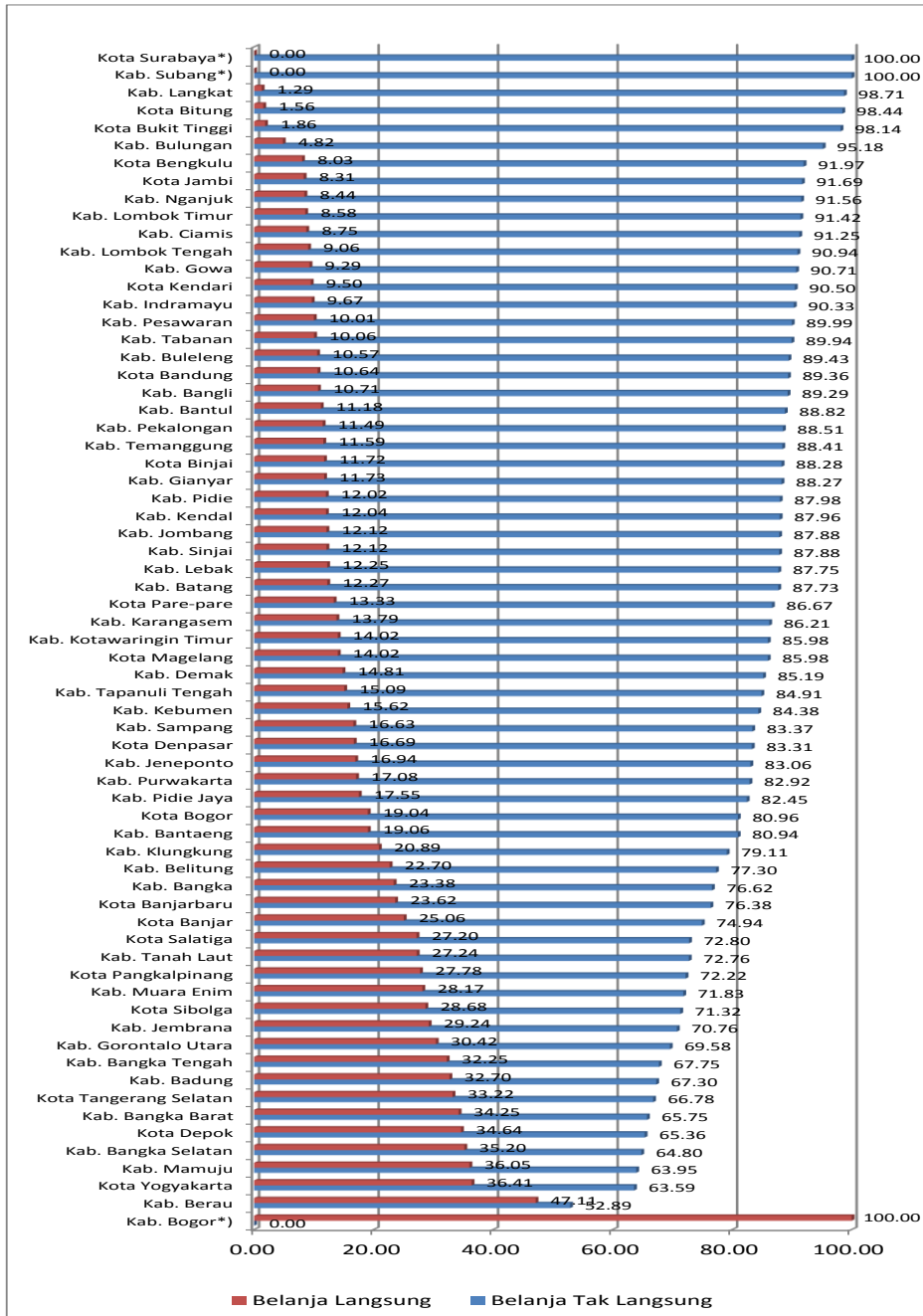
Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan langsung tahun 2014 yang terdapat pada Tabel 4.22A maka belanja tidak langsung sebesar 83,90% dengan rata-rata kabupaten sebesar 85,14% lebih besar daripada kota sebesar 80,66%. Sebaliknya, belanja langsung sebesar 16,10% dengan rata-rata kabupaten sebesar 14,86% lebih kecil daripada kota sebesar 19,34%.

Tabel 4.22A
Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Tak Langsung		Belanja Langsung		Jumlah
				Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Badung	30	Bali	482,937,570,876	67.00	237,890,345,908	33.00	720,827,916,784
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	238,995,765,500	76.17	74,764,823,400	23.83	313,760,588,900
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	157,416,944,562	65.97	81,215,670,070	34.03	238,632,614,632
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	127,918,897,549	58.75	89,809,042,400	41.25	217,727,939,949
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	188,346,003,500	73.95	66,363,453,000	26.05	254,709,456,500
6	Kab. Bangli	30	Bali	240,084,075,000	88.38	31,555,661,736	11.62	271,639,736,736
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	184,105,942,000	72.15	71,077,227,475	27.85	255,183,169,475
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	756,576,663,638	86.60	117,039,997,569	13.40	873,616,661,207
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	472,005,832,783	90.48	49,650,564,928	9.52	521,656,397,711
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	121,330,259,999	70.40	51,014,040,460	29.60	172,344,300,459
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	248,972,597,268	39.57	380,238,444,026	60.43	629,211,041,294
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	0	0.00	341,634,935,880	100.00	341,634,935,880
13	Kab. Buleleng	30	Bali	630,811,554,589	85.54	106,670,978,851	14.46	737,482,533,440
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	231,768,165,851	95.04	12,084,562,179	4.96	243,852,728,030
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	1,000,808,317,403	88.50	130,059,003,772	11.50	1,130,867,321,175
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	421,526,432,000	86.93	63,382,798,000	13.07	484,909,230,000
17	Kab. Gianyar	30	Bali	420,691,354,310	90.60	43,346,490,053	9.40	464,037,844,363
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	101,073,750,484	69.64	44,057,647,739	30.36	145,131,398,223
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	481,041,526,535	90.56	50,158,890,500	9.44	531,200,417,035
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	881,827,732,822	89.98	98,171,752,000	10.02	979,999,484,822
21	Kab. Jember	30	Bali	253,016,558,845	84.96	44,804,038,635	15.04	297,820,597,480
22	Kab. Jeneponto	25	Sulawesi Selatan	514,301,122,855	88.86	64,465,032,600	11.14	578,766,155,455
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	660,320,927,309	87.13	97,545,976,674	12.87	757,866,903,983
24	Kab. Karangasem	30	Bali	460,838,878,084	90.96	45,801,647,025	9.04	506,640,525,109
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	326,600,542,000	76.14	102,327,022,000	23.86	428,927,564,000
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	561,680,308,000	85.06	98,629,710,957	14.94	660,310,018,957
27	Kab. Klungkung	30	Bali	296,125,033,905	87.59	41,946,222,885	12.41	338,071,256,790
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	268,126,124,075	100.00	-	-	268,126,124,075
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	775,515,563,871	93.50	53,879,538,560	6.50	829,395,102,431
30	Kab. Lebak	3	Banten	627,820,483,968	85.94	102,705,329,500	14.06	730,525,813,468
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	578,562,806,557	88.93	72,037,977,875	11.07	650,600,784,432
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	696,791,826,445	91.15	67,671,808,002	8.85	764,463,634,447
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	49,866,511,218	44.56	62,038,850,000	55.44	111,905,361,218
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	391,328,458,887	69.46	172,044,373,600	30.54	563,372,832,487
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	823,669,947,418	87.60	116,625,371,905	12.40	940,295,319,323
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	494,047,379,000	87.95	67,662,133,650	12.05	561,709,512,650
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	293,414,857,694	89.36	34,925,062,000	10.64	328,339,919,694
38	Kab. Pidie	7	Aceh	408,812,675,932	87.54	58,199,567,288	12.46	467,012,243,220
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	192,147,741,416	83.51	37,940,503,336	16.49	230,088,244,752
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	533,610,855,775	81.88	118,096,737,191	18.12	651,707,592,966
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	413,300,951,858	85.57	68,695,229,705	14.43	482,996,181,563
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	314,507,204,412	87.06	46,739,294,880	12.94	361,246,499,292
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	869,009,361,190	100.00	-	-	869,009,361,190
44	Kab. Tabanan	30	Bali	512,362,715,710	89.08	62,780,789,204	10.92	575,143,504,914
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	225,415,244,519	73.89	79,666,030,358	26.11	305,081,274,877
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	297,238,275,720	100.00	-	-	297,238,275,720
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	512,473,354,842	90.27	55,259,403,300	9.73	567,732,758,142
48	Kab. Bandung	2	Jawa Barat	1,569,823,694,464	82.31	337,288,587,538	17.69	1,907,112,282,002
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	198,278,163,943	76.62	60,503,228,485	23.38	258,781,392,428
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	180,433,984,996	74.74	60,976,818,226	25.26	241,410,803,222
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	354,105,735,618	90.04	39,172,228,000	9.96	393,277,963,618
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	264,340,935,413	84.52	48,406,562,670	15.48	312,747,498,083
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	249,950,711,475	89.42	29,566,924,750	10.58	279,517,636,225
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	470,393,574,004	80.42	114,521,134,680	19.58	584,914,708,684
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	195,611,504,003	83.53	38,566,874,080	16.47	234,178,378,083
56	Kota Denpasar	30	Bali	501,841,941,747	80.88	118,633,720,773	19.12	620,475,662,520
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	494,430,984,842	60.41	323,978,959,330	39.59	818,409,944,172
58	Kota Jambi	23	Jambi	484,326,804,755	87.39	69,888,375,000	12.61	554,215,179,755
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	358,486,616,036	91.17	34,715,150,500	8.83	393,201,766,536
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	217,160,316,000	83.40	43,223,749,000	16.60	260,384,065,000
61	Kota Pangkajene	11	Bangka Belitung	211,535,532,590	70.69	87,726,713,616	29.31	299,262,246,206
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	237,336,455,140	86.45	37,192,079,148	13.55	274,528,534,288
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	219,087,375,000	72.82	81,784,470,000	27.18	300,871,845,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	98,382,280,521	68.51	45,227,171,750	31.49	143,609,452,271
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	1,174,328,680,969	100.00	-	-	1,174,328,680,969
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	355,024,539,790	61.16	225,486,043,400	38.84	580,510,583,190
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	287,705,213,825	65.57	151,077,340,500	34.43	438,782,554,325
Jumlah kabupaten + kota				30,553,392,680,804	83.90	5,861,910,112,522	16.10	36,415,302,793,327
Jumlah 47 kabupaten				22,430,807,635,673	85.14	3,913,973,981,076	14.86	26,344,781,616,749
Jumlah 20 kota				8,122,585,045,131	80.66	1,947,936,131,446	19.34	10,070,521,176,577

Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan langsung tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.22B maka belanja tidak langsung sebesar 83,92% dengan rata-rata kabupaten sebesar 83,86% lebih kecil daripada kota sebesar 84,06%. Sebaliknya, belanja langsung sebesar 16,08% dengan rata-rata kabupaten sebesar 16,14% lebih besar daripada kota sebesar 15,94%.

Grafik 4.19A
Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014



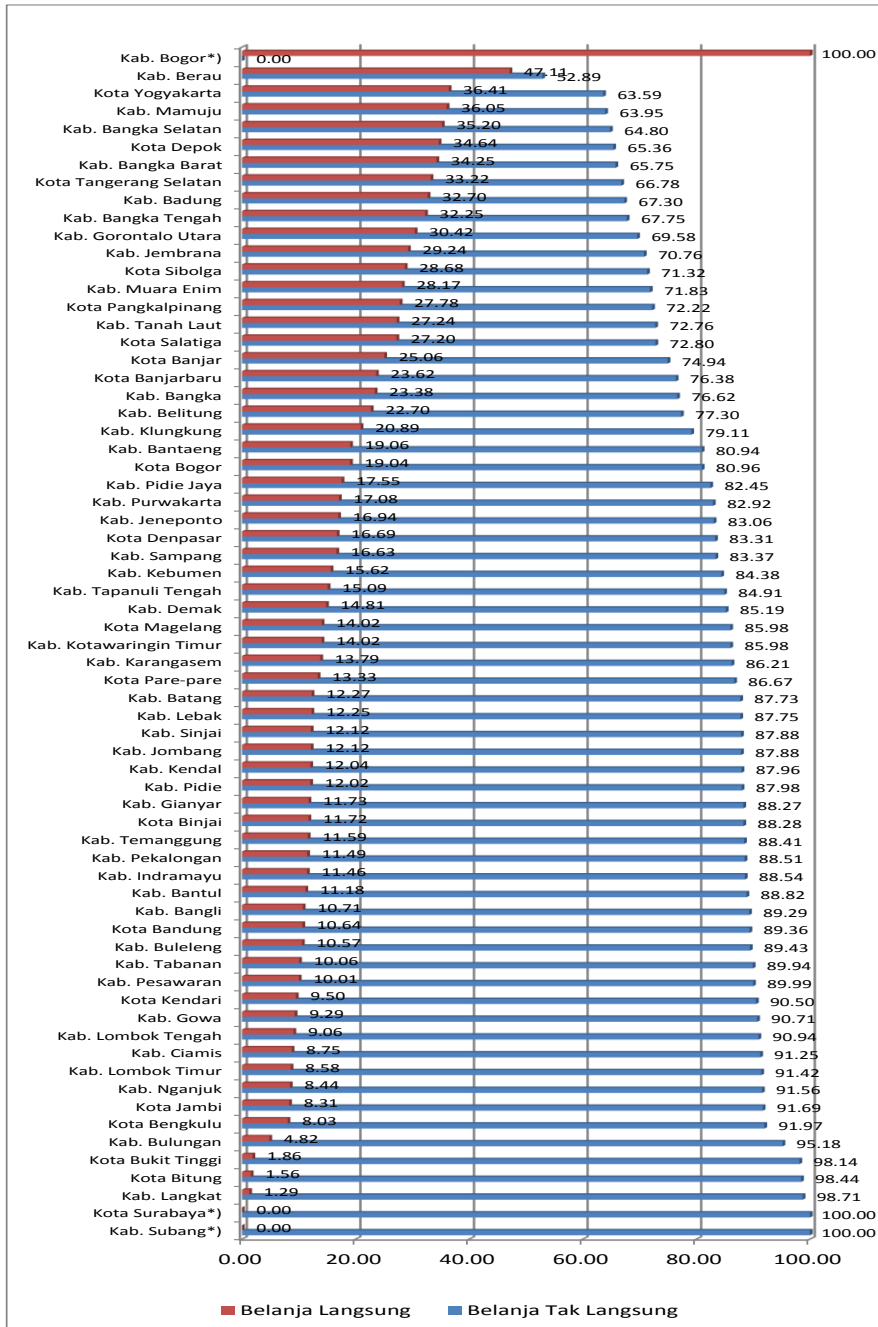
Tabel 4.22B
Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Tak Langsung		Belanja Langsung		Jumlah
				Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Badung	30	Bali	536,170,258,530	67.30	260,457,728,874	32.70	796,627,987,404
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	259,118,147,954	76.62	79,061,019,866	23.38	338,179,167,820
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	153,804,251,894	65.75	80,106,420,500	34.25	233,910,672,394
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	144,622,385,118	64.80	78,564,978,950	35.20	223,187,364,068
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	165,526,788,900	67.75	78,793,599,000	32.25	244,320,387,900
6	Kab. Bangli	30	Bali	294,442,608,087	89.29	35,329,654,174	10.71	329,772,262,261
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	207,077,411,676	80.94	48,754,724,050	19.06	255,832,135,726
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	772,392,129,000	88.82	97,186,640,453	11.18	869,578,769,453
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	465,348,087,795	87.73	65,073,378,328	12.27	530,421,466,123
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	185,309,793,500	77.30	54,403,041,509	22.70	239,712,835,009
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	384,090,027,208	52.89	342,171,628,150	47.11	726,261,655,358
12	Kab. Bogor*)	2	Jawa Barat	0	0.00	369,334,100,872	100.00	369,334,100,872
13	Kab. Buleleng	30	Bali	724,515,286,000	89.43	85,653,129,139	10.57	810,168,415,139
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	241,760,297,128	95.18	12,251,349,119	4.82	254,011,646,247
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	912,432,199,475	91.25	87,518,286,578	8.75	999,950,486,053
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	490,910,281,631	85.19	85,342,994,000	14.81	576,253,275,631
17	Kab. Gianyar	30	Bali	299,655,607,100	88.27	39,810,848,076	11.73	339,466,455,176
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	111,785,107,381	69.58	48,880,581,144	30.42	160,665,688,525
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	511,918,431,131	90.71	52,429,475,278	9.29	564,347,906,409
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	917,529,384,000	88.54	118,725,493,000	11.46	1,036,254,877,000
21	Kab. Jembrana	30	Bali	303,650,216,737	70.76	125,463,427,122	29.24	429,113,643,859
22	Kab. Jenepono	25	Sulawesi Selatan	311,324,794,745	83.06	63,500,000,000	16.94	374,824,794,745
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	766,455,988,859	87.88	105,704,649,132	12.12	872,160,637,991
24	Kab. Karangasem	30	Bali	500,672,231,748	86.21	80,106,420,500	13.79	580,778,652,248
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	403,023,997,000	84.38	74,593,632,000	15.62	477,617,629,000
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	650,189,499,669	87.96	88,972,910,750	12.04	739,162,410,419
27	Kab. Klungkung	30	Bali	153,804,251,894	79.11	40,613,512,139	20.89	194,417,764,033
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	288,515,330,650	85.98	47,040,144,475	14.02	335,555,475,125
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	862,143,530,000	98.71	11,231,065,000	1.29	873,374,595,000
30	Kab. Lebak	3	Banten	800,301,314,773	87.75	111,691,537,562	12.25	911,992,852,335
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	660,521,851,045	90.94	65,828,003,680	9.06	726,349,854,725
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	824,103,601,496	91.42	77,305,600,687	8.58	901,409,202,183
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	138,939,721,769	63.95	78,322,290,498	36.05	217,262,012,267
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	410,102,743,348	71.83	160,858,064,000	28.17	570,961,347,348
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	843,818,530,512	91.56	77,778,982,260	8.44	921,597,512,772
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	612,977,659,184	88.51	79,600,325,550	11.49	692,577,984,734
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	330,345,306,000	89.99	36,748,305,000	10.01	367,093,611,000
38	Kab. Pidie	7	Aceh	476,815,877,241	87.98	65,131,415,753	12.02	541,947,292,994
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	187,590,308,781	82.45	39,918,086,292	17.55	227,508,395,073
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	654,875,261,256	82.92	134,910,361,206	17.08	789,785,622,462
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	465,727,520,858	83.37	92,887,606,296	16.63	558,615,127,154
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	341,899,579,319	87.88	47,167,246,512	12.12	389,066,825,831
43	Kab. Subang*)	2	Jawa Barat	925,072,160,408	100.00	0	0.00	925,072,160,408
44	Kab. Tabanan	30	Bali	566,168,229,221	89.94	63,352,031,300	10.06	629,520,260,521
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	246,476,285,546	72.76	92,274,681,280	27.24	338,750,966,826
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	323,469,659,000	84.91	57,502,381,300	15.09	380,972,040,300
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	485,623,765,894	88.41	63,672,594,050	11.59	549,296,359,944
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,696,410,069,689	89.36	201,962,409,595	10.64	1,898,372,479,284
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	177,486,917,930	74.94	59,340,870,532	25.06	236,827,788,462
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	192,213,331,597	76.38	59,430,918,226	23.62	251,644,249,823
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	411,651,780,913	91.97	35,960,600,000	8.03	447,612,380,913
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	296,409,292,724	88.28	39,339,284,170	11.72	335,748,576,894
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	258,948,964,065	98.44	4,094,700,000	1.56	263,043,664,065
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	491,881,093,116	80.96	115,683,786,822	19.04	607,564,879,938
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	181,898,920,036	98.14	3,438,177,625	1.86	185,337,097,661
56	Kota Denpasar	30	Bali	508,312,770,790	83.31	101,869,836,442	16.69	610,182,607,232
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	507,173,246,984	65.36	268,757,683,698	34.64	775,930,930,682
58	Kota Jambi	23	Jambi	520,959,053,335	91.69	47,222,845,920	8.31	568,181,899,255
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	389,805,779,300	90.50	40,921,626,700	9.50	430,727,406,000
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	227,337,780,000	85.98	37,084,845,000	14.02	264,422,625,000
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	215,045,136,595	72.22	82,735,062,763	27.78	297,780,199,358
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	228,107,637,348	86.67	35,089,923,300	13.33	263,197,560,648
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	219,450,497,000	72.80	82,012,074,000	27.20	301,462,571,000
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	115,033,522,366	71.32	46,250,585,614	28.68	161,284,107,980
65	Kota Surabaya*)	6	Jawa Timur	1,208,441,401,995	100.00	0	0.00	1,208,441,401,995
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	352,239,363,120	66.78	175,191,983,047	33.22	527,431,346,167
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	309,199,394,705	63.59	177,027,337,676	36.41	486,226,732,381
	Jumlah kabupaten + kota			29,821,023,654,068	83.92	5,715,439,436,534	16.08	35,536,463,090,601
	Jumlah 47 kabupaten			21,313,017,700,460	83.86	4,102,024,885,403	16.14	25,415,042,585,864
	Jumlah 20 kota			8,508,005,953,607	84.06	1,613,414,551,130	15.94	10,121,420,504,738

Catatan: *) BTL Kab Bogor hanya ada gaji guru sehingga tidak dimasukkan

*) BL Kab Subang dan Kota Surabaya tak ada data

Grafik 4.19B
Persentase Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015



Catatan: *) tidak tersedia data

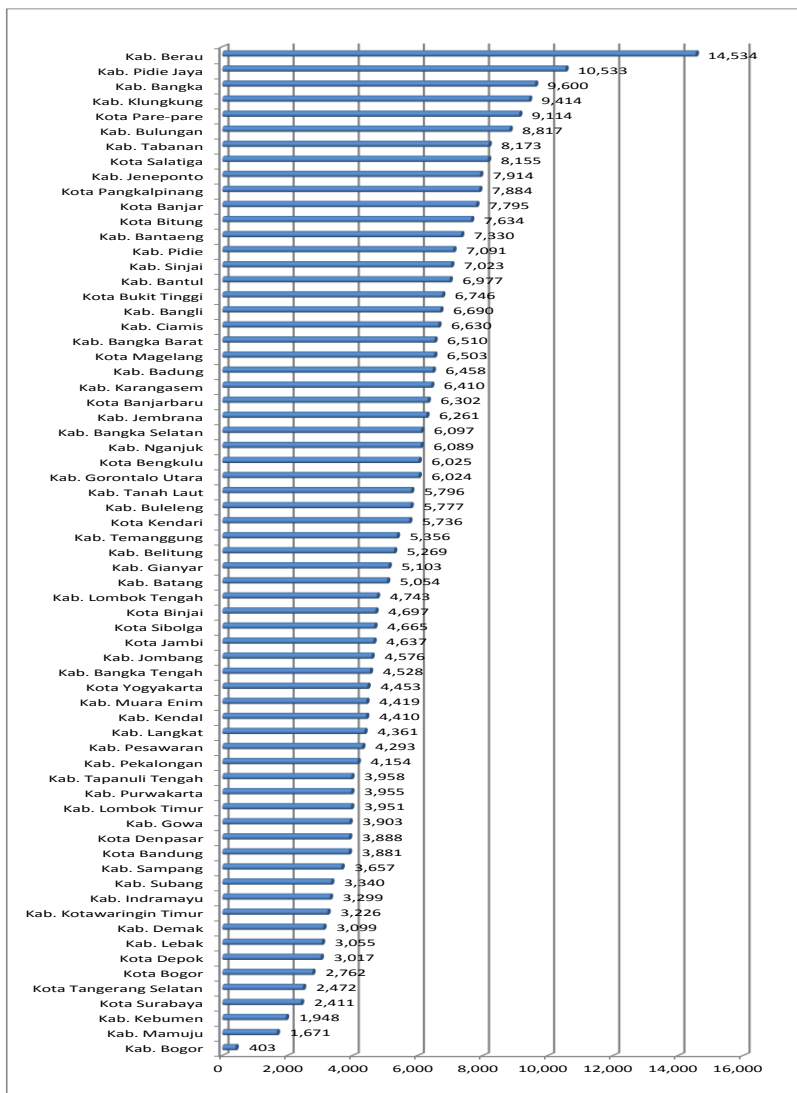
7. Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen

Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tahun 2014 terdapat pada Tabel 4.23A menunjukkan bahwa terdapat belanja pendidikan sebesar Rp33.723.640,3 juta dengan siswa sebesar 8.299.455 orang sehingga rasio belanja pendidikan per siswa sebesar Rp4.063.356,00 dengan rata-rata kabupaten sebesar Rp4.144.939,00 lebih besar daripada kota sebesar Rp3.883.810,00.

Tabel 4.23A
Rasio Belanja Pendidikan Terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Siswa Dikdasmen					Rasio
					SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	
1	Kab. Badung	30	Bali	720,827,916,784	59,839	28,097	10,396	13,288	111,620	6,457,874
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	313,760,588,900	21,920	6,242	2,190	2,333	32,685	9,599,528
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	238,632,614,632	24,248	7,143	2,845	2,418	36,654	6,510,411
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	217,727,939,949	23,324	7,801	2,658	1,929	35,712	6,096,773
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	254,709,456,500	36,501	11,312	4,088	4,352	56,253	4,527,927
6	Kab. Bangli	30	Bali	271,639,736,736	22,766	10,874	3,344	3,619	40,603	6,690,140
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	255,183,169,475	22,433	5,770	4,147	2,465	34,815	7,329,690
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	873,616,661,207	72,203	29,119	7,762	16,129	125,213	6,977,044
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	521,656,397,711	63,432	23,581	6,493	9,703	103,209	5,054,369
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	172,344,300,459	19,669	7,676	2,314	3,049	32,708	5,269,179
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	629,211,041,294	27,020	9,348	4,282	2,641	43,291	14,534,454
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	341,634,935,880	520,204	181,298	54,018	92,481	848,001	402,871
13	Kab. Buleleng	30	Bali	737,482,533,440	71,279	32,272	13,494	10,618	127,663	5,776,792
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	243,852,728,030	16,616	5,881	3,115	2,045	27,657	8,817,035
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	1,130,867,321,175	104,498	39,068	7,617	19,387	170,570	6,629,931
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	484,909,230,000	98,685	26,316	18,159	13,313	156,473	3,098,996
17	Kab. Gianyar	30	Bali	464,337,844,363	47,474	22,009	7,582	13,937	91,002	5,102,502
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	145,131,398,223	15,094	5,027	3,248	724	24,093	6,023,799
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	531,200,417,035	81,061	29,762	15,606	9,667	136,096	3,903,130
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	979,999,484,822	175,525	69,497	14,550	37,469	297,041	3,299,206
21	Kab. Jembrana	30	Bali	297,820,597,480	25,500	12,052	5,401	4,613	47,566	6,261,208
22	Kab. Jenepono	25	Sulawesi Selatan	578,766,155,455	48,546	13,784	6,414	4,390	73,134	7,913,777
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	757,866,903,983	80,780	39,614	18,314	26,898	165,606	4,576,325
24	Kab. Karangasem	30	Bali	506,640,525,109	46,854	19,757	7,865	4,557	79,033	6,410,493
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	428,927,564,000	123,942	48,679	12,460	35,075	220,156	1,948,289
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	660,310,018,957	85,683	33,092	11,648	19,292	149,715	4,410,447
27	Kab. Klungkung	30	Bali	338,071,256,790	18,083	9,162	5,279	3,386	35,910	9,414,404
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	268,126,124,075	55,039	16,759	5,895	5,427	83,120	3,225,771
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	829,395,102,431	117,149	39,835	15,561	17,630	190,175	4,361,220
30	Kab. Lebak	3	Banten	730,525,813,468	157,643	49,849	16,122	15,511	239,125	3,054,996
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	650,600,784,432	90,758	25,688	13,350	7,365	137,161	4,743,337
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	764,463,634,447	128,515	36,639	16,269	12,087	193,510	3,950,512
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	111,905,361,218	44,215	12,246	5,367	5,156	66,984	1,670,628
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	563,372,832,487	82,465	24,369	12,129	8,519	127,482	4,419,234
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	940,295,319,323	86,620	35,776	12,047	19,980	154,423	6,089,089
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	561,709,512,650	79,035	30,403	11,915	13,883	135,236	4,153,550
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	328,339,919,694	47,786	15,407	9,500	3,783	76,476	4,293,372
38	Kab. Pidie	7	Aceh	467,012,243,220	37,085	14,632	10,901	3,244	65,862	7,090,769
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	230,088,244,752	12,627	4,781	3,550	887	21,845	10,532,765
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	651,707,592,966	103,663	36,770	8,390	15,954	164,777	3,955,088
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	482,996,181,563	87,334	30,030	8,263	6,455	132,082	3,656,790
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	361,246,499,292	30,345	11,377	7,284	2,429	51,435	7,023,360
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	869,009,361,190	152,375	61,144	19,239	27,454	260,212	3,339,621
44	Kab. Tabanan	30	Bali	575,143,504,914	38,358	18,751	7,256	6,010	70,375	8,172,554
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	305,081,274,877	36,413	9,039	4,361	2,827	52,640	5,795,617
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	297,238,275,720	45,000	16,617	7,721	5,765	75,103	3,957,742
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	567,732,758,142	60,124	24,270	10,507	11,103	106,004	5,355,767
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,907,112,282,002	241,494	112,649	74,507	62,715	491,365	3,881,254
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	258,781,392,428	16,634	8,096	1,739	6,730	33,199	7,794,855
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	241,410,803,222	22,523	8,124	3,149	4,511	38,307	6,302,002
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	393,277,963,618	36,663	13,846	6,715	8,053	65,277	6,024,755
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	312,747,498,083	32,743	14,641	9,395	9,799	66,578	4,697,460
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	279,517,636,225	22,140	7,720	3,021	3,732	36,613	7,634,382
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	584,914,708,684	111,946	47,872	12,852	39,109	211,779	2,761,911
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	234,178,378,083	16,382	6,748	6,621	4,961	34,712	6,746,323
56	Kota Denpasar	30	Bali	620,475,662,520	84,512	36,086	18,174	20,807	159,579	3,888,204
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	818,409,944,172	161,991	58,783	16,404	34,082	271,260	3,017,068
58	Kota Jambi	23	Jambi	554,215,179,755	65,068	25,273	15,194	13,995	119,530	4,636,620
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	393,201,766,536	37,770	13,685	10,501	6,599	68,555	5,735,567
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	260,384,065,000	14,923	9,315	6,690	9,115	40,443	6,502,611
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	299,262,246,206	21,137	8,472	3,484	4,864	37,957	7,884,244
62	Kota Parepare	25	Sulawesi Selatan	274,528,534,288	16,572	6,992	3,631	2,927	30,122	9,113,888
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	300,871,845,000	17,117	8,719	1,434	9,622	36,892	8,155,477
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	143,609,452,271	16,586	6,295	4,109	3,793	30,783	4,665,220
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	1,174,328,680,969	249,542	120,643	53,355	63,475	487,015	2,411,278
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	580,510,583,190	130,047	49,625	27,063	28,107	234,842	2,471,920
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	438,782,554,325	44,291	22,688	14,533	17,029	98,541	4,452,792
Jumlah kabupaten + kota				33,723,640,255,827	4,805,809	1,834,887	753,487	905,272	8,299,455	4,063,356
Jumlah 47 kabupaten				23,653,119,079,249	3,445,728	1,248,615	460,916	551,247	5,706,506	4,144,939
Jumlah 20 kota				10,070,521,176,577	1,360,081	586,272	292,571	354,025	2,592,949	3,883,810

Grafik 4.20A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014



Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tahun 2015 terdapat pada Tabel 4.23B menunjukkan bahwa terdapat belanja pendidikan sebesar Rp35.536.463,1 juta dengan siswa sebesar 8.213.738 orang sehingga rasio belanja pendidikan per siswa sebesar Rp4.326.467,00 dengan rata-rata kabupaten sebesar Rp4.515.370,00 lebih besar daripada kota sebesar Rp3.915.178,00.

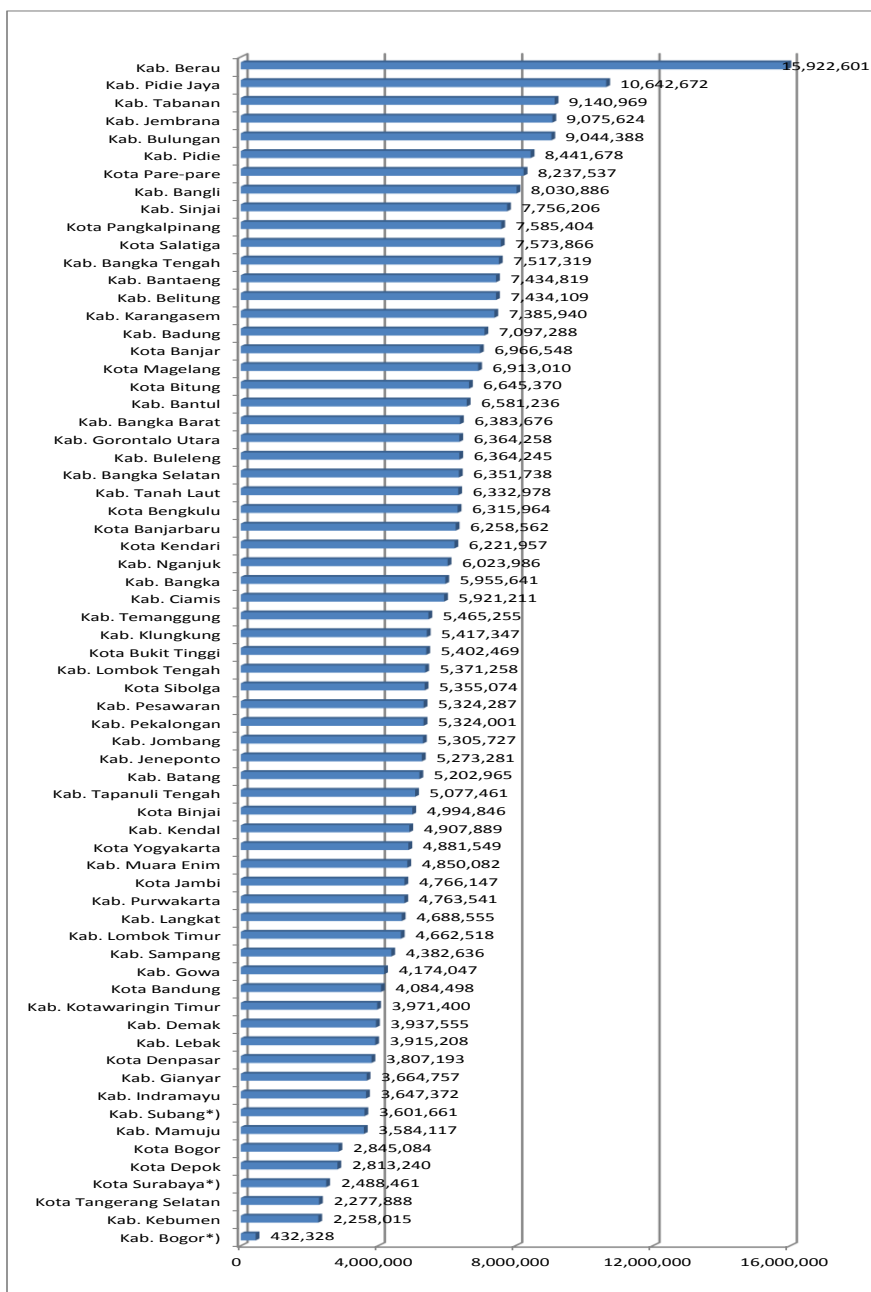
Tabel 4.23B
Rasio Belanja Pendidikan Terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Siswa Dikdasmen					Rasio
					SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	
1	Kab. Badung	30	Bali	796,627,987,404	59,793	29,070	10,806	12,575	112,244	7,097,288
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	338,179,167,820	35,745	11,812	4,686	4,540	56,783	5,955,641
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	233,910,672,394	23,953	7,069	3,105	2,515	36,642	6,383,676
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	223,187,364,068	22,858	7,573	2,876	1,831	35,138	6,351,738
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	244,320,387,900	21,764	6,194	2,159	2,384	32,501	7,517,319
6	Kab. Bangli	30	Bali	329,772,262,261	23,158	10,672	3,531	3,702	41,063	8,030,886
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	255,832,135,726	21,705	6,485	3,893	2,327	34,410	7,434,819
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	869,578,769,453	73,035	30,413	12,714	15,968	132,130	6,581,236
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	530,421,466,123	60,551	25,131	5,625	10,639	101,946	5,202,965
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	239,712,835,009	19,151	7,531	2,499	3,064	32,245	7,434,109
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	726,261,655,358	28,019	10,132	4,626	2,835	45,612	15,922,606
12	Kab. Bogor*)	2	Jawa Barat	369,334,100,872	514,107	193,013	51,154	96,017	854,291	432,328
13	Kab. Buleleng	30	Bali	810,168,415,139	69,362	32,729	14,298	10,911	127,300	6,364,245
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	254,011,646,247	16,942	6,374	2,796	1,973	28,085	9,044,388
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	999,950,486,053	100,392	39,219	12,394	16,871	168,876	5,921,211
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	576,253,275,631	94,836	25,872	12,059	13,581	146,348	3,937,555
17	Kab. Gianyar	30	Bali	339,466,455,176	47,512	23,033	7,702	14,383	92,630	3,664,757
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	160,665,688,525	15,471	5,370	3,540	864	25,245	6,364,258
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	564,347,906,409	78,726	31,070	16,621	8,787	135,204	4,174,047
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	1,036,254,877,000	164,751	64,177	16,696	38,486	284,110	3,647,372
21	Kab. Jembrana	30	Bali	429,113,643,859	25,044	11,971	5,425	4,842	47,282	9,075,624
22	Kab. Jenepono	25	Sulawesi Selatan	374,824,794,745	46,155	13,469	6,831	4,625	71,080	5,273,281
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	872,160,637,991	77,311	40,860	18,872	27,338	164,381	5,305,727
24	Kab. Karangasem	30	Bali	580,778,652,248	45,442	20,160	7,934	5,097	78,633	7,385,940
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	477,617,629,000	118,591	45,968	11,022	35,940	211,521	2,258,015
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	739,162,410,419	83,627	34,944	11,935	20,101	150,607	4,907,889
27	Kab. Klungkung	30	Bali	194,417,764,033	17,706	9,495	5,164	3,523	35,888	5,417,347
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	335,555,475,125	55,144	17,306	6,268	5,775	84,493	3,971,400
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	873,374,595,000	113,851	38,349	16,223	17,855	186,278	4,688,555
30	Kab. Lebak	3	Banten	911,992,852,335	148,980	50,535	17,626	15,795	232,936	3,915,208
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	726,349,854,725	87,618	25,300	14,628	7,683	135,229	5,371,258
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	901,409,202,183	124,153	38,854	17,905	12,419	193,331	4,662,518
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	217,262,012,267	38,483	12,076	5,615	4,444	60,618	3,584,117
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	570,961,347,348	72,677	25,515	11,827	7,703	117,722	4,850,082
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	921,597,512,772	84,320	35,673	13,045	19,950	152,988	6,023,986
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	692,577,984,734	76,312	31,015	7,939	14,820	130,086	5,324,001
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	367,093,611,000	45,164	15,024	4,943	3,816	68,947	5,324,287
38	Kab. Pidie	7	Aceh	541,947,292,994	36,261	14,565	10,352	3,021	64,199	8,441,678
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	227,508,395,073	12,064	4,971	3,521	821	21,377	10,642,672
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	789,785,622,462	100,944	36,990	11,588	16,276	165,798	4,763,541
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	558,615,127,154	81,727	29,751	9,274	6,709	127,461	8,282,636
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	389,066,825,831	29,375	11,353	7,154	2,280	50,162	7,756,206
43	Kab. Subang*)	2	Jawa Barat	925,072,160,408	147,341	63,943	17,638	27,924	256,846	3,601,661
44	Kab. Tabanan	30	Bali	629,520,260,521	37,212	19,056	7,583	5,017	68,868	9,140,969
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	338,750,966,826	36,163	9,345	4,676	3,306	53,490	6,332,978
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	380,972,040,300	44,488	17,019	7,954	5,571	75,032	5,077,461
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	549,296,359,944	59,457	24,644	5,372	11,034	100,507	5,465,255
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,898,372,479,284	236,832	113,308	55,250	59,385	464,775	4,084,498
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	236,827,788,462	15,975	7,858	3,108	7,054	33,995	6,966,548
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	251,644,249,823	23,239	8,716	3,402	4,851	40,208	6,258,562
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	447,612,380,913	36,747	16,661	9,867	7,595	70,870	6,315,964
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	335,748,576,894	32,830	15,383	9,790	9,216	67,219	4,994,846
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	263,043,664,065	22,269	9,200	3,468	4,646	39,583	6,645,370
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	607,564,879,938	108,664	47,587	19,624	37,674	213,549	2,845,084
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	185,337,097,661	16,414	6,397	6,579	4,916	34,306	5,402,469
56	Kota Denpasar	30	Bali	610,182,607,232	85,167	37,730	16,702	20,672	160,271	3,807,193
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	775,930,930,682	163,434	61,275	18,861	32,244	275,814	2,813,240
58	Kota Jambi	23	Jambi	568,181,899,255	64,678	25,228	15,841	13,465	119,212	4,766,147
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	430,727,406,000	38,053	14,250	10,903	6,021	69,227	6,221,957
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	264,422,625,000	14,736	9,224	4,797	9,493	38,250	6,913,010
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	297,780,199,358	21,709	8,945	3,627	4,976	39,257	7,585,404
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	263,197,560,648	16,512	7,551	3,855	4,033	31,951	8,237,537
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	301,462,571,000	16,980	9,310	4,254	9,259	39,803	7,573,866
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	161,284,107,980	16,421	5,889	4,117	3,691	30,118	5,355,074
65	Kota Surabaya*)	6	Jawa Timur	1,208,441,401,995	250,294	120,487	54,971	59,866	485,618	2,488,461
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	527,431,346,167	130,333	51,757	22,494	26,960	231,544	2,277,888
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	486,226,732,381	43,427	22,987	16,947	16,244	99,605	4,881,549
Jumlah kabupaten + kota				35,536,463,090,601	4,692,155	1,870,833	750,551	900,199	8,213,738	4,326,467
Jumlah 47 kabupaten				25,415,042,585,864	3,337,441	1,271,090	462,094	557,938	5,628,563	4,515,370
Jumlah 20 kota				10,121,420,504,738	1,354,714	599,743	288,457	342,261	2,585,175	3,915,178

Catatan: *) BTL Kab Bogor hanya ada gaji guru sehingga tidak dimasukkan
*) BI Kab Subane dan Kota Surabaha tak ada data

Catatan: *) BTL Kab Bogor hanya ada gaji guru sehingga tidak dimasukkan
 *) BL Kab Subang dan Kota Surabaya tak ada data

Grafik 4.20B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015



8. Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD

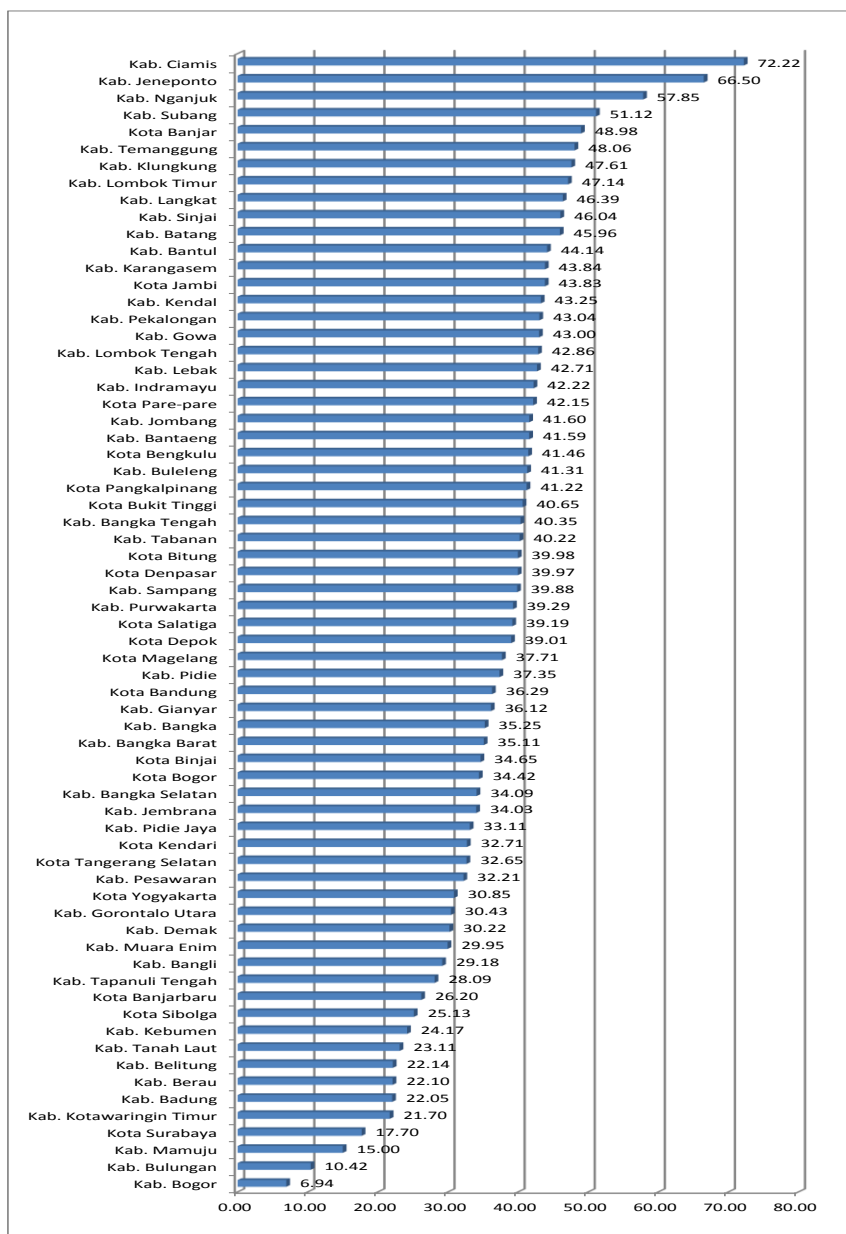
Persentase belanja pendidikan terhadap APBD tahun 2014 terdapat pada Tabel 4.24A menunjukkan bahwa terdapat belanja pendidikan sebesar Rp33.723.640,3 juta dengan APBD sebesar Rp98.293.361,6 juta sehingga persentase belanja pendidikan sebesar 34,31% dengan rata-rata kabupaten sebesar 35,09% lebih besar daripada kota sebesar 32,60%.

Tabel 4.24A
Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD	%
1	Kab. Badung	30	Bali	720,827,916,784	3,269,667,228,515	22.05
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	313,760,588,900	889,984,516,150	35.25
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	238,632,614,632	679,692,645,932	35.11
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	217,727,939,948	638,672,263,340	34.09
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	354,709,456,500	631,175,283,200	40.35
6	Kab. Bangli	30	Bali	271,639,736,736	930,895,764,975	29.18
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	255,183,169,475	613,503,100,875	41.59
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	873,616,661,207	1,979,120,891,883	44.14
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	521,656,397,711	1,134,901,427,575	45.96
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	172,344,300,459	778,555,615,260	22.14
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	629,211,041,294	2,846,805,708,141	22.10
12	Kab. Bogor	2	Jawa Barat	341,634,935,880	4,921,319,444,000	6.94
13	Kab. Buleleng	30	Bali	737,482,533,440	1,785,202,065,650	41.31
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	243,851,728,030	2,340,282,422,870	10.42
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	1,130,867,321,175	1,565,972,174,063	72.22
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	484,909,230,000	1,604,521,847,045	30.22
17	Kab. Gianyar	30	Bali	464,337,844,363	1,285,370,082,601	36.12
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	145,131,398,223	476,867,625,248	30.43
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	531,200,417,035	1,235,353,748,500	43.00
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	979,999,484,822	2,321,406,581,000	42.22
21	Kab. Jember	30	Bali	297,820,597,480	875,100,013,459	34.03
22	Kab. Jeneponto	25	Sulawesi Selatan	578,766,155,455	870,316,866,711	66.50
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	757,866,903,983	1,821,852,219,466	41.60
24	Kab. Karangasem	30	Bali	506,640,525,109	1,155,747,491,172	43.84
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	428,927,564,000	1,774,332,619,000	24.17
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	660,310,018,957	1,526,552,941,802	43.25
27	Kab. Klungkung	30	Bali	338,071,256,790	710,072,006,777	47.61
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	268,126,124,075	1,235,809,663,155	21.70
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	829,395,102,431	1,787,984,546,274	46.39
30	Kab. Lebak	3	Banten	730,525,813,468	1,710,474,347,594	42.71
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	650,600,784,432	1,517,885,078,467	42.86
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	764,463,634,447	1,621,787,373,346	47.14
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	111,905,361,218	745,917,826,860	15.00
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	563,372,833,487	1,881,095,071,287	29.95
35	Kab. Naganuk	6	Jawa Timur	940,295,319,323	1,625,316,666,308	57.85
36	Kab. Pektalongan	4	Jawa Tengah	561,709,512,650	1,305,186,780,606	43.04
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	328,339,919,694	1,019,416,301,089	32.21
38	Kab. Pidie	7	Aceh	467,012,243,220	1,250,294,580,269	37.35
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	230,088,244,752	694,830,894,321	33.11
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	651,707,592,966	1,658,656,613,501	39.29
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	482,996,181,563	1,211,113,815,413	39.88
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	361,246,499,292	784,689,382,757	46.04
43	Kab. Subang	2	Jawa Barat	869,009,261,190	1,699,791,376,058	51.12
44	Kab. Tabanan	30	Bali	575,143,504,914	1,429,917,386,211	40.22
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	305,081,274,877	1,320,022,077,756	23.11
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	297,238,275,720	1,058,016,465,159	28.09
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	567,732,758,142	1,181,308,662,300	48.06
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,907,112,282,002	5,255,142,559,331	36.29
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	258,781,392,428	528,299,856,122	48.98
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	241,410,803,222	921,568,806,987	26.20
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	393,277,963,618	948,546,836,054	41.46
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	312,747,498,083	902,716,030,277	34.65
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	279,517,636,225	699,108,280,770	39.98
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	584,914,708,684	1,699,410,118,554	34.42
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	234,178,378,083	576,032,792,258	40.65
56	Kota Denpasar	30	Bali	620,475,662,520	1,552,221,463,244	39.97
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	818,409,944,172	2,097,914,920,124	39.01
58	Kota Jambi	23	Jambi	554,215,179,755	1,264,595,856,820	43.83
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	393,201,766,536	1,202,054,645,873	32.71
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	260,384,065,000	690,557,522,000	37.71
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	299,262,246,206	725,931,957,882	41.22
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	274,528,534,288	651,259,451,292	42.15
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	300,871,845,000	767,710,437,000	39.19
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	143,609,452,271	571,390,575,957	25.13
65	Kota Surabaya	6	Jawa Timur	1,174,328,680,969	6,636,186,508,258	17.70
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	580,510,583,190	1,777,860,131,499	32.65
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	438,782,554,325	1,422,093,336,380	30.85
Jumlah kabupaten + kota				33,723,640,255,827	98,293,361,588,624	34.31
Jumlah 47 kabupaten				23,653,119,079,249	67,402,759,501,942	35.09
Jumlah 20 kota				10,070,521,176,577	30,890,602,086,682	32.60

Catatan: *) menggunakan APBD tahun 2015, **) menggunakan APBD tahun 2013

Grafik 4.21A
Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014

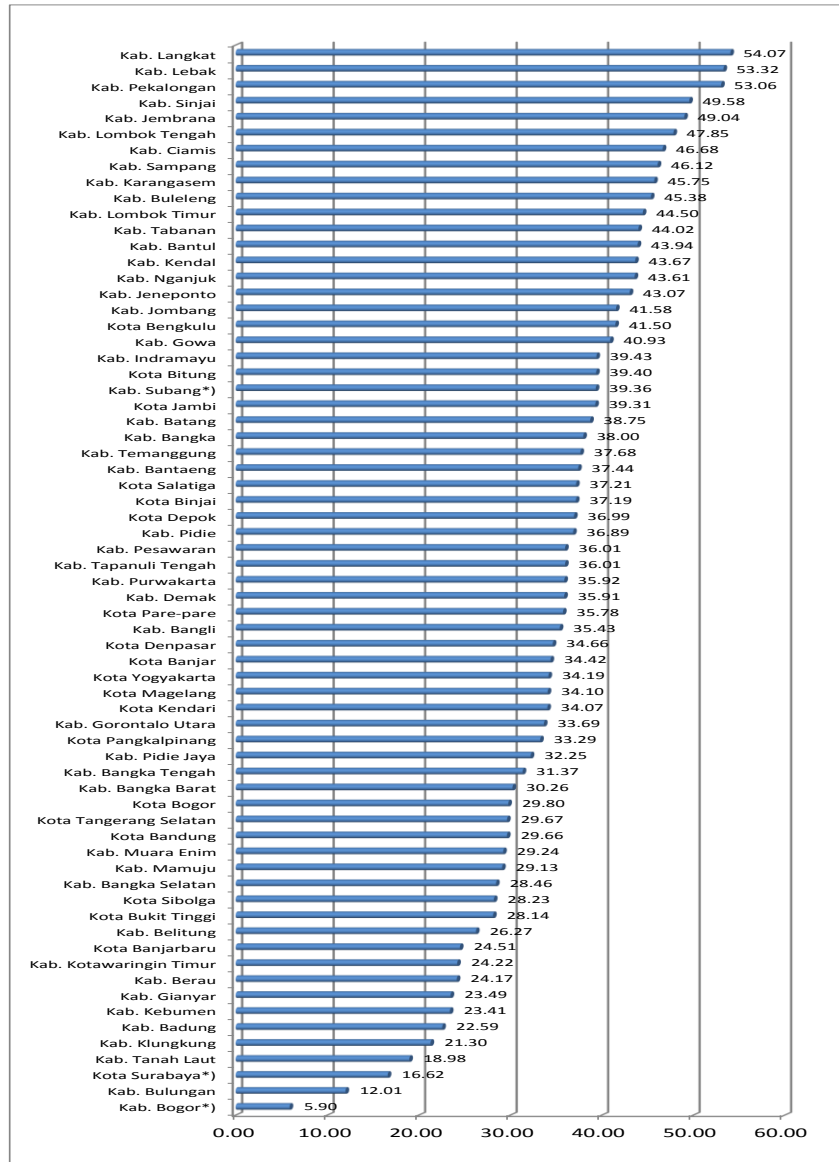


Persentase belanja pendidikan terhadap APBD tahun 2015 terdapat pada Tabel 4.24B menunjukkan bahwa terdapat belanja pendidikan sebesar Rp35.536.463,1 juta dengan APBD sebesar Rp109.303.575,0 juta sehingga persentase belanja pendidikan sebesar 32,51% dengan rata-rata kabupaten sebesar 33,85% lebih besar daripada kota sebesar 29,52%.

Tabel 4.24B
Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD	%
1	Kab. Badung	30	Bali	796,627,987,404	3,527,203,219,418	22.59
2	Kab. Bangka	11	Bangka Belitung	338,179,167,820	889,984,516,150	38.00
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	233,910,672,394	772,949,591,467	30.26
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	223,187,364,068	784,140,099,242	28.46
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	244,320,387,900	778,870,304,700	31.37
6	Kab. Bangli	30	Bali	329,772,262,261	930,895,764,975	35.43
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	255,832,135,726	683,350,482,527	37.44
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	869,578,769,453	1,979,120,891,883	43.94
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	530,421,466,123	1,368,764,609,669	38.75
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	239,712,835,009	912,553,480,606	26.27
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	726,261,655,358	3,004,767,000,000	24.17
12	Kab. Bogor*)	2	Jawa Barat	369,334,100,872	6,262,701,630,000	5.90
13	Kab. Buleleng	30	Bali	810,168,415,139	1,785,202,065,650	45.38
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	254,011,646,247	2,115,511,208,421	12.01
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	999,950,486,053	2,142,243,399,343	46.68
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	576,253,275,631	1,604,521,847,045	35.91
17	Kab. Gianyar	30	Bali	339,466,455,176	1,445,120,498,816	23.49
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	160,665,688,525	476,867,625,248	33.69
19	Kab. Gowa	25	Sulawesi Selatan	564,347,906,409	1,378,785,522,879	40.93
20	Kab. Indramayu	2	Jawa Barat	1,036,254,877,000	2,575,655,644,639	40.23
21	Kab. Jembrana	30	Bali	429,113,643,859	875,100,013,459	49.04
22	Kab. Jenepono	25	Sulawesi Selatan	374,824,794,745	870,316,866,711	43.07
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	872,160,637,991	2,097,688,774,739	41.58
24	Kab. Karangasem	30	Bali	580,778,652,248	1,269,495,869,214	45.75
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	477,617,629,000	2,039,879,752,000	23.41
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	739,162,410,419	1,692,632,663,752	43.67
27	Kab. Klungkung	30	Bali	194,417,764,033	912,707,523,258	21.30
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	335,555,475,125	1,385,469,618,500	24.22
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	873,374,595,000	1,615,157,812,265	54.07
30	Kab. Lebak	3	Banten	911,992,852,335	1,710,474,347,594	53.32
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	726,349,854,725	1,517,885,078,467	47.85
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	901,409,202,183	2,025,597,465,804	44.50
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	217,262,012,267	745,917,826,860	29.13
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	570,961,347,348	1,952,420,977,914	29.24
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	921,597,512,772	2,113,409,612,131	43.61
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	692,577,984,734	1,305,186,780,606	53.06
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	367,093,611,000	1,019,416,301,089	36.01
38	Kab. Pidie	7	Aceh	541,947,292,994	1,469,133,107,038	36.89
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	227,508,395,073	705,437,959,652	32.25
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	789,785,622,462	2,198,476,955,960	35.92
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	558,615,127,154	1,211,113,815,413	46.12
42	Kab. Sinjai	25	Sulawesi Selatan	389,066,825,831	784,689,382,757	49.58
43	Kab. Subang*)	2	Jawa Barat	925,072,160,408	2,350,244,680,037	39.36
44	Kab. Tabanan	30	Bali	629,520,260,521	1,429,917,386,211	44.02
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	338,750,966,826	1,784,589,694,556	18.98
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	380,972,040,300	1,058,016,465,159	36.01
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	549,296,359,944	1,457,620,231,825	37.68
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,898,372,479,284	6,400,773,368,821	29.66
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	236,827,788,462	688,144,849,656	34.42
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	251,644,249,823	1,026,666,062,660	24.51
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	447,612,380,913	1,078,612,474,215	41.50
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	335,748,576,894	902,716,030,277	37.19
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	263,043,664,065	667,554,837,000	39.40
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	607,564,879,938	2,038,547,529,029	29.80
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	185,337,097,661	658,706,641,063	28.14
56	Kota Denpasar	30	Bali	610,182,607,232	1,760,606,869,553	34.66
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	775,930,930,682	2,097,914,920,124	36.99
58	Kota Jambi	23	Jambi	568,181,899,255	1,445,473,823,753	39.31
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	430,727,406,000	1,264,179,209,262	34.07
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	264,422,625,000	775,333,908,000	34.10
61	Kota Pangkalpinang	11	Bangka Belitung	297,780,199,358	894,629,895,786	33.29
62	Kota Pare-pare	25	Sulawesi Selatan	263,197,560,648	735,591,485,544	35.78
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	301,462,571,000	810,130,111,000	37.21
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	161,284,107,980	571,390,575,957	28.23
65	Kota Surabaya*)	6	Jawa Timur	1,208,441,401,995	7,269,442,530,623	16.62
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	527,431,346,167	1,777,860,131,499	29.67
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	486,226,732,381	1,422,093,336,380	34.19
Jumlah kabupaten + kota				35,536,463,090,601	109,303,574,955,853	32.51
Jumlah 47 kabupaten				25,415,042,585,864	75,017,206,365,650	33.88
Jumlah 20 kota				10,121,420,504,738	34,286,368,590,203	29.52
Catatan: *) belanja pendidikan tak lengkap, 1) menggunakan APBD tahun 2014, 2) menggunakan APBD 2013						
1) data APBD tahun 2014 dan 2) dana APBD 2013						

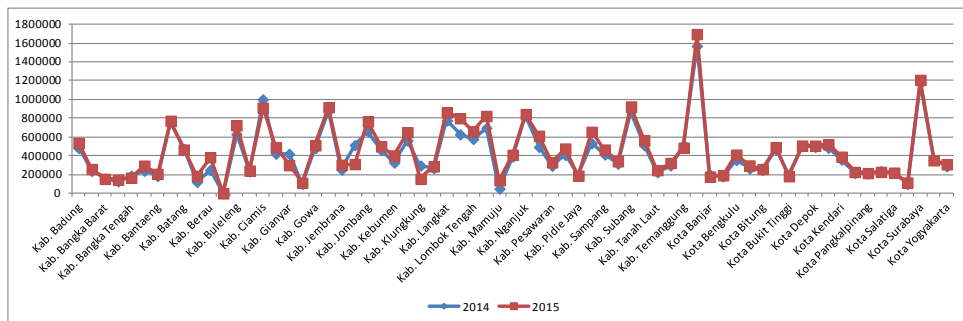
Grafik 4.21B
Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2015



E. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD 67 kabupaten/kota

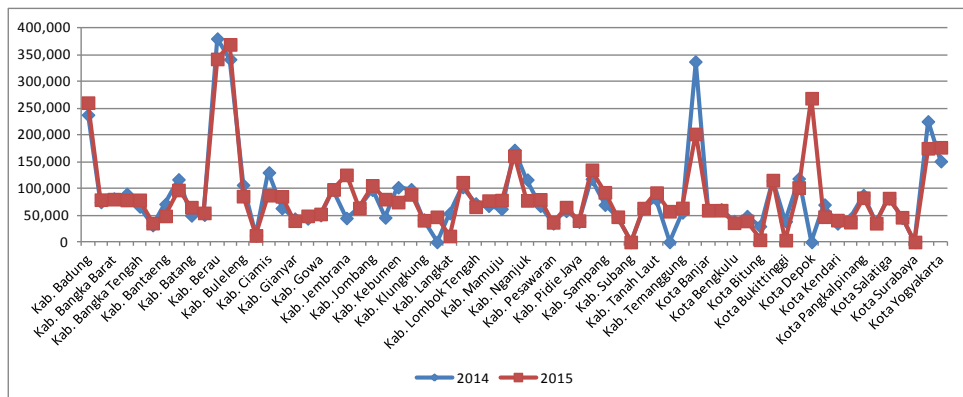
Analisis perkembangan keuangan hanya untuk enam jenis data dan indikator keuangan yang merupakan hal pokok dalam keuangan SKPD. Berdasarkan Tabel 4.25 gaji dan tunjangan meningkat sebesar 2,96%, rata-rata kabupaten meningkat sebesar 2,77% lebih kecil daripada kota sebesar 3,43%, sehingga

Grafik 4.22
Perkembangan Belanja Tidak langsung Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2014--2015

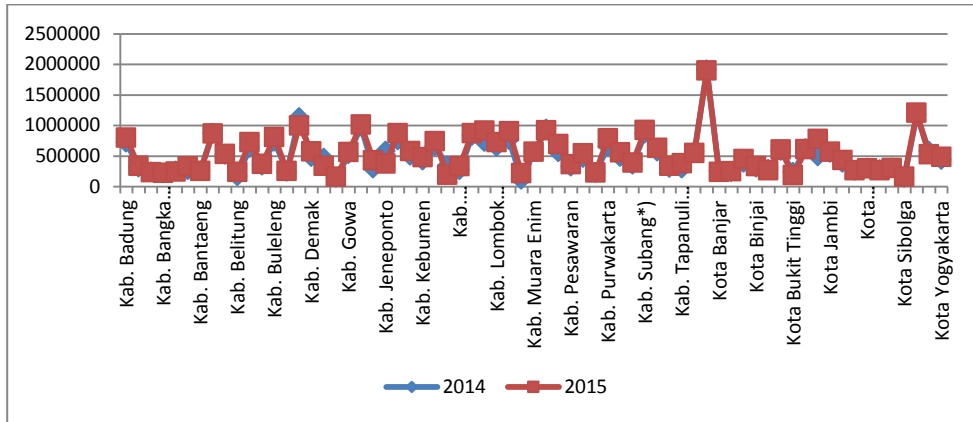


Berdasarkan Tabel 4.26 belanja pegawai meningkat sebesar 2,28%, rata-rata kabupaten menurun 0,22% dan kota meningkat 7,85%, sehingga perbedaan wilayah 8,06% lebih besar kota daripada kabupaten. Barang dan jasa juga meningkat sebesar 13,51%, rata-rata kabupaten meningkat 21,79% dan kota menurun 2,10%, sehingga perbedaan wilayah lebih besar kabupaten daripada kota. Belanja modal justru menurun sebesar 3,26%, rata-rata kabupaten dan kota menurun masing-masing 3,77% dan 1,80% sehingga perbedaan wilayah lebih baik kota daripada kabupaten. Secara keseluruhan, belanja langsung meningkat 2,83%, rata-rata kabupaten meningkat sebesar 4,28% dan kota menurun sebesar 0,65%, sehingga perbedaan wilayah sebesar -4,93% berarti kabupaten lebih besar daripada kota.

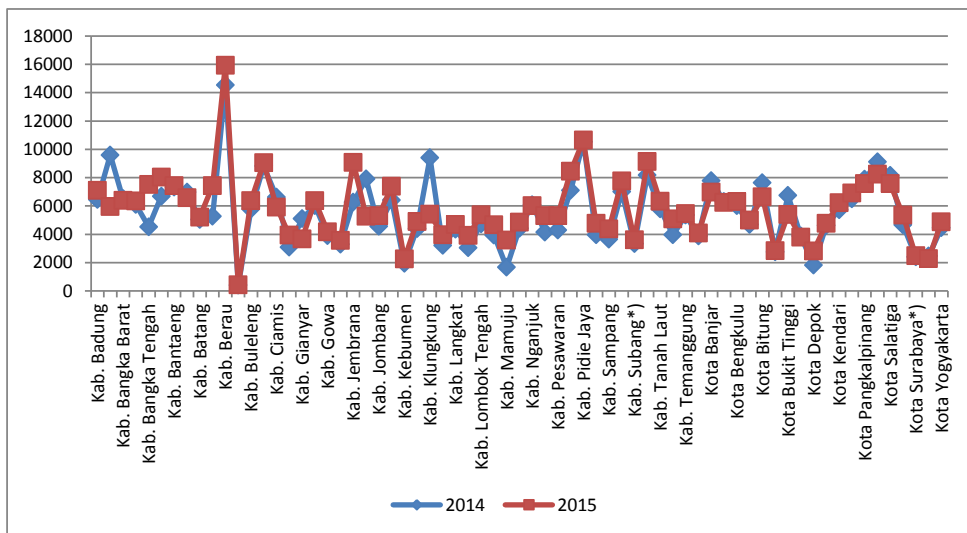
Grafik 4.23
Perkembangan Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2014--2015



Grafik 4.24
Perkembangan Belanja Tidak langsung dan Langsung
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014--2015



Grafik 4.25
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014—2015



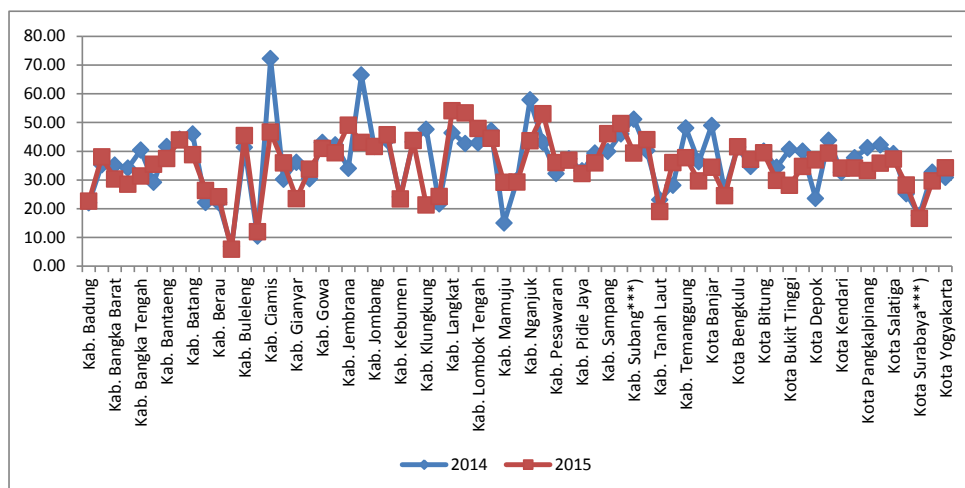
Tabel 4.29
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014--2015

No.	Nama Kab/Kota	Kode	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan		Siswa Dikdasmen		Rasio		
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	AP
1	Kab. Badung	30	Bali	720,827,916,784	796,627,987,404	111,620	112,244	6,457,874	7,097,288	9.90
2	Kab. Bangk	11	Bangka Belitung	313,760,588,900	338,179,167,820	32,685	56,783	9,599,528	5,955,641	-37.96
3	Kab. Bangka Barat	11	Bangka Belitung	238,632,614,632	233,910,672,394	36,654	36,642	6,510,411	6,383,676	-1.95
4	Kab. Bangka Selatan	11	Bangka Belitung	217,727,939,949	223,187,364,068	35,712	35,138	6,096,773	6,351,738	4.18
5	Kab. Bangka Tengah	11	Bangka Belitung	254,709,456,500	244,320,387,900	56,253	32,501	4,527,927	7,517,319	66.02
6	Kab. Bangli	30	Bali	271,639,736,736	329,772,262,261	40,603	41,063	6,690,140	8,030,886	20.04
7	Kab. Bantaeng	25	Sulawesi Selatan	255,183,169,475	255,832,135,726	34,815	34,410	7,329,690	7,434,819	1.43
8	Kab. Bantul	5	DI Yogyakarta	873,616,661,207	869,578,769,453	125,213	132,130	6,977,044	6,581,236	-5.67
9	Kab. Batang	4	Jawa Tengah	521,656,397,711	530,421,466,123	103,209	101,946	5,054,369	5,202,965	2.94
10	Kab. Belitung	11	Bangka Belitung	172,344,300,459	239,712,835,009	32,708	32,245	5,269,179	7,434,109	41.09
11	Kab. Berau	20	Kalimantan Timur	629,211,041,294	726,261,855,358	43,291	45,612	14,534,454	15,922,601	9.55
12	Kab. Bogor*)	2	Jawa Barat	341,634,935,880	369,334,100,872	848,001	854,291	402,871	432,328	7.31
13	Kab. Buleleng	30	Bali	737,482,533,440	810,168,415,139	127,663	127,300	5,776,792	6,364,245	10.17
14	Kab. Bulungan	21	Kalimantan Utara	243,852,728,030	254,011,646,247	27,657	28,085	8,817,035	9,044,388	2.58
15	Kab. Ciamis	2	Jawa Barat	1,130,867,321,175	999,500,486,053	170,570	168,876	6,229,931	5,921,211	-10.69
16	Kab. Demak	4	Jawa Tengah	484,909,230,000	576,253,275,631	156,473	146,348	3,098,996	3,937,555	27.06
17	Kab. Gianyar	30	Bali	464,337,844,363	339,466,455,176	91,002	92,630	5,102,502	3,664,757	-28.18
18	Kab. Gorontalo Utara	23	Gorontalo	145,131,398,223	160,665,688,525	24,093	25,245	6,023,799	6,364,258	5.65
19	Kab. Gowat	25	Sulawesi Selatan	531,200,417,035	564,347,906,409	136,096	135,204	3,903,130	4,174,047	6.94
20	Kab. Indragiri	2	Jawa Barat	979,999,484,822	1,015,701,136,000	297,041	284,110	3,299,206	3,575,028	8.36
21	Kab. Jember	30	Bali	297,820,597,480	429,113,643,859	47,566	47,282	6,261,208	9,075,624	44.95
22	Kab. Jember	25	Sulawesi Selatan	578,766,155,455	374,824,794,745	73,134	71,080	7,913,777	5,273,281	-33.37
23	Kab. Jombang	6	Jawa Timur	752,803,803,683	692,577,984,734	165,606	154,381	4,576,325	5,305,727	15.94
24	Kab. Karangasem	30	Bali	506,640,525,109	580,778,852,248	79,033	78,639	6,410,493	7,385,840	15.22
25	Kab. Kebumen	4	Jawa Tengah	428,927,564,000	477,617,629,000	220,156	211,521	1,948,289	2,258,015	15.90
26	Kab. Kendal	4	Jawa Tengah	660,310,018,957	739,162,410,419	149,715	150,607	4,410,447	4,907,889	11.28
27	Kab. Klungkung	30	Bali	338,071,256,790	194,417,764,033	35,910	35,888	9,414,404	5,417,347	-42.46
28	Kab. Kotawaringin Timur	17	Kalimantan Tengah	268,126,124,075	335,555,475,125	83,120	84,493	3,225,771	3,971,400	23.11
29	Kab. Langkat	8	Sumatera Utara	829,395,102,431	873,374,595,000	190,175	186,278	4,361,220	4,688,555	7.51
30	Kab. Lebak	3	Banten	730,525,813,468	911,992,852,335	239,125	232,936	3,054,996	3,915,208	28.16
31	Kab. Lombok Tengah	31	Nusa Tenggara Barat	650,600,784,432	726,349,854,725	137,161	135,229	4,743,337	5,371,258	13.24
32	Kab. Lombok Timur	31	Nusa Tenggara Barat	764,463,634,447	901,409,202,183	193,510	193,331	3,950,512	4,662,518	18.02
33	Kab. Mamuju	26	Sulawesi Barat	111,905,361,218	217,262,012,267	66,984	60,618	1,670,628	3,584,117	114.54
34	Kab. Muara Enim	10	Sumatera Selatan	563,372,832,487	570,961,347,348	127,482	117,722	4,419,234	4,850,082	9.75
35	Kab. Nganjuk	6	Jawa Timur	940,295,319,233	921,597,512,772	154,423	152,968	6,089,089	6,023,986	-1.07
36	Kab. Pekalongan	4	Jawa Tengah	561,709,512,650	692,577,984,734	135,236	130,086	4,153,550	5,324,001	28.18
37	Kab. Pesawaran	16	Lampung	328,339,919,694	367,093,611,000	76,476	68,947	4,293,372	5,324,287	24.01
38	Kab. Pidie	7	Aceh	467,012,243,220	541,947,292,994	65,862	64,199	7,090,769	8,441,678	19.05
39	Kab. Pidie Jaya	7	Aceh	230,088,244,752	227,508,395,073	21,845	21,377	10,532,765	10,642,672	1.04
40	Kab. Purwakarta	2	Jawa Barat	651,707,592,966	789,785,622,462	164,777	165,798	3,955,088	4,763,541	20.44
41	Kab. Sampang	6	Jawa Timur	482,996,181,563	558,615,127,154	132,082	127,461	6,656,790	4,382,636	-19.85
42	Kab. Sintang	25	Sulawesi Selatan	361,246,499,292	389,066,825,831	51,435	50,162	7,023,360	7,756,206	10.43
43	Kab. Subang*)	2	Jawa Barat	869,009,361,190	925,072,160,408	260,212	256,846	3,339,621	3,601,661	7.85
44	Kab. Tabanan	30	Bali	575,143,504,914	629,520,260,521	70,375	68,868	8,172,554	9,140,969	11.85
45	Kab. Tanah Laut	19	Kalimantan Selatan	305,081,274,877	338,750,966,826	52,640	53,599	5,795,617	6,332,978	9.27
46	Kab. Tapanuli Tengah	8	Sumatera Utara	297,238,275,720	380,972,040,300	75,103	75,032	3,957,742	5,077,461	28.29
47	Kab. Temanggung	4	Jawa Tengah	567,732,758,142	549,296,359,944	106,004	100,507	5,355,767	5,465,255	2.04
48	Kota Bandung	2	Jawa Barat	1,907,112,282,002	1,898,372,479,284	491,365	464,775	3,881,254	4,084,498	5.24
49	Kota Banjar	2	Jawa Barat	258,781,392,428	236,827,788,463	33,199	33,995	7,794,855	6,966,548	-10.63
50	Kota Banjarbaru	19	Kalimantan Selatan	211,410,803,222	251,644,249,823	38,307	40,208	6,302,002	6,258,562	-0.69
51	Kota Bengkulu	15	Bengkulu	393,277,963,618	447,612,380,913	65,277	70,870	6,024,755	6,315,964	4.83
52	Kota Binjai	8	Sumatera Utara	312,747,498,083	335,748,576,894	66,578	67,219	4,697,460	4,994,846	6.33
53	Kota Bitung	22	Sulawesi Utara	279,517,636,225	263,043,664,065	36,613	39,583	7,634,382	6,645,370	-12.95
54	Kota Bogor	2	Jawa Barat	584,914,708,684	607,564,879,938	211,779	213,549	2,761,911	2,845,084	3.01
55	Kota Bukit Tinggi	9	Sumatera Barat	234,178,378,083	185,337,097,661	34,712	34,306	6,746,323	5,402,469	-19.92
56	Kota Denpasar	30	Bali	620,475,662,520	610,182,607,232	159,579	160,271	3,888,204	3,807,193	-2.08
57	Kota Depok	2	Jawa Barat	494,430,984,842	775,930,930,682	271,260	275,814	1,822,720	2,813,240	54.34
58	Kota Jambi	23	Jambi	554,215,179,755	568,181,899,255	119,530	119,212	4,636,620	4,766,147	2.79
59	Kota Kendari	27	Sulawesi Tenggara	393,201,766,536	430,727,406,000	68,555	69,227	5,735,567	6,221,957	8.48
60	Kota Magelang	4	Jawa Tengah	260,384,065,000	264,422,625,000	40,043	38,250	6,502,611	6,913,010	6.31
61	Kota Pangkajene	11	Bangka Belitung	299,262,246,206	297,780,199,358	37,957	39,257	7,884,244	7,585,404	-3.79
62	Kota Parepare	25	Sulawesi Selatan	274,528,534,288	263,197,560,648	30,122	31,951	9,113,888	8,237,537	-9.62
63	Kota Salatiga	4	Jawa Tengah	300,871,845,000	301,462,571,000	36,892	39,803	8,155,477	7,573,866	-7.13
64	Kota Sibolga	8	Sumatera Utara	143,609,452,271	161,284,107,980	30,783	30,118	4,665,220	5,355,074	14.79
65	Kota Surabaya*)	6	Jawa Timur	1,174,328,680,969	1,208,441,401,995	487,015	485,618	2,411,278	2,488,461	3.20
66	Kota Tangerang Selatan	3	Banten	580,510,583,190	527,431,346,167	234,842	231,544	2,471,920	2,277,888	-7.85
67	Kota Yogyakarta	5	DI Yogyakarta	438,782,554,325	486,226,732,381	98,541	99,605	4,452,792	4,881,549	9.63
Jumlah kabupaten + kota				33,399,661,296,497	35,515,909,349,601	8,299,455	8,213,738	4,024,320	4,323,964	7.45
Jumlah 47 kabupaten				23,653,119,079,249	25,394,488,844,864	5,706,506	5,628,563	4,144,939	4,511,718	8.85
Jumlah 20 kota				9,746,542,217,247	10,121,420,504,738	2,592,949	2,585,175	3,758,864	3,915,178	4.16
Perbedaan wilayah										-4.69

Catatan: *) tahun 2014 dan 2015 BTL Kab Bogor hanya ada gaji guru sehingga tidak dimasukkan
*) tahun 2014 BL Kab Kotim, Subang, Tapteng, dan Kota Surabaya tak ada data, tahun 2015 Kab Subang dan Kota Surabaya

Berdasarkan Tabel 4.30 diketahui belanja pendidikan sedikit meningkat dari Rp33.399.661,3 juta menjadi Rp35.536.463,1 juta. Demikian juga, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga meningkat dari Rp98.293.361,6 juta menjadi Rp109.303.575,0 atau meningkat 11,20%. Dengan demikian, persentase belanja pendidikan terhadap APBD sedikit menurun dari 33,98% pada tahun 2014 menjadi 32,51% atau menurun 4,32%, rata-rata kabupaten menurun dari 35,09% menjadi 33,88% atau 3,46%, dan kota menurun dari 31,55% menjadi 29,52% atau menurun 6,44%, sehingga perbedaan wilayah sebesar -2,98%

Grafik 4.26
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2014—2015



F. Bahasan Hasil Provinsi Bali dan 67 Kabupaten/Kota

Bila hasil Provinsi Bali dan kabupaten/kota sampel tahun 2014 dan 2015 dibandingkan maka menunjukkan hal yang sama pada belanja tidak langsung dan belanja pendidikan (penjumlahan belanja tidak langsung dengan langsung), sedangkan belanja langsung tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap APBD menunjukkan hal yang berbeda.

Tabel 4.31 merupakan rangkuman belanja tak langsung Provinsi Bali dengan kabupaten/kota sampel menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan pada belanja tidak langsung tahun 2014 dan 2015 baik di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota menduduki porsi yang tertinggi (63,91% dan 56,14%, 62,30% dan 59,22%), sedangkan yang terendah adalah retribusi (masing-masing mendekati 0,00%). Sebaliknya, modal pada belanja langsung tahun 2014 Provinsi Bali dengan kabupaten/kota sampel menduduki porsi yang tertinggi (53,99% dan 55,19%). Bila dijumlahkan antara belanja tidak langsung dan tidak langsung tahun 2014 dan 2015 baik di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota sampel, belanja tidak langsung menduduki porsi yang lebih tinggi (83,81% dan 83,90%, 82,36% dan 83,92%). Hal ini berarti, gaji dan tunjangan masih merupakan belanja pendidikan yang besar daripada untuk program-program pendidikan.

Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa Provinsi Bali (Rp5.937.556,00 dan Rp6.176.626,00) lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel (Rp4.063.356,00 dan Rp8.213.739,00). Persentase belanja pendidikan terhadap

APBD Provinsi Bali (35,57% dan 33,87%) lebih besar daripada rata-rata kabupaten/kota sampel (34,31% dan 32,51%).

Tabel 4.31
Rangkuman Belanja Pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2014 dan 2015

No.	Jenis Belanja	Tahun	Variabel	Gaji/Tun-jangan	Tambahan Penghasilan	Retribusi
1.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2014	Provinsi Bali	63.91	36.09	0.00
			Kab/Kota Sampel	56.14	43.86	0.00
			Kabupaten Sampel	54.88	45.12	0.00
			Kota Sampel	59.62	40.38	0.00
		2015	Provinsi Bali	62.30	37.70	0.00
			Kab/Kota Sampel	59.22	40.78	0.00
			Kabupaten Sampel	59.36	40.64	0.00
			Kota Sampel	58.87	41.12	0.00
	Jenis Belanja	Tahun	Variabel	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal
2.	Belanja Langsung (BL)	2014	Provinsi Bali	7.47	38.54	53.99
			Kab/Kota Sampel	11.72	33.10	55.19
			Kabupaten Sampel	12.11	29.81	58.08
			Kota Sampel	10.92	39.71	49.37
		2015	Provinsi Bali	8.50	52.02	39.48
			Kab/Kota Sampel	12.69	35.65	51.67
			Kabupaten Sampel	12.08	34.89	53.02
			Kota Sampel	14.22	37.56	48.22
	Jenis Belanja	Tahun	Variabel	%BTL	%BL	
3.	BTL dan BL	2014	Provinsi Bali	83.81	16.19	
			Kab/Kota Sampel	83.90	16.10	
			Kabupaten Sampel	85.14	14.86	
			Kota Sampel	80.66	19.34	
		2015	Provinsi Bali	82.36	17.64	
			Kab/Kota Sampel	83.92	16.08	
			Kabupaten Sampel	83.86	16.14	
			Kota Sampel	84.06	15.94	
	Jenis Belanja	Tahun	Variabel	Rasio BP/Siswa	%BP thd APBD	
4.	Belanja Pendidikan (BP)	2014	Provinsi Bali	Rp 5,937,556	35.57	
			Kab/Kota Sampel	Rp 4,063,356	34.31	
			Kabupaten Sampel	Rp 4,144,939	35.09	
			Kota Sampel	Rp 3,883,810	32.60	
		2015	Provinsi Bali	Rp 6,176,626	33.87	
			Kab/Kota Sampel	Rp 8,213,738	32.51	
			Kabupaten Sampel	Rp 5,628,563	33.88	
			Kota Sampel	Rp 2,585,175	29.52	

Tabel 4.32 menunjukkan rangkuman perkembangan angka pertumbuhan belanja pendidikan Provinsi Bali dan kabupaten/kota sampel tahun 2014--2015. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung Provinsi Bali sebesar 2,33% lebih kecil daripada kabupaten/kota sampel sebesar 7,03% maka rata-rata kabupaten sebesar 7,97% dan kota sebesar 4,75%. Angka pertumbuhan belanja langsung

Provinsi Bali sebesar 13,48% lebih besar daripada kabupaten/kota sampel sebesar 3,21% maka rata-rata kabupaten sebesar 4,80% dan kota sebesar -0,65% per tahun. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan langsung Provinsi Bali sebesar 4,14% per tahun dibandingkan dengan kabupaten/kota sampel sebesar 6,40% dengan rata-rata kabupaten sebesar 7,45% dan kota sebesar 3,85% per tahun. Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen Provinsi Bali sebesar 4,03% lebih kecil daripada kabupaten/kota sampel sebesar 7,51% dengan rata-rata kabupaten sebesar 8,94% dan kota 4,16%. Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD menurun sebesar 2,90% per tahun lebih kecil daripada kabupaten/kota menurun sebesar 4,38% dengan rata-rata kabupaten menurun sebesar 3,54% dan kota menurun sebesar 6,44%.

Tabel 4.32
Rangkuman Perkembangan Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2014--2015

No.	Jenis Belanja	Prov/Kab/Kota	2014- 2015
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Provinsi Bali	2.33
		Kab/Kota Sampel	7.03
		Kabupaten Sampel	7.97
		Kota Sampel	4.75
2	Belanja Langsung (BL)	Provinsi Bali	13.48
		Kab/Kota Sampel	3.21
		Kabupaten Sampel	4.8
		Kota Sampel	-0.65
3	Belanja Tak Langsung dan Langsung (BTL+BL)	Provinsi Bali	4.14
		Kab/Kota Sampel	6.4
		Kabupaten Sampel	7.45
		Kota Sampel	3.85
4	Rasio Belanja Pendidikan thd Siswa Dikdasmen (R-BP/Siswa)	Provinsi Bali	4.03
		Kab/Kota Sampel	7.51
		Kabupaten Sampel	8.94
		Kota Sampel	4.16
5	Persentase Belanja Pendidikan thd APBD (%BP thd APBD)	Provinsi Bali	-2.90
		Kab/Kota Sampel	-4.38
		Kabupaten Sampel	-3.54
		Kota Sampel	-6.44

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan tujuan maka terdapat lima simpulan dari analisis keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. Deskripsi Data

Untuk melakukan analisis keuangan maka digunakan hasil pengolahan instrumen keuangan yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung selama tahun 2014 dan 2015. Sebagai sampel adalah 67 kabupaten/kota dari 25 provinsi. Data belanja tidak langsung Kabupaten Bogor tidak tersedia. Data belanja langsung tahun 2014 tidak tersedia di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Subang, Tapanuli Tengah, dan Kota Surabaya, sedangkan tahun 2015 tidak tersedian di Kabupaten Subang dan Kota Surabaya.

2. Analisis Data Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan jenis belanja maka terdapat belanja tidak langsung dan langsung. Belanja tidak langsung tahun 2014 sebesar Rp3.798.709,7 juta dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar Rp2.427.609,4 juta atau 63,91%, tambahan penghasilan sebesar Rp1.371.096,9 juta atau 36,09%, dan retribusi sebesar Rp3.400,0 ribu atau mendekati 0,00%. Hal ini berarti gaji dan tunjangan masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp733.729,9 juta dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp54.802,1 juta atau 7,47%, belanja barang dan jasa sebesar Rp282.781,1 juta sebesar 38,54%, dan belanja modal sebesar Rp396.146,7 juta atau 53,99%. Hal ini berarti belanja modal menduduki porsi yang paling tinggi. Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dengan langsung maka belanja langsung sebesar 83,81% menduduki porsi yang sangat tinggi daripada belanja tidak langsung sebesar 16,19%.

Belanja tidak langsung tahun 2015 sebesar Rp3.887.391,5 juta dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar Rp2.421.657,7 juta atau 62,30%, tambahan penghasilan sebesar Rp1.465.731,4 juta atau 37,70%, dan retribusi sebesar Rp2.375,0 ribu atau mendekati 0,00%. Hal ini berarti gaji dan tunjangan masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2015 sebesar Rp832.656,6 juta dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp70.811,8 juta atau 8,50%, belanja barang dan jasa sebesar Rp433.137,8 juta sebesar 52,02%, dan belanja modal sebesar Rp328.706,9 juta atau 39,48%. Hal ini berarti belanja barang dan jasa menduduki porsi yang paling tinggi. Bila dibandingkan

antara belanja tidak langsung dengan langsung maka belanja tidak langsung sebesar 82,36% menduduki porsi yang sangat tinggi daripada belanja langsung sebesar 17,64%.

Pada tahun 2014, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp5.937.556,00 dengan rasio terbesar terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar Rp9.414.404,00 dan terkecil terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp3.888.204,00. Belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 35,57% dengan persentase terbesar terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 47,61% dan terkecil terdapat di Kabupaten Badung sebesar 22,05%. Pada tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp6.176.626,00 dengan rasio terbesar terdapat di Kabupaten Tabanan sebesar Rp9.140.969,00 dan terkecil terdapat di Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.664.757,00. Belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 33,87% dengan persentase terbesar terdapat di Kabupaten Jembrana sebesar 49,04% dan terkecil terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 21,30%.

3. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Angka pertumbuhan belanja tidak langsung selama 2 tahun sebesar 2,33% per tahun dengan pertumbuhan menurun sangat ekstrim di Kabupaten Klungkung sebesar 48,06% per tahun dan terkecil di Kabupaten Gianyar sebesar 28,77%, namun terdapat pertumbuhan meningkat terbesar di Kabupaten Bangli sebesar 22,64% dan terkecil di Kota Denpasar sebesar 1,29% per tahun.

Angka pertumbuhan belanja langsung selama 2 tahun sebesar 13,48% per tahun dengan pertumbuhan terbesar sangat ekstrim di Kabupaten Jembrana sebesar 180,03% per tahun dan terkecil di Kabupaten Tabanan sebesar 0,91% per tahun, namun terdapat pertumbuhan menurun terbesar di Kabupaten Buleleng sebesar 19,70% per tahun dan terkecil di Kabupaten Klungkung sebesar 3,18% per tahun.

Angka pertumbuhan belanja tidak langsung dan langsung selama 2 tahun sebesar 4,14% per tahun dengan pertumbuhan meningkat terbesar di Kabupaten Jembrana sebesar 44,08% per tahun dan terkecil di Kabupaten Tabanan sebesar 9,45% per tahun, namun terdapat pertumbuhan menurun terbesar di Kabupaten Klungkung sebesar 42,49% per tahun dan terkecil di Kota Denpasar sebesar 1,66% per tahun.

Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen meningkat sebesar 4,03% karena rata-rata kabupaten meningkat sebesar 5,04% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 7,12% lebih bagus kabupaten. Sebaliknya, angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD justru menurun sebesar 2,90% dengan rata-rata kabupaten menurun 1,27% lebih kecil daripada kota sebesar 13,30%, sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 12,03%.

4. Analisis Data Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Sampel

Analisis 67 kabupaten/kota menggunakan cara yang sama dengan Provinsi Bali. Belanja tidak langsung tahun 2014 sebesar Rp30.553.392,7 juta dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar Rp17.153.007,0 juta atau 56,14%, tambahan penghasilan sebesar Rp13.400.262,0 juta atau 43,86%, dan retribusi sebesar Rp123,7 juta atau mendekati 0,00%. Bila dilihat rata-rata kabupaten sampel maka gaji dan tunjangan sebesar 54,88%, tambahan penghasilan sebesar 45,12%, dan retribusi mendekati 0,00%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka gaji dan tunjangan sebesar 59,62%, tambahan penghasilan sebesar 40,38%, dan retribusi mendekati 0,00%. Hal ini berarti bahwa gaji dan tunjangan masih menduduki porsi yang tertinggi, baik rata-rata kabupaten maupun rata-rata kota.

Sebaliknya, belanja langsung kabupaten/kota sampel tahun 2014 sebesar Rp5.861.910,1 juta dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp686.776,3 juta atau 11,72%, belanja barang dan jasa sebesar Rp1.940.230,3 juta sebesar 33,10%, dan belanja modal sebesar Rp3.234.903,6 juta atau 55,19%. Bila dilihat rata-rata kabupaten sampel maka pegawai sebesar 12,11%, barang dan jasa sebesar 29,81%, dan modal sebesar 58,08%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka pegawai sebesar 10,92%, barang dan jasa sebesar 39,71%, dan modal sebesar 49,37%. Hal ini berarti belanja modal rata-rata kabupaten maupun rata-rata kota menduduki porsi tertinggi.

Belanja tidak langsung kabupaten/kota sampel tahun 2015 sebesar Rp29.821.023,7 juta dengan rincian gaji dan tunjangan sebesar Rp17.660.717,0 juta atau 59,22%, tambahan penghasilan sebesar Rp12.160.190,3 juta atau 40,76%, dan retribusi sebesar Rp116,3 juta atau mendekati 0,00%. Bila dilihat rata-rata kabupaten sampel maka gaji dan tunjangan sebesar 59,36%, tambahan penghasilan sebesar 40,64%, dan retribusi mendekati 0,00%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka gaji dan tunjangan sebesar 58,87%, tambahan penghasilan sebesar 41,12%, dan retribusi mendekati 0,00%. Hal ini berarti bahwa gaji dan tunjangan masih menduduki porsi tertinggi, baik rata-rata kabupaten maupun rata-rata kota.

Belanja langsung kabupaten/kota sampel tahun 2015 sebesar Rp5.715.439,4 juta dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp725.056,0 juta atau 12,69%, belanja barang dan jasa sebesar Rp2.037.320,2 juta sebesar 35,65%, dan belanja modal sebesar Rp2.953.063,2 juta atau 51,67%. Bila dilihat rata-rata kabupaten sampel maka pegawai sebesar 12,08%, barang dan jasa sebesar 34,89%, dan modal sebesar 53,02%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka pegawai sebesar 14,22%, barang dan jasa sebesar 37,56%, dan modal sebesar 48,22%. Hal ini berarti belanja modal rata-rata kabupaten maupun rata-rata kota menduduki porsi tertinggi.

Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dengan langsung pada tahun 2014 maka belanja langsung sebesar 83,90% menduduki porsi yang lebih tinggi daripada belanja tidak langsung sebesar 16,10%. Bila dilihat rata-rata kabupaten

sampel maka belanja tidak langsung sebesar 85,14% dan belanja langsung sebesar 14,86%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka belanja tidak langsung sebesar 80,66% dan belanja langsung sebesar 19,34%. Hal ini berarti belanja tidak langsung rata-rata kabupaten maupun kota menduduki porsi yang lebih besar daripada belanja langsung.

Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dengan langsung pada tahun 2015 maka belanja langsung sebesar 83,92% menduduki porsi yang lebih tinggi daripada belanja tidak langsung sebesar 16,08%. Bila dilihat rata-rata kabupaten sampel maka belanja tidak langsung sebesar 83,86% dan belanja langsung sebesar 16,14%. Hal yang sama untuk rata-rata kota sampel maka belanja tidak langsung sebesar 84,06% dan belanja langsung sebesar 15,94%. Hal ini berarti belanja tidak langsung rata-rata kabupaten maupun kota menduduki porsi yang lebih besar daripada belanja langsung.

Pada tahun 2014, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen di kabupaten/kota sampel sebesar Rp4.063.356,00 dengan rata-rata kota sebesar Rp3.883.810,00 lebih kecil daripada kabupaten sebesar Rp4.144.939,00. Pada tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen di kabupaten/kota sampel sebesar Rp4.326.467,00 dengan rata-rata kota sebesar Rp3.915.178,00 lebih kecil daripada kabupaten sebesar Rp4.515.370,00.

5. Analisis Perkembangan Keuangan SKPD 67 Kabupaten/Kota Sampel

Angka pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 7,03% per tahun dengan pertumbuhan sangat ekstrim di Kabupaten Mamuju sebesar 178,62% per tahun dan terkecil di Kota Salatiga sebesar 0,17% per tahun. Namun, terdapat pertumbuhan menurun terbesar di Kabupaten Klungkung sebesar 48,06% per tahun dan terkecil di Kabupaten Batang sebesar 1,41% per tahun. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata kota sampel sebesar 4,75% ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten sampel sebesar 7,97% per tahun, sehingga terjadi perbedaan wilayah 3,23%.

Angka pertumbuhan belanja langsung tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 3,21% per tahun dengan pertumbuhan sangat ekstrim di Kabupaten Jembrana sebesar 180,03% per tahun dan terkecil di Kota Salatiga sebesar 0,28% per tahun, namun terdapat pertumbuhan menurun terbesar di Kabupaten Langkat sebesar 79,16% per tahun dan terkecil di Kabupaten Bangka Barat sebesar 1,37% per tahun. Angka pertumbuhan belanja langsung rata-rata kota sampel sebesar 0,65% ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten sampel sebesar 4,80% per tahun.

Angka pertumbuhan belanja tidak langsung dan langsung selama 2 tahun sebesar 6,40% per tahun dengan pertumbuhan meningkat terbesar di Kabupaten Mamuju sebesar 94,15% per tahun dan terkecil di Kabupaten Bantaeng sebesar 0,25% per tahun, namun terdapat pertumbuhan menurun terbesar di Kabupaten Klungkung sebesar 42,49% per tahun dan terkecil di Kabupaten Bantul sebesar 0,46% per tahun.

Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen meningkat sebesar 7,51% karena rata-rata kabupaten meningkat sebesar 8,94% sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 4,78% lebih bagus kabupaten. Sebaliknya, angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD justru menurun sebesar 4,32% dengan rata-rata kabupaten menurun 3,46% lebih kecil daripada kota sebesar 6,44%, sehingga terjadi perbedaan wilayah sebesar 2,98%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data keuangan SKPD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Sampel maka diberikan rekomendasi dalam bentuk secara umum.

1. Bila dilihat dari belanja tidak langsung maka gaji dan tunjangan di Provinsi Bali sangat besar dibandingkan dengan kabupaten/kota sampel, sedangkan rata-rata kabupaten lebih kecil daripada kota, pertanyaannya adalah apakah tidak ada ketentuan berapa maksimal untuk gaji dan tunjangan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kabupaten/kota?
2. Akibat belanja tidak langsung lebih besar maka belanja langsung yang digunakan untuk peningkatan program-program pendidikan menjadi lebih kecil. Pada tahun 2014 belanja modal lebih besar daripada belanja barang dan jasa, namun pada tahun 2015 sebaliknya sehingga timbul pertanyaan apakah memang belanja modal untuk membangun infrastruktur pendidikan sudah cukup sehingga tahun 2015 menurun mengingat infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan?
3. Perkembangan belanja tak langsung dan langsung masih meningkat demikian juga bila dengan dibandingkan dengan siswa dikdasmen. Kondisi ini harus dipertahankan. Namun, bila belanja pendidikan dibandingkan dengan APBD ternyata menurun. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa belanja pendidikan menurun padahal peningkatan mutu pendidikan masih harus dilaksanakan?
4. Pada tahun mendatang hendaknya analisis ini dapat dilakukan pada semua kabupaten/kota sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh kondisi belanja pendidikan di kabupaten/kota. Untuk itu, menjadi pertanyaan apakah dapat dilakukan analisis serupa dengan melibatkan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Keuangan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota)*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kintamani, Ida. 2007. Analisis Data. Bahan pelatihan regional Pusat Statistik Pendidikan.
- Kkbi.web.id/indikator diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2014. Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD, SMP, dan SM. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2015. Data Keuangan dari SKPD 67 kabupaten/kota sampel, Tahun 2014—2015. Hasil pengolahan data dari pengumpulan data tahun 2015, tidak diterbitkan.
- UNESCO/OECD, 2013, *Education at a Glance 2011*, UNESCO Publishing & Bernan Press.
- Wikipedia.org/wiki/data diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Wikipedia.org/wiki/informasi diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.